

PARTISIPASI DAN PEMIKIRAN POLITIK KIAI MUSTA'IN ROMLI  
PADA MASA ORDE BARU DI INDONESIA  
(1973-1985)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Studi Islam



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Oleh:  
Imam Walid Asrofuddin Ulil Huda  
NIM. 02040121002

PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA

2022

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Walid Asrofuddin Ulil Huda

NIM : 02040121002

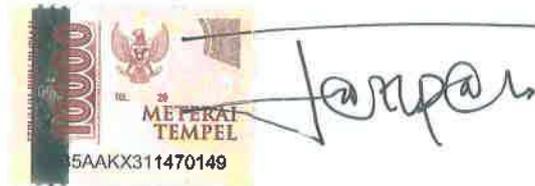
Program : Magister Studi Islam

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Imam Walid Asrofuddin Ulil Huda

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Partisipasi dan Pemikiran Politik Kiai Musta’in Romli pada Masa Orde Baru di Indonesia (1973-1985)” yang ditulis oleh Imam Walid Asrofuddin Ulii Huda ini telah disetujui pada 26 Desember 2022.

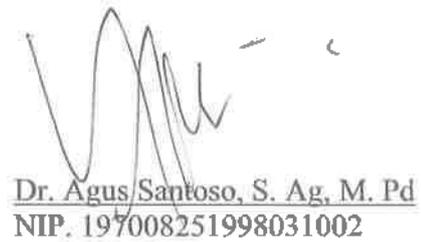
Oleh:

### PEMBIMBING I



Dr. Imam Ibnu Hajar, S. Ag, M. Ag  
NIP. 196808062000031003

### PEMBIMBING II

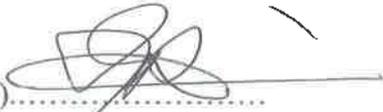
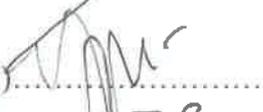


Dr. Agus Santoso, S. Ag, M. Pd  
NIP. 197008251998031002

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul “Partisipasi dan Pemikiran Politik Kiai Musta’in Romli pada Masa Orde Baru di Indonesia (1973-1985)” yang ditulis oleh Imam Walid Asrofuddin Ulii Huda ini telah diuji dalam ujian tesis pada 28 Desember 2022.

Tim Penguji:

1. Dr. Imam Ibnu Hajar, S. Ag., M. Ag (Ketua Penguji).....
2. Dr. Agus Santoso, S. Ag., M. Pd (Sekretaris Penguji).....
3. Dr. H. Mukhlisin Saad, M. Ag (Penguji I) .....
4. Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M. Ag (Penguji II) .....

Surabaya, 28 Desember 2022



Prof. H. Masdar Hilmy, S. Ag., MA, Ph.D  
NIP. 197103021996031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Walid Asrofuddin Ulil Huda  
NIM : 02040121002  
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/ Studi Islam  
E-mail address : walidberiman@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

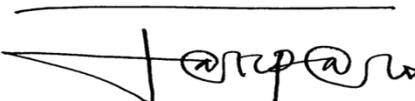
Partisipasi dan Pemikiran Politik Kiai Musta'in Romli Pada Masa Orde Baru  
di Indonesia (1973-1985)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Penulis



Imam Walid Asrofuddin Ulil Huda

## ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Partisipasi dan Pemikiran Politik Kiai Musta’in Romli Pada Masa Orde Baru di Indonesia (1973-1985)”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah a) bagaimana figur Kiai Musta’in Romli pada 1931-1985? b) bagaimana politik Islam Orde Baru (1966-1998)? c) bagaimana partisipasi dan pemikiran politik Kiai Musta’in Romli pada masa Orde Baru (1973-1985)?

Tesis ini menggunakan metode penelitian sejarah yang memiliki empat tahapan, yaitu heuristik sebagai tahapan pengumpulan data, kritik sebagai tahapan mencari keotentikan data, interpretasi sebagai tahapan dalam penafsiran fakta sejarah, dan historiografi dalam bentuk penulisan tesis ini. Metode tersebut didukung dengan penggunaan dua teori, yaitu kerangka teori partisipasi politik dan teori relasi kuasa dari Michael Foucault.

Hasil dari penelitian ini adalah a) Kiai Musta’in Romli lahir dari keturunan tokoh-tokoh hebat yang memiliki nasab sampai kepada Nabi Muhammad. Ia adalah tokoh Islam pesantren, tokoh Islam sufistik, akademisi muslim, dan tokoh Islam politik. b) Presiden Soeharto dan rezim Orde Barunya memiliki dua periodisasi dalam agenda politik Islam, yaitu periode penjinakan dan periode akomodatif. c) Partisipasi politik Kiai Musta’in Romli adalah sebagai Juru Kampanye, anggota DPR-MPR RI fraksi Golkar, dan Wakil Ketua DPP MDI. Sementara pemikiran politiknya memuat tiga hal besar, yaitu melegitimasi kepemimpinan Presiden Soeharto dan rezim Orde Barunya, berpolitik untuk Islam (pendidikan dan tarekat), pengakuan terhadap betapa kuat dan ampuhnya Pancasila. Partisipasi dan pemikiran politiknya juga didasari pada tiga hal, yaitu semangat sufistik, sejarah TQN dalam perpolitikan, dan penerapan konsep politik sunni. Tujuan utamanya bergabung ke Golkar adalah untuk menyelamatkan dan memajukan Islam, meski harus menerima berbagai resistensi dari Umat Islam.

**Kata Kunci:** Kiai, Politik, Sufistik, Sejarah, Sunni.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## ABSTRACT

This thesis is entitled "Kiai Musta'in Romli's Participation and Political Thought During the New Order Period in Indonesia (1973-1985)". The problems discussed in this study are a) how was the figure of Kiai Musta'in Romli in 1931-1985? b) how was the Islamic politics of the New Order (1966-1998)? c) how was the participation and political thought of Kiai Musta'in Romli during the New Order era (1973-1985)?

This thesis uses the historical research method which has four stages, namely heuristics as the data collection stage, criticism as the data authentication stage, interpretation as the stage in interpreting historical facts, and historiography in the form of writing this thesis. This method is supported by using two theories, namely the framework of political participation theory and Michael Foucault's theory of power relations.

The results of this study are a) Kiai Musta'in Romli was born from the descendants of great figures who have a lineage to the Prophet Muhammad. He is a pesantren Islamic figure, Sufistic Islamic figure, Muslim academic, and political Islamic figure. b) President Soeharto and his New Order regime had two periods in the Islamic political agenda, namely the taming periods and the accommodative periods. c) The political participation of Kiai Musta'in Romli is as a campaigner, a member of the Golkar faction of the DPR-MPR RI, and deputy chairman of the DPP MDI. While his political thoughts contain three major things, namely legitimizing the leadership of President Soeharto and his New Order regime, politics for Islam (education and tarekat), recognition of how strong and effective Pancasila is. His participation and political thinking are also based on three things, namely the spirit of Sufism, the history of TQN in politics, and the application of Sunni political concepts. The main goal of joining Golkar was to save and promote Islam, even though it had to accept various resistances from Muslims.

**Keywords:** Kiai, Politics, Sufism, History, Sunni.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
SAMPUL DALAM .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO .....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
PERSEMBAHAN .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	xiv
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Kerangka Teori.....	9
G. Penelitian Terdahulu .....	19
H. Metode Penelitian .....	21
I. Sistematika Pembahasan .....	25
J. Faktor Pendukung dan Penghambat Penelitian .....	26
K. Jadwal Penelitian .....	27
<b>BAB II : SEKILAS TENTANG KIAI MUSTA'IN ROMLI (1931-1973)</b>	
A. Silsilah Keluarga Kiai Musta'in Romli.....	28
1. Garis Nasab Dzurriyah .....	28
2. Lingkaran Keluarga Pesantren di Jombang .....	29
3. Keluarga Kiai Mustain Romli.....	32
a. Kakek Kiai Musta'in Romli.....	33
b. Bapak Kiai Musta'in Romli.....	34
c. Bapak Mertua Kiai Musta'in Romli.....	36
d. Kakak Kiai Musta'in Romli.....	37
B. Riwayat Pendidikan .....	38
1. Pendidikan Non Formal.....	38
2. Pendidikan Formal .....	40
C. Sejarah Kepemimpinan dan Organisasi .....	41
1. Persatuan Mahasiswa Jombang .....	41
2. Nahdlatul Ulama .....	41

3. Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsabandiyah (1958-1985) .....	42
4. Pondok Pesantren Darul Ulum (1962-1985) .....	48
5. Universitas Darul Ulum.....	51
6. Riwayat Jabatan Di Luar Kepemimpinan Darul Ulum .....	52
<b>D. Karya.....</b>	<b>54</b>
<b>E. Karakter Kiai Musta'in Romli.....</b>	<b>54</b>
1. Visioner .....	55
2. Transformasional .....	56
3. Pluralis.....	59
4. <i>Experienced</i> .....	61
5. Istiqomah .....	61
6. Puitis.....	62
 <b>BAB III : POLITIK ISLAM ORDE BARU (1966-1998)</b>	
A. Islam dan Lahirnya Rezim Orde Baru .....	63
1. Sinergi Organisasi Pemuda Islam dan TNI-AD dalam Penumpasan PKI .....	65
2. Sinergi Organisasi Masyarakat Islam dan TNI-AD dalam Penumpasan PKI.....	66
B. Perodesasi Politik Islam Orde Baru (1966-1998).....	69
1. Periode Penjinakan .....	70
a. Penolakan, Intervensi, Kewaspadaan Terhadap Islam Politik .....	72
b. Strukturisasi Partai, Ormas, dan Ideologi.....	79
2. Periode Akomodatif .....	92
a. Struktural .....	93
b. Legislatif.....	93
c. Infrastruktural .....	94
d. Kultural.....	94
C. Kondisi dan Sikap Umat Islam Terhadap Politik Islam Orde Baru... 96	
1. Sikap Terhadap Penolakan dan Intervensi Islam Politik.....	96
2. Kondisi dan Sikap Pelaksanaan Pemilu 1971.....	97
3. Kondisi dan Sikap NU Terhadap PPP.....	99
4. Respon Terhadap Asas Tunggal .....	101
 <b>BAB IV: PARTISIPASI DAN PEMIKIRAN POLITIK KIAI MUSTA'IN ROMLI (1973-1985)</b>	
A. Partisipasi Politik Kiai Musta'in Romli (1973-1985).....	103
1. Faktor-Faktor Bergabung ke Golkar .....	106
2. Perodesasi Politik Praktis .....	109
a. Fase Sembunyi-Sembunyi (1973-1975).....	110
b. Fase Terang-Terangan (1975-1985).....	116
B. Pemikiran Politik Kiai Musta'in Romli (1973-1985).....	121

C. Landasan Partisipasi dan Pemikiran .....	134
1. Tasawuf .....	134
2. Sejarah <i>TQN dalam Pusaran Politik</i> .....	134
3. Politik Sunni .....	135
D. Hasil Partisipasi dan Pemikiran Politik.....	139
1. Resistensi.....	139
a. Hujatan.....	139
b. Persimpangan dengan NU .....	140
c. Pecahnya <i>TQN dan JATM</i> .....	140
d. Santri Boyong .....	142
2. Hasil Positif .....	142
a. Pendidikan dan Tarekat .....	142
b. Kader .....	147
c. Politik .....	148
d. Inspirasi NU.....	149
e. Umat Islam.....	150
f. Presiden Soeharto Baiat <i>TQN</i> .....	152
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	153
B. Saran .....	154

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1	Silsilah Nasab Kiai Musta'in Romli .....	31
Tabel 2.2	Silsilah Keluarga Kiai Musta'in Romli dari Bapak dan Ibu, Istri dan Anak.....	38
Table 2.3	Sanad keilmuan Kiai Musta'inRomli dari Kiai Romli Tamim.....	40
Tabel 3.1	Perolehan Suara Nasional Pemilihan Umum Tahun 1955 .....	76
Tabel 3.2	Perolehan Suara Nasional Pemilihan Umum Tahun 1971 .....	81
Tabel 3.3	Perolehan Suara Nasional Pemilihan Umum Tahun 1977 .....	84
Gambar 4.1	Prasasti Peresmian Gedung <i>Advance Lecturing</i> .....	143
Gambar 4.2	Prasasti Peresmian Gedung Pendopo Agung .....	143
Gambar 4.3	Masjid Al-Musta'in dan Prasasti Peresmiannya .....	144
Gambar 4.4	Prasasti Peresmian Gedung Fakultas Hukum & Fakultas Ekonomi ....	145
Gambar 4.5	Prasasti Gedung Laboratorium Rumah Kaca Fakultas Pertanian .....	145
Gambar 4.6	Pondok Pesantren Darul Ulum dan UNДАР Jombang.....	146
Gambar 4.7	Gedung JATMI - Pusat TQN UNДАР .....	147
Gambar 4.8	Aktivitas TQN Rejoso .....	147
Gambar4.9	Kiai Musta'in bersama Menpora Abdul Gafur .....	149

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Partisipasi dan pemikiran politik Kiai Musta'in Romli pada masa Orde Baru di Indonesia merupakan salah satu topik sejarah pemikiran Islam yang paling menarik untuk penelitian akademis. Tentu sangat menarik untuk mengkaji seorang kiai yang notabene ahli dalam bidang keislaman, tetapi juga memiliki minat intelektual dalam politik dan bahkan sebagai praktisi politik langsung. Uniknyanya lagi, apa yang dilakukan Kiai Musta'in Romli terjadi pada masa Orde Baru. Rezim di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang sangat jelas memarjinalkan Umat Islam dari ranah politik.

Kiai Musta'in Romli adalah seorang tokoh Islam terkemuka dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Musta'in Romli lahir pada 1931 M. Ia dibesarkan dalam lingkup keluarga pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Peterongan, Jombang. Pada tahun 1954 M, Musta'in Romli mulai mengenal dunia organisasi, belajar dan menempa pengalaman menjalankan struktural di dalamnya.<sup>1</sup> Pengalaman inilah yang pada tahun-tahun berikutnya mengantarkan namanya menjadi tokoh penting dalam dunia pendidikan, pesantren, dunia tasawuf, serta dalam dunia politik Indonesia.

Musta'in Romli mendapat gelar 'kiai' karena sebagaimana dalam konteks budaya Jawa, gelar kiai diberikan kepada seorang laki-laki tua yang memiliki budi pekerti yang arif, sehingga layak untuk dihormati. Sementara itu, dalam konteks Indonesia modern, gelar kiai diberikan kepada pendiri atau pewaris, pemilik, dan

---

<sup>1</sup> Naufan Fahmi et,al, *SKI-Kedarululuman* (Jombang: Njoso Press, 2021), 171.

sekaligus pemimpin pondok pesantren yang mewakafkan dirinya kepada Allah dengan mengajarkan agama Islam melalui kegiatan pendidikan pesantren. Model pemahaman pengertian kiai seperti ini adalah dalam rangka memunculkan gagasan reformasi dalam bidang pendidikan. Dalam pengertian bahwa pengelolaan pendidikan bukan hanya otoritas dan tanggung jawab pemerintah, melainkan adanya peran dari kiai yang juga turut andil mengelola pendidikan di pondok pesantren. Dengan demikian, tujuan pemahaman bahwa kiai harus memiliki pondok pesantren adalah untuk pembaharuan dan/atau pola interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam dimensi pendidikan.<sup>2</sup>

Kiai Musta'in Romli juga memiliki semua unsur dalam kriteria kiai. Ia memiliki dan memimpin pesantren, memiliki basis massa; santri dan jamaah, serta memiliki afiliasi dengan organisasi tertentu. Semua kriterianya sama dengan yang dikemukakan oleh Mukti Ali bahwa dalam kehidupan pesantren, kiai adalah orang yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap santrinya, sehingga tercipta hubungan yang erat antara kiai dengan santrinya. Itulah sebabnya para santri sangat menghormati dan mengabdikan dirinya kepada sosok kiai. Situasi ini berdampak pada pemahaman bahwa menentang kiai tidak hanya dianggap perilaku tidak sopan, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama. Kiai juga dipandang sebagai elit agama dalam struktur sosial, karena selain memiliki pesantren, mereka juga memiliki basis massa yang fanatik. Kiai memiliki kemampuan untuk mengajarkan ilmu agama Islam kepada massa—yang kemudian melahirkan otoritas kiai untuk memperbaiki atau meningkatkan akidah

---

<sup>2</sup> Edi Susanto, "Krisis Kepemimpinan Kiai - Studi atas Kharisma Kiai dalam Masyarakat", *ISLAMICA*, Vol. 1, No. 2 (Maret, 2007), 113.

dan moral massanya. Di sisi lain, Kiai dipandang sebagai elit agama terutama karena memiliki jaringan dengan organisasi keagamaan tertentu.<sup>3</sup>

Kiai Musta'in Romli juga seorang tokoh sufi—Tarekat Qadiriyyah wa Naqshabandiyah (TQN) di Rejoso Jombang. Ia pernah menjadi khalifah utama ketika ayahnya, Kiai Romli Tamim menjadi mursyid. Sepeninggal Kiai Romli Tamim, Kiai Musta'in Romli menjadi penerusnya dan semua khalifah ayahnya juga berjanji setia kepadanya. Jamaah TQN berkembang pesat di bawah kepemimpinan Kiai Musta'in Romli. Terutama pada tahun 1975, ketika Kiai Musta'in Romli menjabat sebagai ketua umum Jam'iyah Ahli Thoriqoh al-Mu'tabarah.<sup>4</sup>

Sebagian dari kehidupan Kiai Musta'in Romli berlangsung pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang menjabat cukup lama, yaitu 32 tahun dari 1966 hingga 1998. Secara teoritis negara di bawah Orde Baru adalah negara organik dengan sifat pluralis dalam keadaannya.<sup>5</sup> Dengan demikian, sebagai negara organik, Indonesia merupakan negara yang memiliki kemandirian yang cukup besar dan tidak menginginkan adanya tuntutan dan kepentingan rakyat. Negara memainkan peran aktif dalam pengambilan keputusan dengan cara yang sangat tidak demokratis. Konsep dasar demokrasi “dari, oleh, dan untuk rakyat” tidak berlaku dalam model negara semacam ini. Bahkan dalam

<sup>3</sup> Rudi Subiyakto, “Panggung Politik Kiai di Era Pemilukada”, *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45 No. II (Juli-Desember, 2011), 1571-1573.

<sup>4</sup> Aly Mashar, “Genealogi dan Penyebaran Thariqah Qadiriyyah Wa Naqshabandiyah Di Jawa”, *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XIII, No. 2 (Juli-Desember, 2016), 252-253.

<sup>5</sup> Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 52.

perkembangannya, orientasi negara akan berubah menjadi totaliter.<sup>6</sup> Tidak heran banyak pihak-pihak yang menyebut pemerintahan Presiden Suharto sebagai rezim otoriter.

Kepemimpinan Presiden Soeharto sangat kuat dan terkesan militeristik karena dukungan maksimal dari militer. Ciri utama model kepemimpinan ini adalah masyarakat sipil tidak memiliki suara dan peran. Cerminannya bisa dilihat dari cara Presiden Soeharto memstrukturisasi partai politik dengan menggabungkan beberapa partai politik menjadi dua partai saja pada tahun 1970-an, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bercorak Islamis dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang bercorak nasionalis dengan dua partai Kristen di dalamnya. Sekaligus menambah satu kekuatan, yaitu Golongan Karya (Golkar). Bahkan secara konvensional, kelompok tertentu yang terikat hubungan kerja dengan negara diharuskan mendukung/memilih Golkar yang memiliki afiliasi politik dengan pemerintah. Oleh karena itu, tidak mengherankan, Golkar selalu memimpin perolehan suara dalam empat pemilihan umum dan selalu berhasil mengangkat Soeharto sebagai Presiden Indonesia.<sup>7</sup>

Pada masa Orde Baru, intervensi negara/pemerintah terlalu kuat terhadap pergerakan rakyatnya, termasuk pergerakan dari organisasi masyarakat tertentu. Hal ini membuat pihak-pihak yang berani mengambil sikap bersebrangan dengan pemerintah menjadi diam dan terpukul. Seolah menjadi kesimpulan bahwa berbeda dengan jalan pikiran negara/pemerintah adalah berbahaya. Bahkan pada tahun 1980-an, pemerintah mulai menerapkan *mono-loyalty* yang mengharuskan

---

<sup>6</sup> Kamuaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: perspektif/ Modernis & Fundamentalis* (Magelang: Indonesia Tera, 2001), 35.

<sup>7</sup> Tashwirul Afkar, *Partai-partai Islam: Transformasi Gerakan Islam dan Ruang Demokrasi* (Jakarta: Edisi No. 4 1999), 5.

semua organisasi/komunitas, mulai dari golongan muda hingga golongan tua, harus menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas atau sebagai satu-satunya prinsip. Melalui peraturan baru tersebut, praktis setiap partai dan organisasi yang tidak berdasarkan Pancasila dianggap bertentangan dengan negara dan harus siap menerima konsekuensi untuk dibubarkan.<sup>8</sup>

Rezim Orde Baru juga sempat mengalami masa disharmoni dengan umat Islam. Suara kelompok-kelompok yang ingin menegakkan hukum Islam atau yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara hampir tidak terdengar. Tidak hanya itu, rezim Orde Baru tercatat dalam sejarah sebagai penguasa yang sangat kuat dalam mengerdilkan/menjinakkan Umat Islam dari ranah politik. Rezim Orde Baru mengkooptasi elite politik Umat Islam dari berbagai lini. Rezim Orde Baru seolah-olah menganggap bahwa kekuatan Islam memiliki potensi membahayakan negara, sehingga harus meminimalisir segala potensi yang bisa membuahkan perlawanan dan pembangkangan Umat Islam terhadap dominasi rezim.<sup>9</sup> Kondisi ini menyebabkan mayoritas Umat Islam Indonesia berlaku 'sinis' terhadap Presiden Soeharto dan rezimnya.<sup>10</sup>

Akan tetapi, hal seperti itu tidak berlaku bagi Kiai Musta'in Romli. Ia memiliki kondisi yang berbeda dengan kondisi Umat Islam umumnya pada masa Orde Baru. Bisa dibilang bahwa Kiai Musta'in Romli memiliki hubungan layaknya 'sahabat' dengan rezim yang berkuasa. Kondisi tersebut bermula pada

---

<sup>8</sup> Muh. Syamsuddin, "Dinamika Islam Pada Mada Orde Baru", *Jurnal Dakwah*, Vol XI No. 2 (Juli-Desember, 2020), 145.

<sup>9</sup> Bambang Purwoko, "Perilaku Politik Elit Agama dalam Dinamika Politik Lokal", dalam Focus Groups Discussion: Perilaku Elit Politik dan Elit Agama dalam Pilkada di Kabupaten Kulonprogo, diselenggarakan oleh LABDA Shalahuddin, JPPR, dan The Asia Foundation, Yogyakarta, 3 Agustus 2006. Dalam Subiyakto, "Panggung Politik Kiai ...", 1572.

<sup>10</sup> Afkar, *Partai-partai Islam: ...*, 146.

tahun 1973 M, ketika Kiai Musta'in Romli secara diam-diam bergabung dengan Golkar. Baru pada tahun 1975 M, ia secara resmi dan terbuka mengumumkan partisipasinya bergabung ke Golkar. Meski pun ia harus menerima risiko dicaci dan dihina oleh sebagian besar Umat Islam.<sup>11</sup>

Sebenarnya apa gagasan pemikiran Kiai Musta'in Romli masa itu? Ia seperti seorang Kiai yang tidak mempersoalkan posisi Umat Islam yang terpinggirkan dari gelanggang partisipasi politik Orde Baru. Seperti tidak memperlakukan sikap keras rezim terhadap entitas Islam. Bahkan, ia berbeda dengan arus utama para kiai politik dan kiai pesantren pada umumnya. Ia juga tampak tidak takut ditinggalkan massanya; santri dan jamaahnya. Sebenarnya apa yang mendasari pemikirannya untuk bertindak seperti demikian? Apakah Kiai Musta'in Romli memiliki referensi tertentu yang menjadi dasar pemikirannya? Sebagai seorang tokoh sufi, benarkah ada landasan tasawuf dalam pemikiran politiknya? Sebagai Nahdliyin, benarkah ada landasan ajaran sunni dalam pemikiran politiknya?

#### **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berangkat dari uraian panjang permasalahan yang tertuang dalam latar belakang tersebut. Peneliti memberikan catatan beberapa identifikasi masalah:

Pertama, Kiai Musta'in Romli adalah tokoh Islam terkemuka dari Jombang Jawa Timur yang hidup pada empat masa; penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, Presiden Soekarno, dan Presiden Soeharto. Pada masa Presiden

<sup>11</sup> Muhtadi, "Kiai Musta'in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan Generasi Muda Tarekat Qadiriyyah dan Naqsyabandiyah Universitas Darul 'Ulum (TQN UN DAR) Jombang" (Disertasi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 127.

Soehartolah titik puncak ketokohnya sebagai tokoh pendidikan, tarekat, dan politik.

Kedua, Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru yang berkuasa dari 1966 hingga 1998 pernah memiliki periode disharmoni dengan Umat Islam. Begitu pun sebaliknya, Umat Islam juga berlaku sangat 'sinis' terhadap rezim Orde Baru.

Ketiga, Kiai Musta'in Romli yang notabene bagian dari Umat Islam yang berakar di kalangan pesantren justru memiliki hubungan baik dengan rezim Orde Baru dan bahkan aktif berpolitik praktis dengan bergabung ke Golkar. Hal tersebut menjadikan Kiai Musta'in Romli sebagai tokoh Islam politik dengan beberapa pemikiran yang berbeda dengan arus utama Islam politik pada masa Orde Baru (1973-1985).

Dengan demikian, sudah sangat jelas sekali terjadi kesenjangan kondisi antara Kiai Musta'in Romli dengan arus utama Umat Islam pada masa Orde Baru. Serta kesenjangan perlakuan rezim Orde Baru terhadap Kiai Musta'in Romli dengan daripada umumnya Umat Islam pada masa itu.

Berangkat dari identifikasi masalah, peneliti kemudian memfokuskan penelitian ini pada pembahasan "Partisipasi dan Pemikiran Politik Kiai Musta'in Romli Pada Masa Orde Baru di Indonesia (1973-1985)". Peneliti akan mengkaji lebih dalam pembahasan tersebut dengan empat uraian diskusi, antara lain yaitu:

1. Figur Kiai Musta'in Romli pada 1931-1985.
2. Kepemimpinan Presiden Soeharto dan periodisasi politik Islam Orde Baru (1966-1998).
3. Partisipasi politik Kiai Musta'in Romli pada masa Orde Baru (1973-1985).
4. Pemikiran politik Kiai Musta'in Romli pada masa Orde Baru (1973-1985).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dengan beberapa uraian masalah yang tertuang di dalamnya, identifikasi masalah, dan batasan masalah. Oleh karena itu, peneliti merumuskan beberapa masalah dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana figur Kiai Musta'in Romli (1931-1985)?
2. Bagaimana politik Islam Orde Baru (1966-1998)?
3. Bagaimana partisipasi dan pemikiran politik Kiai Musta'in Romli pada masa Orde Baru (1973-1985)?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang tertuang di atas, peneliti memiliki beberapa tujuan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Mengetahui figur Kiai Musta'in Romli (1931-1985)!
2. Mengetahui politik Islam Orde Baru (1966-1998)!
3. Mengetahui partisipasi dan pemikiran politik Kiai Musta'in Romli pada masa Orde Baru (1973-1985)!

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis

Peneliti berharap hasil penelitian ini menjadi khasanah ilmu pengetahuan baru tentang Studi Islam dengan fokus kajian sejarah Islam, Sejarah Pemerintahan Islam, Sejarah Islam Indonesia, Pemikiran Islam dalam kajian Partai Politik Islam, Sejarah Nasional. Peneliti juga berharap dari hasil penelitian ini mampu melengkapi beberapa penelitian terdahulu yang

berkaitan dengan Kiai Musta'in Romli dan Pemerintahan Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto.

## 2. Praktis

Peneliti berharap kepada akademisi yang melanjutkan penelitian dengan topik dan tema yang sama dengan penelitian ini untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi. Khususnya bagi mahasiswa program magister Studi Islam yang mengambil kajian Pemikiran Islam dan Sejarah Islam, serta mahasiswa program magister Sejarah Peradaban Islam dan Politik Islam. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini menjadi bahan bacaan bagi intelektual muslim Indonesia, sehingga menggugah *ghirah* untuk melanjutkan perjuangan *The Founding Parents* dan para pahlawan lainnya dalam usaha membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menggugah *ghirah* untuk melanjutkan kepemimpinan Indonesia di masa yang akan datang.

## F. Kerangka Teori

Peneliti dalam menyusun historiografi memerlukan kerangka pemikiran yang mencakup teori dan konsep-konsep untuk menghasilkan analisis sejarah yang tepat. Hal ini sangat penting agar menjadi acuan dalam menjelaskan berbagai aspek yang muncul dalam penelitian ini, seperti pesantren dan tarekat dalam konteks sosial, politik, dan budaya, terutama yang terjadi pada masa Orde Baru.

Teori yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah teori partisipasi politik. Beragam sekali definisi partisipasi politik. Pada dasarnya pengertian partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan keinginan setiap individu dalam segala situasi dan kondisi organisasi, sehingga pada akhirnya mendorong

individu tersebut untuk ikut serta dalam mencapai tujuan organisasi dan ikut serta dalam setiap kegiatan dan tanggung jawab bersama.<sup>12</sup> Sedangkan menurut pendapat Miriam Budiardjo, politik adalah kegiatan dalam suatu sistem politik negara yang menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut dan pelaksanaan tujuan tersebut.<sup>13</sup> Memahami politik juga dapat dipahami dari uraian Asad bahwa politik adalah kegiatan menghimpun kekuasaan; meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan; mengawasi, mengendalikan dan menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan kekuasaan dalam negara dan lembaga lainnya.<sup>14</sup>

Adapun beberapa ahli yang memberikan penjelasan mengenai pengertian partisipasi politik, antara lain:

1. Miriam Budiardjo memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan individu atau kelompok orang untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, mulai dari aktif dalam pemilihan pemimpin negara sampai dengan aktif secara langsung atau tidak langsung dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah.<sup>15</sup>
2. Miriam Budiardjo juga mengutip pendapat Herbert McClosky yang menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela warga negara dengan cara apapun ikut serta dalam proses pemilihan penguasa, serta ikut

<sup>12</sup> Arif Rahman, *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional* (Surabaya: SIC, 2002), TH.

<sup>13</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022). Lihat juga dalam Mifdal Zusron Alfaqi, "Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 28, Nomor 2 (Agustus, 2015), 113.

<sup>14</sup> Abdullah Zawawi, "Politik dalam Pandangan Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol V, No 1 (Maret, 2015), 88.

<sup>15</sup> Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), 68.

(baik secara langsung maupun tidak langsung) dalam proses pembentukan kebijakan publik.<sup>16</sup>

3. Sastroatmodjo menjelaskan bahwa partisipasi politik pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara agar dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan keputusan kebijakan publik.<sup>17</sup>
4. Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson bersepakat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai individu dengan tujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, legal atau ilegal, damai atau kekerasan, efektif atau tidak efektif.<sup>18</sup>
5. Keith Faulks menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses pemerintahan yang memiliki dampak pada kehidupan mereka. Seperti keterlibatan dalam pengambilan keputusan atau keterlibatan dalam tindakan oposisi. Hal terpenting dari partisipasi adalah proses aktif.<sup>19</sup>

Dari semua pengertian partisipasi politik para ahli tersebut, peneliti mendapat sebuah pemahaman bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang dilakukan secara individu atau pun kolektif untuk ikut secara aktif dalam proses pemilihan pemimpin dan ikut serta mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemimpin.

---

<sup>16</sup> Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik* (Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 1998), 367.

<sup>17</sup> Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, 68.

<sup>18</sup> Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, 367.

<sup>19</sup> Keith Faulks, *Sosiologi Politik* (Bandung: Nusa Media., 2010), 226.

Dalam hal ini Kiai Musta'in Romli menjadi individu yang aktif berpolitik, kendati ia seorang ulama'. Kiai Musta'in Romli, sebagaimana pendapat Miriam Budiarto dan Herbert McClosky, secara sukarela ikut dalam kegiatan berpolitik agar bisa memberikan pengaruh secara langsung kepada pemerintah Orde Baru dalam penentuan kebijakan publik. Tampaknya Kiai Musta'in Romli juga menyadari bahwa kekuatan kelompok lebih besar daripada kekuatan individu dirinya sendiri. Oleh karena itu, Kiai Musta'in Romli mencari kelompok sebagai kendaraan politiknya. Barangkali tentu pilihannya tertuju kepada Golkar yang juga menjadi kendaraan politik Orde Baru yang sangat kuat kala itu. Sebab sebagaimana Keith Faulks menjelaskan bahwa partisipasi politik harus memiliki dampak pada kehidupan mereka selaku pelaku politik.

Ada juga beberapa ahli yang memberikan klasifikasi bentuk partisipasi politik, antara lain:

1. Almond memberikan klasifikasi bentuk partisipasi politik, yaitu partisipasi politik konvensional dan nonkonvensional. Bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional adalah bentuk-bentuk yang umum, seperti pemungutan suara, kegiatan kampanye, diskusi politik, bergabung dengan kelompok kepentingan, serta komunikasi individu dengan pejabat politik administratif. Sedangkan bentuk partisipasi nonkonvensional adalah bentuk yang tidak biasa, seperti pengajuan petisi, pemogokan, demonstrasi, konfrontasi, dan tindakan kekerasan politik lainnya.<sup>20</sup>

Adapun dalam hal klasifikasi partisipasi politik menurut Almond, Kiai Musta'in Romli tergolong pada partisipasi konvensional. Sejak masuk ke

---

<sup>20</sup> Mochtar Mas'oed, *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), TH.

Golkar, ia ikut serta secara aktif dalam kampanye, diskusi politik, dan lain sebagainya.

2. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, partisipasi politik terbagi menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.
  - a. Partisipasi aktif berupa pengusulan kebijakan publik, pengusulan alternatif kebijakan publik yang berbeda dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, menyampaikan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak, serta ikut memilih pemimpin negara.
  - b. Partisipasi pasif berupa kegiatan yang berupa sikap menaati, menerima, dan menjalankan begitu saja setiap keputusan pemerintah.<sup>21</sup> Tanpa adanya sikap kritisi dan penolakan.

Sementara klasifikasi menurut Ramlan Surbakti menempatkan Kiai Musta'in Romli sebagai partisipan aktif. Terlebih dengan masuknya Kiai Musta'in Romli dalam Golkar dan kemudian terpilih menjadi anggota DPR - MPR RI pada tahun 1983. Berarti Kiai Musta'in Romli telah secara aktif ikut serta dalam pembuatan kebijakan publik atau dalam pembuatan undang-undang tertentu.

3. Sementara itu, Milbrath juga memberikan klasifikasi berupa dua faktor utama yang mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dalam politik, yaitu adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam faktor pendukung tersebut terdapat lima unsur, yaitu perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), 142.

<sup>22</sup> Rafael Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 156.

a. Unsur Perangsang Politik

Sebuah unsur yang mendorong seseorang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Artinya, seseorang bersedia berpartisipasi dalam kehidupan politik karena menerima rangsangan politik. Rangsangan politik dipengaruhi oleh kegiatan diskusi politik, pengaruh media massa, dan diskusi formal dan informal.

b. Unsur Karakteristik Pribadi Seseorang

Unsur dimana karakter sosial seorang yang memiliki kepedulian sosial besar terhadap berbagai permasalahan. Orang-orang berwatak sosial memiliki kepedulian sosial yang tinggi terhadap pelbagai masalah; sosial, politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan, biasanya bersedia untuk terlibat dalam kegiatan politik.

c. Unsur Karakteristik Sosial

Merupakan unsur status sosial, ekonomi, ras, etnis, dan agama seseorang yang akan mempengaruhi sikap, persepsi, dan perilaku seseorang dalam beraktivitas. Karakteristik sosial juga mempengaruhi persepsi dan sikap perilaku seseorang terhadap bidang politik, yaitu bersedia atau tidaknya berpartisipasi dalam politik.

d. Unsur Situasi atau Lingkungan Politik

Merupakan unsur dimana keadaan lingkungan sosial yang baik dan kondusif, sehingga seorang mau dengan senang hati berpartisipasi dalam kegiatan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, masyarakat akan merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam kegiatan politik daripada dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik yang

seringkali dipenuhi dengan aktivitas brutal dan kekerasan yang tentu saja semakin menjauhkan masyarakat dari ranah politik.

e. Unsur Pendidikan Politik

Hal ini adalah upaya pemerintah dalam mengubah warga negaranya, agar mereka memiliki kesadaran politik, sehingga mau terlibat aktif dalam kegiatan politik.

Selain faktor pendukung, Milbrath juga menyebutkan tiga unsur yang bisa menjadi penghambat partisipasi politik. Unsur-unsur yang menghambat partisipasi politik adalah kebijakan organisasi induk yang selalu berubah, pemilih pemula yang otonom, dan kurangnya dukungan dari organisasi induk terhadap keberhasilan kegiatan politik.<sup>23</sup>

a. Unsur Kebijakan Induk Selalu Berubah

Organisasi yang dipandang sebagai elit politik dalam tubuh organisasi masyarakat atau pemilih selalu mengubah kebijakan partisipasi yang ada dengan kebijakan yang baru—disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

b. Unsur Pemilih Pemula Yang Otonom

Unsur ini akan membuat gerakan politik tidak mandiri dan selalu berada dalam hubungan dengan organisasi induknya, baik secara musyawarah maupun koordinasi.

c. Unsur Dukungan yang Kurang dari Induk Organisasi dalam Menyukseskan Kegiatan Politik.

---

<sup>23</sup> Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, 156.

Jika selama proses partisipasi politik kurang mendapat dukungan, maka hal tersebut akan menghambat aktivitas politik pemilih.

Peneliti juga mendukung teori partisipasi politik dengan menggunakan teori relasi kekuasaan dan pengetahuan dari Michael Foucault. Michael Foucault adalah seorang filsuf yang mempelopori strukturalisme. Ia mendedikasikan sebagian besar karir intelektualnya untuk menelaah bagaimana kekuasaan dipraktekkan, diterima, dan dilihat sebagai kebenaran. Michael Foucault berfikir bahwa kekuasaan adalah sebuah dimensi relasi (hubungan). Dimana ada relasi (hubungan), di situ ada kekuasaan. Foucault memiliki perspektif eksklusif dalam memahami kekuasaan.<sup>24</sup> Cara Foucault memahami kekuasaan begitu orisinal, sehingga ia memandang kekuasaan bukan milik penguasa. Namun, hal itu dipraktekkan dalam ruang tertentu dan dijalankan dengan menggunakan seperangkat regulasi (aturan) kompleks yang saling memengaruhi. Kekuasaan menempati posisi-posisi strategis yang berkaitan satu sama lain. Terkaitnya kekuasaan dengan cara prakteknya, maka beroperasinya hanya bisa dengan penguasaan pengetahuan.<sup>25</sup>

Apabila kaum Marxis menganggap kekuasaan sebagai subyektif—itu berarti satu orang/kelompok mendominasi yang lain atau pun bisa sebaliknya. Berbeda dengan Foucault yang memandang bahwa kekuasaan itu positif dan produktif; menghasilkan realitas, ruang lingkup objek, dan ritus kebenaran. Kekuasaan terjadi melalui normalisasi dan regulasi. Foucault mencontohkan

<sup>24</sup> Muji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 146-150.

<sup>25</sup> K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*, (Jakarta: Gramedia, 2001), 218-319. Lihat juga Michel Foucault, *Power/ Knowledge; Selected Interview and Other Writings 1972-1977* (New York: Pantheon Books, 1980), 133.

penjara sebagai sarana dalam memproduksi kekuasaan. Normalisasi dihasilkan dengan membuat sistem kontrol yang sistematis. Sedangkan kontrol dapat dilakukan melalui regulasi. Adanya regulasi membuat setiap orang mengontrol semua orang, sehingga secara otomatis setiap orang akan menanamkan kedisiplinan karena merasa diawasi.<sup>26</sup> Satu hal yang menarik dari teori ini, selain instrumen yang dimiliki penguasa, yaitu adanya rasa normalitas (biasa-biasa saja, wajar-wajar saja) dari setiap orang terhadap regulasi kekuasaan.

#### 1. Kuasa dan Pengetahuan

Foucault juga menjelaskan bahwa kekuasaan menghasilkan pengetahuan, sedangkan pengetahuan memiliki kekuasaan. Foucault menggambarkan kekuasaan bukan sebagai kekuasaan diktator dengan mengendalikan orang secara fisik. Kekuasaan era kontemporer ini sedang mengalami pola normalisasi, yaitu kekuasaan tidak terlihat, tersembunyi, dan terselubung. Kekuasaan dijalankan dengan membuat peraturan yang dilaksanakan dan dipatuhi secara sukarela oleh anggota organisasi tertentu atau masyarakat negara tertentu.<sup>27</sup>

#### 2. Pengetahuan

Bagi Foucault, pengetahuan adalah wacana yang berjalan dalam jaringan kekuasaan. Kekuasaan tidak terlihat, tetapi bekerja di dalam sistem organisasi itu sendiri. Menurut Foucault, sains tidak netral, sedangkan pengetahuan adalah politik.<sup>28</sup> Melalui pengetahuan, aturan diciptakan/dibangun agar dapat mengatur aktivitas dan kehidupan. Artinya,

<sup>26</sup> Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis* ..., 322-323.

<sup>27</sup> Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis* ..., 321-322.

<sup>28</sup> Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis* ..., 320-321.

pengetahuan berfungsi sebagai kontrol sosial. Pengetahuan ini dapat diwujudkan melalui cerita, konsep kepercayaan, dan sebagainya. Praktek disiplin dapat dilakukan dengan mengontrol pengetahuan/wacana. Dalam masyarakat modern praktek disiplin tidak harus melalui sarana fisik, tetapi melalui regulasi seperti peraturan, jadwal, prosedur, hukuman dan penghargaan. Sebab semakin individu merasa bebas, semakin mereka merasa mengendalikan wacana kekuasaan.<sup>29</sup>

### 3. Produksi Wacana

Berbagai wacana yang saling mendukung dapat menghasilkan sebuah realitas. Selanjutnya wacana tersebut menjadi pengetahuan umum yang hidup dalam masyarakat. Batas-batas bidang wacana menentukan pandangan kita tentang realitas tertentu. Pikiran kita menerima kenyataan yang terbentuk dari struktur wacana melalui serangkaian perspektif. Definisi objek yang diterjemahkan dibatasi oleh praktik wacana.<sup>30</sup> Misalnya, wacana periklanan memberikan sudut pandang tertentu terhadap suatu produk (objek). Pengiklan akan mengarahkan orang ke wacana tertentu yang terbatas. Sehingga pandangan masyarakat terhadap suatu produk melahirkan realitas yang ada dalam benaknya kemudian terstimulasi untuk mengkonsumsi produk tersebut.

### 4. Wacana Terpinggirkan

Foucault memandang konsep benar dan salah tidak terjadi dengan sendirinya. Konsep tersebut dibentuk dan diwacanakan dalam berbagai bidang yang saling terkait dan saling mendukung. Peran kekuasaan memperkuat salah satu wacana tersebut. Kemudian kekuasaan menggiring opini dengan wacana

<sup>29</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 70.

<sup>30</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media ...*, 73-74.

pendukung melalui berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu komunikasi, ilmu kesehatan, psikologi, dan berbagai ilmu lainnya. Wacana yang didukung oleh kekuasaan akan menjadi wacana dominan, sedangkan wacana lainnya akan terpinggirkan.<sup>31</sup>

## G. Penelitian Terdahulu

Belum ada cendekiawan yang benar-benar spesifik menaruh perhatiannya untuk mengkaji partisipasi dan pemikiran politik Kiai Musta'in Romli pada masa Orde Baru. Dari beberapa kajian yang membahas Kiai Musta'in Romli pada umumnya difokuskan pada masalah pendidikan, seperti yang ditulis Ali Sukamtono.<sup>32</sup> Pada umumnya juga difokuskan pada masalah dimensi sufistik dan TQN, seperti yang ditulis Mustain dan Wahyu Budiantor<sup>33</sup>, serta Muhtadi.<sup>34</sup>

Sebenarnya dari beberapa penelitian sudah ada upaya kajian tentang Kiai Musta'in Romli yang lebih komprehensif pada bahasan politik, namun hanya sedikit saja menyinggung nama dan perannya, serta tidak fokus pada partisipasi dan pemikiran politik, seperti yang ditulis Ahmad Hasan Affandi yang lebih fokus pada politik sebagai sebab pecahnya TQN Rejoso menjadi TQN Cukir,<sup>35</sup> Amir

<sup>31</sup> Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media ...*, 76-77.

<sup>32</sup> Ali Sukamtono "Pengaruh Status Sosial Kiai Terhadap Jumlah Santri di Pesantren Jombang" (Tesis—UNAIR, 1996) dan Ali Sukamtono, "Rekonstruksi Pemikiran Kiai Musta'in Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Darul Ulum Jombang" (Disertasi-Universitas Merdeka Malang, 2011). Serta Ali Sukamtono, *Kiai Musta'in Ramly, Tarekat Pesantren dan Sains, Otak London dan Hati Masjidil Haram, Rekonstruksi Pemikiran Sosial Pendidikan Agama Islam* (Surabaya: Jenggala Pustaka Utama, 2016).

<sup>33</sup> Musta'in dan Wahyu Budiantoro, "Dimensions of Sufistic Da'wah KH. Musta'in Ramly (1931-1985)", *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol 16 No 1 (2022), 37-54

<sup>34</sup> Muhtadi, "Kiai Musta'in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan Generasi Muda Tarekat Qadiriyyah dan Naqsyabandiyah Universitas Darul 'Ulum (TQN UN DAR) Jombang" (Disertasi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

<sup>35</sup> Ahmad Hasan Afandi, *Kontroversi Politik Kyai Tarekat: Studi Pergeseran Orientasi Politik Kyai Tarekat Qodiriyyah wa Naqsabandiyah* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

Maliki Abitolkha yang lebih fokus pada fenomena aliran<sup>36</sup> dan peran TQN dalam bidang sosial-politik.<sup>37</sup> Terdapat pula cendekiawan yang topik kajiannya juga sudah mengarah pada masalah politik, seperti yang ditulis Ahmad Hasan Afandi dan Jenny Yudha Utama<sup>38</sup>, namun fokus kajiannya lebih pada perbedaan kondisi Pondok Pesantren Darul Ulum sebelum dan sesudah Kiai Musta'in Romli berpolitik praktis.

Ada pula beberapa cendekiawan yang sudah lebih fokus membahas masalah politik dan banyak menyinggung Kiai Musta'in Romli, namun objek kajiannya masih terlalu umum dan tidak spesifik hanya pada Kiai Musta'in Romli, seperti Endang Turmudi<sup>39</sup> dan Sukamto<sup>40</sup> yang memaparkan isu politik kontroversial yang melibatkan banyak kiai di Jombang, akibat dari bergabungnya Kiai Musta'in Romli ke Golkar sebelum pemilihan umum 1977.

Praktis hanya ada satu cendekiawan yang judul penelitiannya sudah secara spesifik dan fokus mengkaji Kiai Mutsa'in Romli dalam topik politik, seperti yang ditulis M. Ubaidillah Humaini.<sup>41</sup> Namun sayang, isi penelitian ini lebih banyak memaparkan pengertian tasawuf dan politik, biografi Kiai Musta'in Romli, dan

<sup>36</sup> Amir Maliki Abitolkha, "A Cult In Tariqa Leadership (A Case Study at the Qadiriyyah wa Naqshbandiyyah Tariqa in Jombang - Indonesia)", *Journal of Positive School Phycology*, Vol 6 No 4 (2022).

<sup>37</sup> Amir Maliki Abitolkha, et.al, "Revitalizing National Political Values Through The Socio-Political Movements Of The Tarekat: Studied at the Political Social Role of Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah in Nusantara", *Al Tahrir*, Vol. 20 No. 2 (November, 2020).

<sup>38</sup> Ahmad Hasan Afandi dan Jenny Yudha Utama, "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Dukungan Politik Kyai Musta'in Romly terhadap Pengembangan Pesantren", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Majapahit Policy*, Vol 1 No 1 (2020).

<sup>39</sup> Endang Turmudi, "The Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah in East Java and Islamic Politics in Indonesia", *Shoutheast Asian Journalof Social Science*, Vol 6 No 2 (1998) dan Endang Turmudi, *Struggling for the Umma Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*, (Canberra, ANU E Press - The Australian National University, 1996).

<sup>40</sup> Sukamto, *Pergulatan Politik Lokal Elite Tarekat* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2012) dan Sukamto, "Kilas Balik Khitah NU dalam Konteks Politik Lokal di Jombang", *Al-Daulah*, Vol 2 No 1 (April, 2002)", 30-31.

<sup>41</sup> M Ubaidillah Humaini, "Politik Sufisme – Studi Kasus Afiliasi KH. Musta'in Romly dalam Partai Golkar", *Jurnal Putih*, Vol 7 No 2 (September 2022).

hanya sedikit menyentuh masalah politik. Tidak sedikit pun menyentuh partisipasi dan pemikiran politik Kiai Musta'in Romli.

## H. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu seperangkat aturan dan prinsip sistematis dalam mengumpulkan berbagai sumber sejarah secara efektif, kemudian memberi penilaian secara kritis, serta memberikan sintesis dari hasil yang telah dicapai dalam sebuah bentuk tulisan.<sup>42</sup> Kegiatan dalam metode penelitian sejarah adalah sebagai berikut:

### 1. Heuristik

Kegiatan mencari dan mengumpulkan bahan atau sumber penelitian, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan atau bentuk lain, yang berasal dari satu masa<sup>43</sup> dengan batasan waktu yang sedang diteliti. Peneliti telah melakukan kegiatan heuristik dengan mengumpulkan berbagai bahan tertulis, baik sumber primer atau pun sumber sekunder. Peneliti juga mengumpulkan foto-foto yang berkaitan dengan Kiai Musta'in Romli. Peneliti juga melakukan wawancara mendalam kepada orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dan hidup semasa dengan Kiai Musta'in Romli.

#### a. Sumber Primer

- 1) Arsip Foto Kiai Musta'in Romli sedang bersama Presiden Soeharto. Arsip Foto Kiai Musta'in Romli sedang bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Abdul Ghofur. Beberapa prasasti peresmian gedung-gedung UNDAR dan TQN oleh Presiden Soeharto dan menteri-menterinya.

<sup>42</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 44.

<sup>43</sup> Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 44.

Dua arsip catatan harian dari tulisan Kiai Musta'in Romli tahun 1954 dan 1955.

- 2) Kitab *Rislatu al-Khawasiyah*.
- 3) Kata Sambutan Kiai Musta'in Romli dalam buku 'Sejarah Surat Wasiat "Ijazah Baiat" (Janji Thariqat" Dari KH. Romli Tamim kepada Musta'in Romli'.
- 4) Wawancara
  - a) Dari Unsur Keluarga: Kiai Cholil Dahlan, Gus Lukman Hakim, Ning Ma'nuratus Sa'diyah dan Gus Binhad Nurrohmat, Ning Soraya Dimiyati.
  - b) Dari Unsur Murid: Dr. Muhtadi, S. Ag. M. HI, Kiai Muhammad Tuhanik, Bapak Nur Rifa'i.
- 5) TAP MPR RI Nomor VIII/MPR/1973 Tahun 1973.
- 6) TAP MPR RI Nomor VII/MPR/1978 Tahun 1978.

b. Sumber Sekunder

- 1) Disertasi "Kiai Musta'in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan Generasi Muda Tarekat Qadiriyyah dan Naqsyabandiyah Universitas Darul 'Ulum (TQN UNDAR) Jombang".
- 2) *Revitalizing National Political Values Through The Socio-Political Movements Of The Tarekat: Studied At The Political Social Role of Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah In Nusantara.*
- 3) *Struggling for the Umma Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java,*
- 4) Dan lain sebagainya.

## 2. Kritik

Kegiatan mencari otentisitas sumber dengan menghilangkan bagian-bagian dari sumber bahan yang tidak autentik. Cara kerjanya adalah dengan melakukan kritik eksternal dan internal.<sup>44</sup> Peneliti berhasil mendapatkan arsip berupa foto-foto Kiai Musta'in Romli dengan gaya gambar era tahun 1980an. Setelah mencermati dan menelaah foto-foto Kiai Musta'in Romli, peneliti meyakini bahwa memang benar orang yang di dalam gambar ialah Kiai Musta'in Romli. Penulis melakukan pencocokan wajah dengan menggunakan foto-foto Kiai Musta'in Romli yang sudah umum beredar, seperti di buku-buku terbitan internal Pondok Pesantren Darul Ulum, di kalender Pondok Pesantren Darul Ulum, dan juga yang beredar di internet. Terlebih peneliti memperoleh foto-foto Kiai Musta'in Romli dari keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum yang disimpan sebagai arsip keluarga.

Peneliti juga menggunakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) sebagai salah satu sumber penelitian ini, yaitu TAP MPR RI Nomor VIII/MPR/1973 Tahun 1973 dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR/1978 Tahun 1978. Peneliti memperoleh dokumen dari internet dengan nama website hukumonline.com. Dokumen ini sudah berupa tulisan modern dan sudah menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan. Setelah memperhatikan dan mencermati isi dari dua dokumen tersebut, peneliti meyakini bahwa isi dalam dokumen tersebut masih sama dengan produk aslinya. Sebab isi produk TAP MPR RI Nomor VIII/MPR/1973 memang berisi tentang persiapan pemilihan umum lima tahun ke depannya dan

---

<sup>44</sup> Lilik Zulaichah, *Metodologi Sejarah 1* (Surabaya: Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel, 2004), 16.

penetapan peserta pemilihan umum, yaitu dua dari golongan politik dan satu dari Golkar. Sedangkan isi produk TAP MPR RI Nomor VII/MPR/1978 Tahun 1978 berisi persiapan pemilihan umum 1982 dan penetapan peserta pemilihan umum, yaitu dari tiga organisasi kekuatan sosial politik, yaitu PPP, PDI, dan Golkar.

### 3. Interpretasi

Kegiatan menafsirkan fakta sejarah berdasarkan temuan dari proses kritik sumber, sehingga akan terkumpul fakta-fakta serumpun. Kegiatan interpretasi terbagi menjadi dua, yaitu menguraikan (analisis) dan menyatukan (sintesis).<sup>45</sup> Hasil tafsiran dari temuan arsip foto-foto Kiai Musta'in Romli bahwa foto tersebut merupakan foto antara tahun 1970an sampai 1980an. Dasar utamanya adalah dalam foto tersebut terdapat pula gambar dr. Abdul Gafur Tengku Idris—yang pernah menjabat sebagai Menteri Muda Urusan Pemuda periode 1978-1983, serta sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga periode 1988-1997. Dari foto tersebut memberi sebuah informasi bahwa sejak 1970an, Kiai Musta'in Romli sudah memiliki koneksi politik berskala nasional. Kalimat lainnya adalah bahwa sejak 1970an, Kiai Musta'in Romli sudah menjadi tokoh politik sekaliber nasional.

Hasil tafsiran dari temuan TAP MPR RI Nomor VIII/MPR/1973 Tahun 1973 dan TAP MPR RI Nomor VII/MPR/1978 Tahun 1978 bahwasanya sejak dari 1973 sudah diberlakukan pengkodisian peserta pemilihan umum pada 1978, yaitu dua partai dan satu Golkar. Sedangkan sejak dari 1978 juga masih diberlakukan pengkodisian peserta pemilihan

<sup>45</sup> Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, 59.

umum pada 1982 dengan peserta yang sama dengan pemilihan umum sebelumnya.

#### 4. Historiografi

Kegiatan penyajian hasil penelitian dengan cara merekonstruksi fakta sejarah, baik dari sumber primer maupun dari sumber sekunder yang telah mendapat tambahan interpretasi dari sejarawan. Selain itu, peneliti juga merekonstruksi hasil penelitian ini dengan menerapkan metode diakronis, yaitu mendeskripsikan dan menjelaskan fakta sejarah (historis) berdasarkan urutan waktu dan peristiwa.<sup>46</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Peneliti membagi penyajian penelitian ini menjadi 5 bab. Tiap bab memiliki beberapa sub bab. Sistematika seperti demikian agar memberikan pembahasan yang sistematis dan agar memberikan uraian isi yang jelas dalam pembahasan. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi sekilas tentang Kiai Musta'in Romli pada 1931-1985. Sub bab pertama menjabarkan silsilah keluarga Kiai Musta'in Romli. Sub bab kedua menjabarkan tentang riwayat pendidikan Kiai Musta'in Romli. Sub bab ketiga menjelaskan tentang sejarah kepemimpinan dan organisasi Kiai Musta'in

<sup>46</sup> Nugrogo Notosusanto, *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer* (Jakarta, Yayasan Idayu:1978), 64.

Romli. Sub bab keempat sedikit menjelaskan tentang karya tulis Kiai Musta'in Romli. Sub bab kelima berisi sajian analisa tentang karakter Kiai Musta'in Romli.

Bab ketiga berisi pembahasan mengenai politik Islam Orde Baru (1966-1998). Sub bab pertama menjabarkan tentang hubungan Islam dan lahirnya rezim Orde Baru. Sub bab kedua menjabarkan tentang perodesasi politik Islam Orde Baru (1966-1998). Sub bab ketiga menjelaskan tentang kondisi dan sikap Umat Islam terhadap politik Islam Orde Baru (1966-1998).

Bab keempat berisi pembahasan mengenai partisipasi dan pemikiran politik Kiai Musta'in Romli pada masa Orde Baru (1973-1985). Sub bab pertama menerangkan tentang partisipasi politik Kiai Musta'in Romli pada masa Orde Baru (1973-1985). Sub bab kedua menerangkan pemikiran politik Kiai Musta'in Romli pada masa Orde Baru (1973-1985). Sub bab ketiga berisi sajian analisa mengenai landasan dari partisipasi dan pemikiran politik Kiai Musta'in Romli pada masa Orde Baru (1973-1985). Sub bab keempat berisi temuan dan analisa dari hasil partisipasi dan pemikiran politik Kiai Musta'in Romli.

Bab kelima adalah penutup sebagai bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran.

## **J. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penelitian**

### **1. Faktor Pendukung**

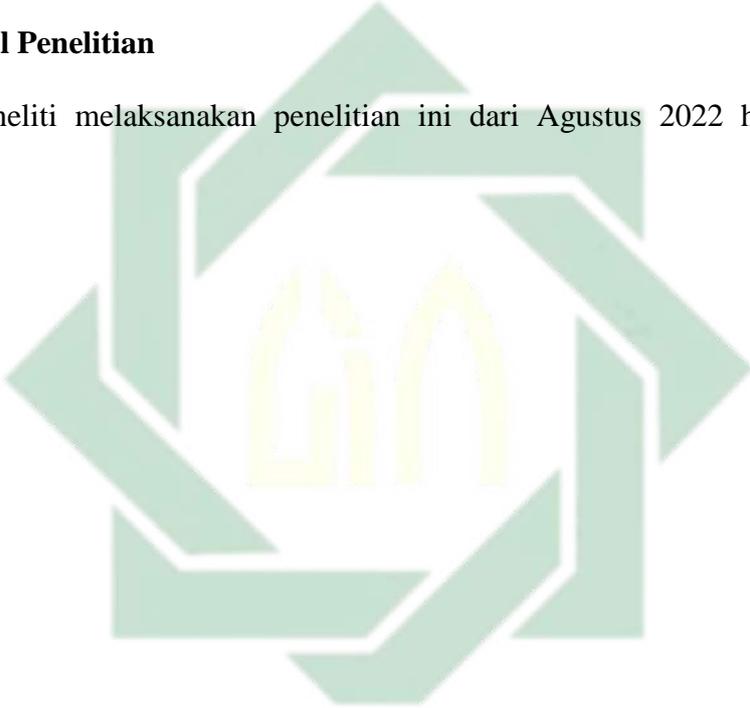
- a. Internet sebagai media untuk mencari referensi jurnal penelitian.
- b. Kaprodi dan sekprodi yang telah memberi dukungan.
- c. Pembimbing yang *extra* perhatian.

## 2. Faktor Penghambat

- a. Pencarian arsip asli sebagai sumber primer Orde Baru.
- b. Pencarian arsip terkait pemikiran Kiai Musta'in Romli.
- c. Pengaturan antara waktu untuk pengerjaan tesis dan waktu untuk bekerja.

## **K. Jadwal Penelitian**

Peneliti melaksanakan penelitian ini dari Agustus 2022 hingga Desember 2022.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

BAB II  
SEKILAS TENTANG KIAI MUSTA'IN ROMLI  
(1931-1985)

**A. Silsilah Keluarga Kiai Musta'in Romli**

Pengungkapan biografi merupakan bagian penting dalam melihat partisipasi dan pemikiran politik Kiai Musta'in Romli. Dari biografi tersebut akan diketahui siapa orang/tokoh dan faktor apa saja yang mempengaruhi 'ketokohan' Kiai Musta'in Romli. Semua itu merupakan landasan dan modal berharga bagi Kiai Musta'in Romli untuk mengabdikan diri kepada Islam. Terutama untuk mengabdikan diri kepada Indonesia melalui jalur politik. Kiai Musta'in Romli adalah seorang tokoh Islam Indonesia yang namanya sangat terkenal. Musta'in Romli lahir pada Agustus 1931 M di Desa Rejoso, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ia dibesarkan dalam keluarga Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso—salah satu pondok pesantren terbesar di Indonesia. Pondok Pesantren Darul Ulum terletak di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Kiai Musta'in Romli wafat pada 1985 M tepat usia 54 tahun.<sup>1</sup>

1. Garis Nasab Dzurriyah

Musta'in adalah nama aslinya. Sedangkan Romli adalah penisbatan dari nama ayahnya, yaitu Kiai Romli Tamim. Kiai Romli Tamim adalah putra dari Kiai Tamim Irsyad. Apabila ditarik dalam satu rangkaian nasab, maka menjadi Musta'in Romli *bin* Romli Tamim *bin* Tamim Irsyad. Ada hal menarik ketika mempelajari nasab Kiai Musta'in Romli. Menurut catatan

---

<sup>1</sup> Naufan Fahmi et,al, *SKI-Kedarululuman* (Jombang:Njoso Press, 2021), 171.

Ishomuddin Ma'shum bahwa Kiai Musta'in Romli adalah seorang *dzurriyah* atau keturunan Nabi Muhammad mengikuti nasab dari Syarif Hidayatullah. Mustain *bin* Muhammad Romli *bin* Muhamamd Tamim *bin* Irsyad *bin* Ahmad *bin* Nyai Rahimah *binti* Abd al-Manan<sup>2</sup> *bin* Nyai Azimah *binti* Nyai Dewi Shufiyah *binti* Nyai Dewi Haisah.

Nyai Dewi Haisah adalah putri Sunan Malaka yang menikah dengan Sayyid Abd al-Qadir Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati, Cirebon). Sedangkan Syarif Hidayatullah adalah putra Sayyid Abdullah *bin* Sayyid Nurul Alam *bin* Sayyid Jamaluddin *bin* Sayyid Ahmad Tajuddin *bin* Sayyid Abdullah *bin* Sayyid Abdul Malik Khan *bin* Sayyid Alwi *bin* Sayyid Muhammad Shohibul Mirbath *bin* Sayyid Ali Khola' Qasam *bin* Sayyid Alwi *bin* Sayyid Muhammad *bin* Sayyid Alwi *bin* Sayyid Ubaidillah *bin* Sayyid Muhajir Ilallah *bin* Sayyid Isa al-Rumi al-Bashry *bin* Sayyid Muhammad al-Naqib *bin* Sayyid Ali al-Uraidly *bin* Sayyid Ja'far Shoddiq *bin* Sayyid Muhammad al-Baqir *bin* Sayyid Ali Zainal Abidin *bin* Sayyid Husain *bin* Fatimah al-Zahra *binti* Sayyidina Muhammad Nabiullah.<sup>3</sup>

## 2. Lingkaran Keluarga Pesantren di Jombang

Kiai Musta'in juga memiliki hubungan keluarga dengan tiga pesantren besar lainnya di Jombang, yaitu Pondok Pesantren Tambak Beras, Pondok Pesantren Denanyar, dan Pondok Tebuireng. Garis ini membentuk lingkaran keluarga pesantren dengan Pondok Pesantren Darul Ulum (Rejoso) dari garis Sayyid Abd al-Rahman.

<sup>2</sup> Terkenal dengan nama Bujuk Kesambih dari Batu Ampar, Madura.

<sup>3</sup> Ishomuddin Makshum, *Mengenal Al-Mursyid Syekh Muhammad Romly Tamim – Shahib al-Awrad al-Istighatsah bi Hadrat Rabb al-Bariyyah* (Pasuruan: Pustaka, 2015), 21-23.

Setelah Nyai Dewi Shufiyah wafat. Sayyid Abd al-Rahman menikah lagi dengan adik Nyai Shufiyah, yaitu Nyai Siti Khodijah. Dari pernikahan yang kedua ini mereka mempunyai putra bernama Sayyid Ahmad, ia memiliki putra Sayyid Abdul Jabbar, dan ia memiliki putra Kiai Sihhah, ia memiliki dua putri, yaitu Nyai Layyinah dan Nyai Fatimah. Nyai Layyinah memiliki putri Nyai Winih, ia melahirkan Kiai Hasyim Asy'ari (Pondok Pesantren Tebuireng). Sedangkan Nyai Fatimah melahirkan Kiai Hasbullah, ia memiliki putra Kiai Abd al-Wahab Hasbullah (Pondok Pesantren Tambakberas), Kiai Hasbullah juga memiliki putri bernama Nyai Khodijah yang dinikahi oleh Kiai Bisri Syamsuri (Pondok Pesantren Denanyar).<sup>4</sup>

Kiai Musta'in Romli sendiri juga memiliki hubungan keluarga Pondok Pesantren Tambak Beras dari jalur pernikahannya. Sebab Kiai Musta'in Romli menikah dan memiliki anak dengan Hj. Jumi'atin. Hj. Jumi'atin adalah putri Kiai Wahab Hasbullah. Berarti Kiai Musta'in Romli adalah menantu dari Kiai Wahab Hasbullah.<sup>5</sup>

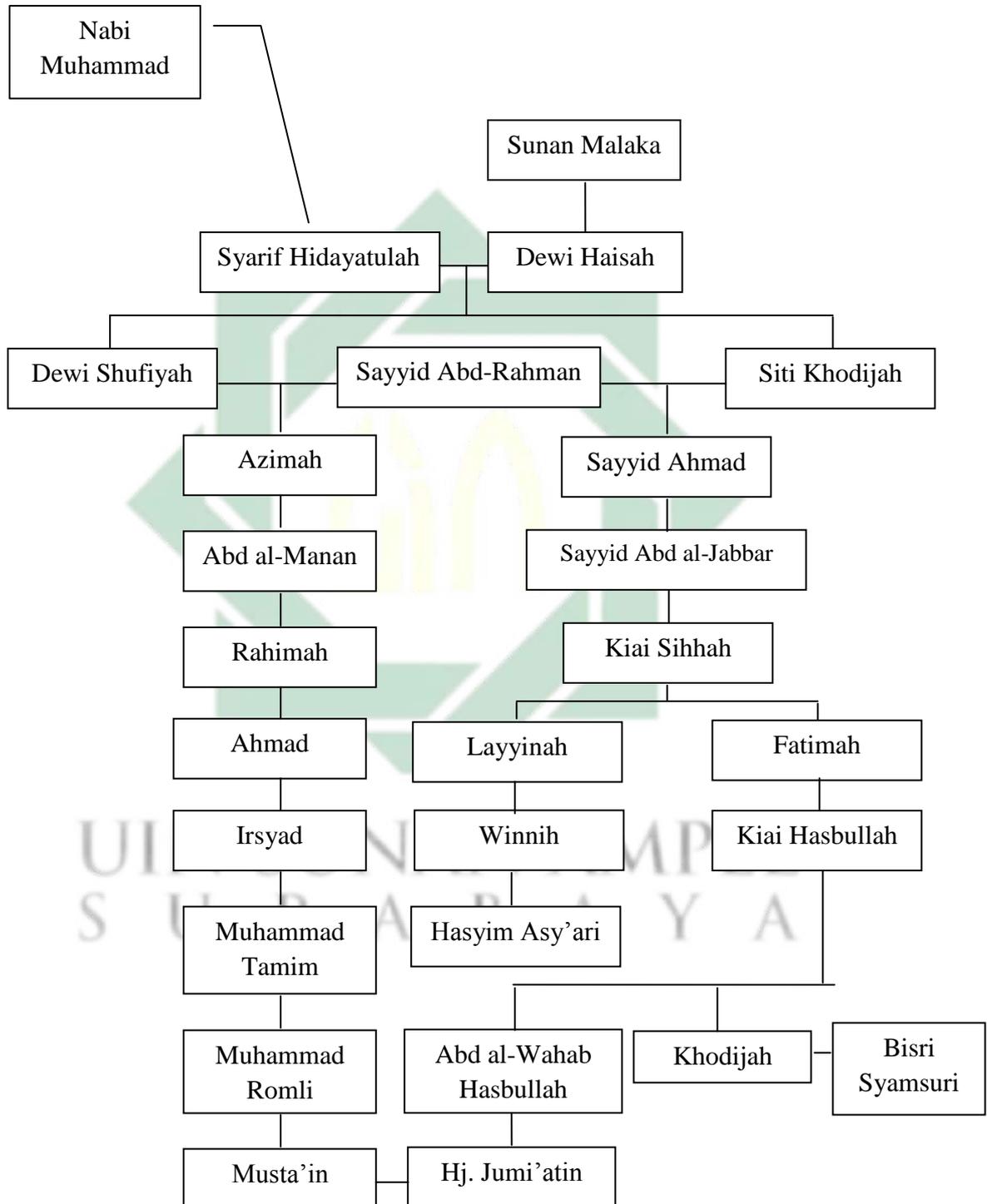
UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>4</sup> Makshum, *Mengenal Al-Mursyid Syekh Muhammad Romly Tamim ...*, 22.

<sup>5</sup> Muhtadi, "Kiai Musta'in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan ...", 96-98.

Tabel 2.1  
Silsilah Nasab Kiai Musta'in Romli



Keterangan: 1) Tabel hanya menggambarkan nasab ke atas sampai kepada Syarif Hidayatullah. Sebab Syarif Hidayatullah sudah mewakili penjelasan bahwa nasab Kiai Musta'in Romli sambung sampai Nabi Muhammad. 2) Dari Syarif Hidayatullah juga sudah menjelaskan adanya hubungan antara empat pondok pesantren di Jombang.

### 3. Keluarga Kiai Mustain Romli

Kiai Romli Tamim menikah tiga kali. Pertama dengan Nyai Azzah<sup>6</sup> pada 1923 M, kedua dengan Nyai Maisarah pada 1927an M, dan ketiga dengan Nyai Khadijah pada 1940an M. Sedangkan Musta'in Romli lahir dari rahim dan tumbuh dari buaian ibunya yang bernama Nyai Siti Maisarah. Kiai Musta'in Romli merupakan anak kedua, ia memiliki kakak bernama Ishomuddin. Pada 1940an, sepeninggal Nyai Siti Maisarah, Kiai Romli Tamim menikah untuk yang ketiga kalinya dengan Nyai Khadijah. Sehingga Kiai Musta'in Romli juga memiliki adik dari ibu sambungnya, yaitu Ahmad Rifa'i, Ahmad Sonhaji, Muhammad Damanhuri, Ahmad Dimyathi, Ahmad Tamim. Keempat saudaranya ini juga menyematkan nama ayah mereka di belakang namanya masing-masing.

Kiai Musta'in Romli pertama kali menikah dengan Nyai Hafsah—putri dari Kiai Ma'shum Kholil pada 1956.<sup>7</sup> Kiai Musta'in Romli dengan Kiai Ma'shum Kholil adalah sepupu. Pernikahan Kiai Musta'in Romli dengan Nyai Hafsah tidak berjalan langgeng dan berujung pada perpisahan. Kiai Musta'in Romli memiliki dua putra dari pernikahan pertamanya, yaitu Ahmad (meninggal) dan Lukman Hakim. Selang sekitar tiga tahun kemudian, Kiai Musta'in Romli menikah lagi dengan Nyai Hj. Dzurriyatul Lum'ah—putri dari pasangan KH. Muhammad Kholil dengan Hj. Ambariana dari Yogyakarta. Kiai Musta'in Romli memiliki satu putri dari pernikahannya yang kedua, yaitu

<sup>6</sup> Beberapa sumber menyebut dengan nama Izzah.

<sup>7</sup> Tahun ini diambil dua tahun sebelum kelahiran Lukman Hakim yang lahir pada 17 Maret 1958. H. Lukman Hakim, S. H., M. Hum (Putra Kiai Musta'in Romli/ Pembina Yayasan UN DAR), *Wawancara*, UN DAR: Jombang, 4 Desember 2022.

Choirun Nisa'. Sayang, ketika Choirun Nisa' berumur tiga bulan, Nyai Hj. Dzurriyatul Lum'ah meninggal dunia.

Selang beberapa saat, Kiai Musta'in Romli menikah lagi dengan Hj. Jumi'atin—putri dari Kiai Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama' (NU), Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul 'Ulum, Tambakberas, Jombang. Kiai Musta'in Romli memiliki dua putra dan dua putri dari pernikahannya yang ketiga, yaitu Rahmat (meninggal muda), Muhammad Mudjib, Ahmada Faida, dan Ma'nuratus Sa'diyah. Kiai Musta'in Romli juga menikah dengan Hj. Lathifa dari Jember. Kiai Musta'in Romli memiliki dua putri dari pernikahannya yang keempat, yaitu Siti Sarah dan Dewi Sanawi.<sup>8</sup>

a. Kakek Kiai Musta'in Romli

Kiai Tamim Irsyad lahir dan besar di Desa Pareng, Bangkalan, Madura. Kakek dari Musta'in Romli ini adalah santri Kiai Kholil Bangkalan. Kiai Tamim Irsyad menikah dengan Nyai Nur Kholilah—putri dari seorang kiai di Bangkalan. Pasangan ini dikaruniai empat orang anak, yaitu Muhammad Fadlil, Siti Fatimah, Muhamamd Romli, dan Muhammad Zainal (Umar Tamim). Setelah berkeluarga dan memiliki anak, Kiai Tamim Irsyad membawa serta keluarga kecilnya hijrah ke Jombang—tepat di Desa Pajaran, Kecamatan Peterongan. Pilihan hijrah datang dari kata hatinya, demi mencari ketenangan hidup dan mengamalkan ilmunya.

---

<sup>8</sup> Ma'nuratus Sa'diyah (putri Kiai Musta'in) dan Binhad Nurrahmat (menantu), *Wawancara*, Al Hambra: Jombang, 20 Desember 2022. Lihat juga Muhtadi, "Kiai Musta'in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan ...", 96-98.

Di sebelah Desa Pajaran inilah terdapat Desa Rejoso. Sebuah desa yang terkenal sebagai tempat tinggal orang hitam (gelap dalam budi pekerti dan agamanya). Kemudian Kiai Tamim Irsyad membidik desa tersebut sebagai titik awal perjuangannya dalam mengamalkan ilmu. Ia perlahan menata akhlak dan akidah masyarakatnya. Desa Rejoso inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Darul Ulum (1985). Pada 1930, Kiai Tamim Irsyad meninggal dunia dan dimakamkan juga di Desa Rejoso.<sup>9</sup>

Hal menarik ketika menelaah mengapa kakek dari Kiai Musta'in Romli ini memilih Jombang sebagai tempat tujuan. Dilihat dari santri Kiai Kholil Bangkalan yang lain, seperti Kiai Hasyim Asy'ari juga memilih kembali ke Jombang sebagai tempat mengamalkan ilmunya. Begitu juga dengan Imam Zahid—kakek buyut Emha Ainun Najib, setelah *nyantri* di Kiai Kholil Bangkalan, ia memilih pulang ke Jombang sebagai tempat perjuangan.<sup>10</sup>

b. Bapak Kiai Musta'in Romli

Ishomuddin Ma'shum menyebut dalam 'Sejarah dan Keutamaan Istighatsah dan dalam 'Mengenal Al-Mursyid Syaikh Muhammad Romly Tamim' bahwa Kiai Romli Tamim lahir di Bangkalan, Madura, pada tahun 1888an M. Pada masa kecilnya, Romli Tamim ikut beserta kedua orang tuanya hijrah dari Madura ke Jombang.<sup>11</sup> Sementara Tim Khusus Penggalan Sejarah dan Nilai Darul Ulum yang menghasilkan buku

<sup>9</sup> Makshum, *Mengenal Al-Mursyid Syekh Muhammad Romliy Tamim ...* 15.

<sup>10</sup> Nasrul Ilah (Budayawan Jombang), *Wawancara*, Rumah: Jombang, 9 Oktober 2022.

<sup>11</sup> Ishomuddin Ma'shum, *Sejarah dan Keutamaan Istighatsah* (Surabaya: LTN Pustaka, 2018), 17-21.

‘Pondok Pesantren Darul Ulum’ menyebut bahwa Kiai Romli Tamim lahir pada 1888 sesudah bapaknya mendiami Rejoso.<sup>12</sup> Apabila merujuk pada 1888 sebagai tahun lahirnya, maka agaknya pendapat kedua yang menyebut bahwa Kiai Romli Tamim lahir di Rejoso lebih benar, karena Pondok Pesantren Darul Ulum berdiri pada tahun 1985.

Bapak dari Kiai Musta’in Romli ini adalah kiai yang sangat alim, sangat sabar, sangat arif, wara’, faqih. Kiai Romli Tamim juga seorang sufi. Ia adalah Mursyid TQN—meneruskan kakak iparnya, Kiai Kholil Juraimi. Kiai Romli Tamim sangat sayang dengan santri dan jamaahnya. Saking sayangnya, Kiai Romli Tamim mencurahkan seluruh kekuatannya untuk menyusun Istighatsah sebagai pegangan bagi santri-santrinya.<sup>13</sup> Istighatsah adalah rangkaian kalimat *thoyyibah* dalam rangka memohon kepada Allah agar mendapat karunia manfaat dan agar terhindar dari bahaya dengan menyebut (perantara) seorang nabi atau wali karena memuliakan keduanya.<sup>14</sup> Istighatsah merupakan sebuah wirid yang sering diamalkan oleh warga Nahdliyin.

Bapak dari Kiai Musta’in Romli ini juga pernah menjadi menantu Hadratu al-Syekh Hasyim Asy’ari. Kiai Hasyim Asy’ari menikahkan Romli Tamim dengan putrinya, Nyai Azzah. Pernikahan ini berujung pada perpisahan. Sampai pada penelitian ini ditulis, belum ditemukan sumber

<sup>12</sup> Tim Khusus Penggalan Sejarah dan Nilai Darul Ulum, *Pondok Pesantren Darul Ulum* (Jombang, Majelis PPDU, 2013), 25-26.

<sup>13</sup> Ma’shum, *Sejarah dan Keutamaan Istighatsah*, 24-25.

<sup>14</sup> Tim Kepondokan dan Madrasah Tafaqquh Fiddin, *Buku Panduan Bimbingan Ibadah Pondok Pesantren Darul Ulum* (Jombang: PPDU, 2022), 57.

bahwa pasangan ini melahirkan keturunan.<sup>15</sup> Kiai Romli Tamim meninggal pada hari ke 16 Ramadhan atau bertepatan pada 16 April 1958.<sup>16,17</sup> Ketika Musta'in Romli berumur 27 tahun.

c. Bapak Mertua Kiai Musta'in Romli

1) Kiai Ma'shum Kholil

Mertua pertama Kiai Musta'in Romli ini merupakan sepupunya sendiri yang juga termasuk keluarga Pondok Pesantren Darul Ulum. Putra ketiga dari Kiai Kholil Juraimi—pakde Kiai Musta'in Romli. Mertua pertama Kiai Musta'in Romli ini pernah menduduki jabatan penting, antara lain: pertama, wakil suriah NU Jombang pada 1940. Kedua, pelaksana administrasi manajemen Jamiyah TQN pada 1946. Ketiga, ketua Ma'arif NU pada 1950. Keempat, anggota Konstituante Republik Indonesia pada 1950.<sup>18</sup>

2) Kiai Abd al-Wahab Hasbullah

Siapa yang tidak kenal dengan Kiai Abd al-Wahab Hasbullah. Ia adalah kiai besar Indonesia dari Pondok Pesantren Tambak Beras. Ia adalah bapak pendiri NU. Sebelumnya, ia mendirikan Nahdlatul Wathan, Nahdlatul Tujjar, Taswirul Afkar, Komite Hijaz, pencipta

<sup>15</sup> Ma'shum, *Sejarah dan Keutamaan Istighatsah*, 17-21.

<sup>16</sup> Tim Khusus, *Pondok Pesantren Darul Ulum*, 25-26.

<sup>17</sup> Ada perbedaan tentang tahun meninggalnya Kiai Romli Tamim. Beberapa sumber menyebutkan tahun 1957 M dan beberapa menyebutkan tahun 1958 M. Akan tetapi, Majelis Pondok Pesantren Darul Ulum dalam setiap mencetak buku selalu menyebutkan tahun 1958 M. Oleh karena itu, dalam tesis ini akan menggunakan tahun 1958 M sebagai tahun meninggalnya Kiai Romli Tamim.

<sup>18</sup> Tim Khusus, *Pondok Pesantren Darul Ulum*, 27.

lagu *Yaa Lal Wathon* dan masih banyak jasa lainnya untuk Islam dan Indonesia.<sup>19</sup>

d. Kakak Kiai Musta'in Romli

Ishomuddin Romli. Satu-satunya kakak dari Kiai Musta'in Romli. Satu-satunya saudara seibu. Kebersamaan Kiai Musta'in Romli dengan kakaknya tidaklah lama. Pada 1949, Ishomuddin meninggal dunia setelah terjadi insiden dengan tentara Belanda.<sup>20</sup> Dalam sebuah cerita yang beredar di kalangan santri Darul Ulum secara turun-temurun diketahui bahwa insiden tersebut bermula ketika Ishomuddin sedang berjalan menuju kamar mandi melihat sekelompok tentara Belanda sedang berpatroli. Ishomuddin yang geram melihat tingkah tentara Belanda itu langsung melempar batok kelapa (gayung) tepat mengenai salah satu tentara. Tentara Belanda tidak terima dengan perlakuan tersebut, sehingga mereka membalas dengan tembakan yang membuat Ishomuddin meninggal dunia.<sup>21</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

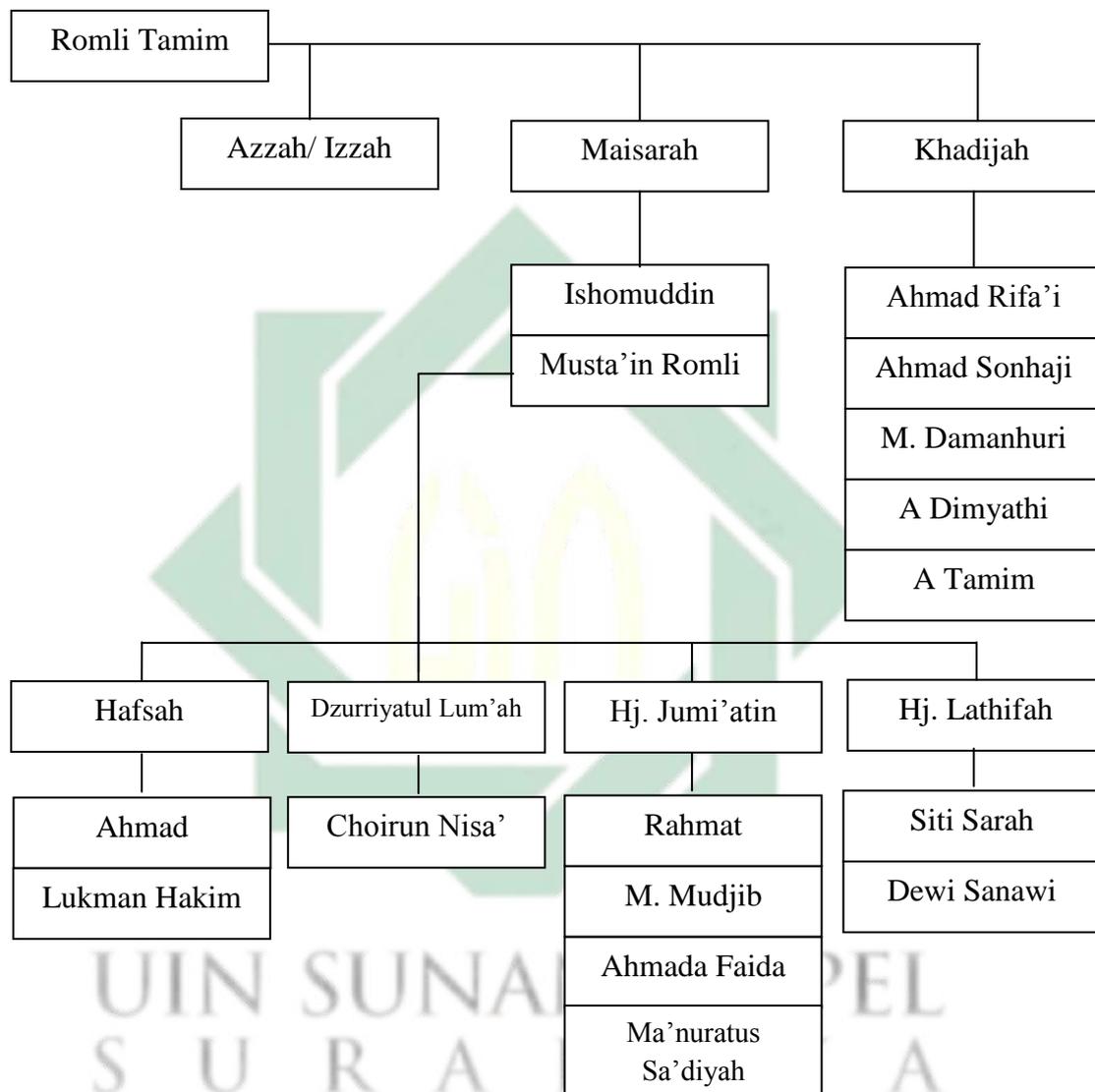
<sup>19</sup> Yuniar Mujiwati dan Ana Ahsana El-Sulukiyyah, "Analisis Nilai-Nilai Sastra dan Bentuk Nasionalisme dalam Lagu *Yaa Lal Wathon* Ciptaan KH. Abdul Wahab Hasbullah", *Educazione*, Vol 5 No 1 (Mei 2017), 63-64.

<sup>20</sup> Ma'shum, *Sejarah dan Keutamaan Istighatsah*, 19.

<sup>21</sup> Muhtadi, "Kiai Musta'in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan ...", 96.

Tabel 2.2

Silsilah Keluarga Kiai Musta'in Romli dari Bapak dan Ibu, Istri dan Anak.



## B. Riwayat Pendidikan

### 1. Pendidikan Non Formal

Sejak kecil, Kiai Musta'in mengenyam pendidikan langsung dari orang tuanya di Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Peterongan Jombang. Secara khusus, ia mendapat pendidikan dari bapaknya—Kiai Romli Tamim. Tercatat bahwa Kiai Musta'in Romli tidak banyak belajar dari Kiai selain bapaknya

sendiri. Meski begitu, ia masih bisa menjadi tokoh yang hebat. Sejauh ini ada satu hal yang bisa menjawabnya, yaitu karena genealogi pendidikan. Kiai Musta'in Romli lebih banyak belajar kepada bapaknya. Akan tetapi, jika melihat genealogi pendidikan bapaknya terdapat beberapa jalur, maka wajarlah Kiai Mustain Romli bisa menjadi tokoh besar. Jalur tersebut sebagai berikut, yaitu :

- a. Romli Tamim berguru pada ayahnya (Tamim Irsyad), Tamim Irsyad berguru pada Kiai Kholil Bangkalan.
- b. Romli Tamim langsung berguru pada Kiai Kholil Bangkalan.
- c. Romli Tamim berguru pada Kholil Juraimi (Kakak Ipar), Kholil Juraimi berguru pada dua kiai; Kiai Asy'ari (bapak Kiai Hasyim Asy'ari), Kiai Kholil Bangkalan.
- d. Romli Tamim berguru pada Kiai Hasyim Asy'ari, Hasyim Asy'ari pernah berguru pada beberapa ulama' besar; Kiai Kholil Bangkalan, Kiai Sholeh Darat Semarang, Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi.
- e. Romli Tamim berguru pada Kiai Ahmad Jufri Karangates, Kediri.
- f. Romli Tamim berguru pada Kiai Zaed Buntet, Cirebon.<sup>22</sup>

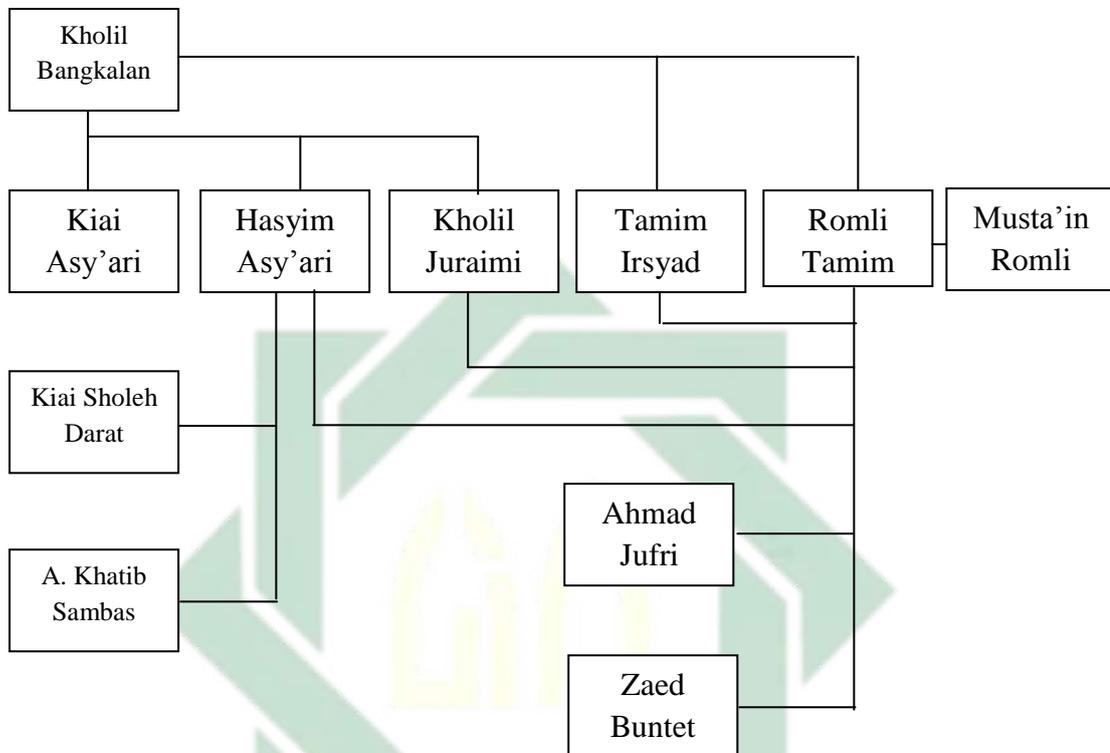
Keunikan dari genealogi pendidikan Kiai Musta'in Romli melalui pintu gerbang bapaknya sendiri, kemudian bercabang menjadi beberapa jalur. Lantas semua jalur itu bermuara lagi kepada Kiai Kholil Bangkalan. Satu pintu, banyak jalur, tapi satu pusat keilmuan.

---

<sup>22</sup> Ma'shum, *Sejarah dan Keutamaan Istighatsah*, 18-20.

Table 2.3

Sanad keilmuan Kiai Musta'in Romli dari Kiai Romli Tamim



Keterangan: 1) pembacaan tabel dari kanan ke kiri; 2) Kiai Kholil Bangkalan juga pernah berguru kepada Kiai Hasyim Asy'ari.

## 2. Pendidikan Formal

Kiai Musta'in Romli juga menempuh pendidikan formal. Semua pendidikan formalnya ditempuh di Darul Ulum. Seperti:

- a. Madrasah Ibtida'iyah (1943 M),
- b. Madrasah Tsanawiyah (1946 M),
- c. Madrasah Aliyah (1949 M).
- d. Setelah lulus, ia melanjutkan studinya di perguruan tinggi Akademi Dakwah al-Muballighin di Semarang. Hingga lulus pada tahun 1954 M.

### C. Sejarah Kepemimpinan dan Organisasi

#### 1. Persatuan Mahasiswa Jombang

Berawal dari kuliah di Akademi Dakwah al-Muballighin. Bakat kepemimpinan Kiai Musta'in Romli mulai terbentuk. Ia memobilisasi teman-temannya untuk ikut berpartisipasi mendirikan sebuah organisasi mahasiswa daerah. Ia memprakarsai berdirinya organisasi Persatuan Mahasiswa Jombang di Semarang.<sup>23</sup> Sebuah langkah awal mengasah kemampuan dalam kepemimpinan organisasi.

#### 2. NU

Kepiawaian Kiai Musta'in Romli dalam berorganisasi semakin bersinar ketika berkhidmat pada NU. Saat ia masih muda pernah menjadi sekretaris Pemuda Bekas Pejuang (*ex* Sabilillah dan Hisbullah).<sup>24</sup> Pada 1954-1956, Kiai Musta'in Romli masuk ke dalam jajaran pengurus Ikatan Pelajar NU Pusat. Kemudian Kiai Musta'in Romli masuk ke dalam jajaran pengurus Gerakan Pemuda Anshor. Setelah itu, Kiai Musta'in Romli masuk ke dalam kepengurusan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.<sup>25</sup> Pada 1963, Kiai Musta'in Romli memimpin NU Jombang.<sup>26</sup> Pengalaman menjadi pengurus NU inilah yang menjadi bekal Kiai Musta'in Romli dalam membesarkan Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejoso, Peterongan, Jombang.

<sup>23</sup> Fahmi et,al, *SKI-Kedarululuman*, 171.

<sup>24</sup> Sukamto, *Pergulatan Politik Lokal Elite Tarekat ...*, 58.

<sup>25</sup> Tim Tafaquh Fiddin, *Pedoman dan Bimbingan Ibadah PP Darul Ulum* (Jombang; Darul Ulum, 2017), 3

<sup>26</sup> Endang Turmudi, *Struggling for the Umma ...*, 105.

### 3. TQN (1958-1985)

#### a. Baiat Mursyid

Tokoh yang membawa TQN ke Rejoso adalah Kiai Kholil Juraimi—menantu Kiai Tamim Irsyad. Pada awal abad 20, ia pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ia juga menyempatkan diri untuk berguru kepada Syekh Ahmad Hasbullah al-Maduri (murid Syekh Ahmad Khatib Sambas pemarkasa TQN) sampai menerima ijazah kemursyidan. Dengan demikian, ia selanjutnya boleh membaiat jamaah yang ingin mempelajari TQN.<sup>27</sup>

Sebelum Kiai Kholil Juraimi meninggal dunia pada 1937 M. Ia sempat membaiat Kiai Romli Tamim—adik iparnya menjadi mursyid TQN di Rejoso. Begitu pula sebelum Kiai Romli Tamim meninggal pada 1958 M. Ia masih sempat membaiat Kiai Musta'in Romli—anaknyanya untuk melanjutkan menjadi mursyid TQN Rejoso.

Peristiwa pembaiatan Kiai Musta'in Romli bermula ketika Kiai Romli Tamim jatuh sakit ketika berada di Kediri. Pada 27 Oktober 1957, Kiai Romli Tamim datang memberikan baiat kepada para jamaah di Desa Kemayan, Mojo, Kediri. Pada pertengahan acara tiba-tiba Kiai Romli Tamim muntah darah dan terbaring lemas. Meski sempat menguatkan diri untuk melanjutkan acara baiat. Namun, pada akhirnya Kiai Romli Tamim harus segera pulang ke Rejoso.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Aly Mashar, "Genealogi dan Penyebaran Thariqah ...", 252.

<sup>28</sup> Hendro, *Sejarah Surat Wasiat 'Ijazah Baiat' (Janji Thariqat) Dari KH. Romly Tamim kepada Mustain Romly* (Jombang: Tanpa Penerbit, 1984), 14. // Buku ini mendapat kata sambutan dan ditandatangani langsung oleh Kiai Musta'in Romli pada tahun 1984. Dalam buku ini terdapat catatan mirip catatan kaki yang menjelaskan bahwa penulis mendapatkan bahan-bahan otentik dari buku

Dalam perjalanan pulang Kiai Romli Tamim didampingi Kiai Maksum Djafar Porong dan Kiai Muhammad. Saat mobil sampai di Desa Bulak Mondo, Kiai Romli Tamim masih sempat memikirkan siapa yang menjadi penerusnya sebagai mursyid. “Kalau aku sudah sampai (menghadap) ke Rahmatullah (meninggal dunia). Saya berharap Kiai Dahlan Kholil (putra Kiai Kholil Juraimi) meneruskan Baiat Tarekat”. Masih dalam perjalanan, kondisi Kiai Romli Tamim semakin lemah. Suhu tangannya semakin dingin dan dengan kondisi tidak bisa digerakkan. Meski demikian, ketika perjalanan sampai di Pelabuhan, Desa Papar, Kiai Romli Tamim masih berjuang untuk memikirkan siapa yang menjadi penerusnya dalam mengemban amanah memimpin TQN Rejoso. “Jangan... Jangan Kiai Dahlan Kholil (yang) menanagani (menerima) baiat (untuk) meneruskanku. Sebab Dahlan sibuk (menjaga hafalan, mempelajari, dan menelaah) dengan al-Quran. Ah ... Kiai Maksum Kholil (mertua Kiai Musta’in Romli) saja yang meneruskan”. Ketika perjalanan sampai di Desa Purwosari, Kediri. Kiai Romli Tamim berujar kepada Kiai Maksum Djafar Porong dan Kiai Muhammad. “Jangan Kiai Maksum Kholil. Ia sangat sibuk sebagai anggota Konstituante di Jakarta. Baiat agar (akan ku) diserahkan kepada anakku Musta’in”.<sup>29</sup>

Sesampainya di Rejoso. Kiai Romli Tamim meminta kepada Kiai Maksum Djafar Porong dan Kiai Muhammad untuk mencari Musta’in Romli. Setelah mengetahui kondisi bapaknya, Mustain Romli langsung

---

catatan harian Kiai Muhammad dan Kiai Maksum Jafar Porong—dua tokoh yang menemani Kiai Romli Tamim dalam perjalanan pulang dari Kediri ke Rejoso.

<sup>29</sup> Hendro, *Sejarah Surat Wasiat ‘Ijazah Baiat’*..., 14-15.

bersimpuh sujud sambil memegang kedua tangan Kiai Romli Tamim. Baiat pun terjadi, Kiai Romli Tamim berkata; “Aku berikan ijazah kepadamu dan aku berikan pakaian sufi dengan ijazah mutlak kepadamu”. Musta’in Romli pun menerima baiat dengan menjawab; “Aku terima ijazahmu”.<sup>30</sup>

Pada 16 April 1958, sekitar 30 menit sebelum Kiai Romli Tamim menghembuskan nafas terakhir, Kiai Romli Tamim menegaskan kembali kepada Kiai Maksum Djafar Porong dan Kiai Muhammad bahwa tetap Musta’in Romli yang akan menerima baiat dan meneruskan memimpin TQN Rejoso.<sup>31</sup>

Berikut adalah rangkaian sanad Mursyid TQN Rejoso hingga sampai kepada Kiai Musta’in Romli, yaitu

- 1) Nabi Muhammad S. A. W
- 2) Sayyidina Ali bin Abi Tholib
- 3) Sayyidina Husain bin Fathimah
- 4) Syekh Imam Zainal Abidin
- 5) Syekh Muhammad al-Baqir
- 6) Syekh Ja'far Shodiq
- 7) Syekh Musa al-Kadhim
- 8) Syekh Abi al-Husain Ali bin Musa al-Rodli
- 9) Syekh Ma'ruf al-Kurkhi
- 10) Syekh Sariyu al-Saqroli
- 11) Syekh Abi al-Qosim al-Junaidi al-Baghdadi

<sup>30</sup> Hendro, *Sejarah Surat Wasiat ‘Ijazah Baiat’* ..., 15-16.

<sup>31</sup> Hendro, *Sejarah Surat Wasiat ‘Ijazah Baiat’* ..., 16.

- 12) Syekh Abi Bakri Sibli
- 13) Syekh Abd al-Wahid Al-Tamimi
- 14) Syekh Abi al-Faraj Al-Thortusyi
- 15) Syekh Abi Husain Ali al-Hakari
- 16) Syekh Abi Sya'id Mubarak al-Mahzum
- 17) Sulthon al-Auliyah Asyekh Abd al-Qadir al-Jilani
- 18) Syekh Abd al-Aziz
- 19) Syekh Muhammad Hatak
- 20) Syekh Syamsuddin
- 21) Syekh Syarafuddin
- 22) Syekh Zainuddin
- 23) Syekh Nuruddin
- 24) Syekh Waliyuddin
- 25) Syekh Hasanuddin
- 26) Syekh Yahya
- 27) Syekh Abi Bakar
- 28) Syekh Abd al-Rohim
- 29) Syekh ' Usman
- 30) Syekh Kamaluddin
- 31) Syekh Abdul Fatah
- 32) Syekh Murod
- 33) Syekh Syamsuddin
- 34) Syekh Ahmad Khotib Sambas bin Abdul Ghoffar
- 35) Syekh Ahmad Hasbullah bin Muhammad Madura

36) Syekh Muhammad Kholil Juraimi

37) Syekh Muhammad Romli Tamim

38) Syekh Musta'in Romli.<sup>32</sup>

Terdapat pendapat lain dari para kiai pemerhati tarekat yang menerangkan bahwa Kiai Musta'in Romli belum menyelesaikan baiatnya, karena baiat untuk menerima *ijazah irsyad* harus dilakukan tujuh kali. Oleh karena itu, Kiai Musta'in Romli pernah mengunjungi Kiai Ustman al-Ishaq yang telah menerima baiat dari Romli Tamim untuk melengkapi baiat. Jika hal itu dimasukkan, maka bisa memasukkan Kiai Ustman al-Ishaq ke dalam sanad sebelum Kiai Musta'in Romli. Jika tidak, maka bagi sebagian kiai pemerhati tarekat juga tidak menjadi masalah, karena Kiai Musta'in Romli telah menerima baiat (pertama) secara langsung dari bapaknya.<sup>33</sup> Selain itu, beberapa ahli seperti Endang Turmudi yang meneliti tentang tarekat memasukkan nama Abd al-Karim di posisi sesudah Syekh Ahmad Khatib Sambas dan sebelum Ahmad Hasbullah bin Muhammad Madura.<sup>34</sup> Sementara Sukamto menulis dalam bukunya 'Pergulatan Politik Lokal Elite Tarekat' bahwa Kiai Kholil Juraimi langsung menerima ijazah kemursyidan dari Syekh Ahmad Khatib Sambas.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Rangkaian sanad dalam tesis ini merujuk pada Hendro, *Sejarah Surat Wasiat "Ijazah Baiat" ...*, 19-20. Sebab tulisan ini yang mendapat tanda tangan langsung dari Kiai Musta'in Romli.

<sup>33</sup> Turmudi, *Struggling for the Umma ...*, 53.

<sup>34</sup> Turmudi, *Struggling for the Umma ...*, 52-53.

<sup>35</sup> Sukamto, *Pergulatan Politik Lokal Elite Tarekat*, 42.

b. Mursyid TQN (1958-1985)

Pada 1958, saat Kiai Musta'in Romli menjadi mursyid, semua khalifah bapaknya juga berbaiat kepadanya. Kiai Musta'in Romli tidak sedikit pun merubah dan tidak menambah bentuk apa pun dari amalan *awrad* warisan bapaknya. Kiai Musta'in Romli hanya mengembangkan sedikit model pendekatan kepada masyarakat. Apabila masa sebelumnya TQN hanya dikenal di kalangan kaum santri, saat di bawah kepemimpinannya TQN berupaya untuk merambah pada kalangan Islam yang lebih umum.<sup>36</sup> Pada 1975, model pendekatan tersebut sangat terlihat. Setelah Kiai Musta'in Romli menduduki jabatan sebagai ketua umum Jam'iyah Ahli Thoriqoh al-Mu'tabarah.<sup>37</sup> Kiai Musta'in Romli benar-benar mendekatkan TQN kepada masyarakat perkotaan dengan menambah pusat kegiatan TQN di lingkungan UNDAR.<sup>38</sup> Lokasi UNDAR memang strategis berada di tengah kota. Berdekatan dengan pusat pemerintahan kabupaten, perniagaan, dan bersebelahan dengan terminal (lama) Jombang.

Pada masa kemursyidan Kiai Musta'in Romli tidak ada perbedaan antara keduanya. Struktur organisasi, ajaran, dan ritualnya sama. Perbedaan hanyalah pada lokasi dan waktu kegiatannya saja. Ritual *khususiyah* TQN Rejoso dilaksanakan hari Kamis, sedangkan ritual *khususiyah* TQN UNDAR dilaksanakan hari Senin.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> Hendro, *Sejarah Surat Wasiat 'Ijazah Baiat'* ..., 12-13.

<sup>37</sup> Zulkifi, *Sufsm in Java: The Role of Pesantren in The Maintenance of Sufsm in Java* (Jakarta: INIS, 2002)114.

<sup>38</sup> Muhtadi, "Kiai Musta'In Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan ...", 152.

<sup>39</sup> Muhtadi, "Kiai Musta'In Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan ...", 152.

Pada masa kemursyidan Kiai Musta'in Romli, TQN yang dipimpinnya sempat mengalami *gonjang-ganjing* ketika ia secara kontroversi menjalin afiliasi dengan Golkar—kekuatan politik yang berbeda arus dengan politik Islam pada umumnya saat itu, terutama NU. Banyak kalangan Islam yang men-diskredit-kan pamor ketohohan dan kemursyidan Kiai Musta'in Romli. Bahkan banyak khalifah utamanya memisahkan diri dari TQN Rejoso. Mereka ialah: Kiai Adlan Ali Cukir, Kiai Usman al-Ishaqi Sawah Pulo, Kiai Muhammad Siddiq Dawe Kudus, dan Kiai Zamrodji Kencong.<sup>40</sup>

#### 4. Pondok Pesantren Darul Ulum (1962-1985)

Terdapat beberapa istilah perodesasi dalam sejarah pondok pesantren Darul Ulum. Pertama, periode klasik 1885-1937, periode kepemimpinan Kiai Tamim Irsyad dan Kiai Kholil Juraimi. Kedua, periode pertengahan 1937-1958, periode kepemimpinan Kiai Romli Tamim dan Kiai Dahlan Kholil, serta Kiai Ma'shum Kholil Kholil. Ketiga, periode transisi 1958-1961, periode kepemimpinan Kiai Ma'shum Kholil. Keempat, periode baru fase pertama 1962-1985, periode kepemimpinan Kiai Musta'n Romli dan Kiai Bishri Kholil.<sup>41</sup>

Pada 1962, Kiai Musta'in Romli melanjutkan estafet kepemimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum bersama Kiai Bishri Kholil. Dari pengalaman organisasi dan pendidikan dari bapaknya. Kiai Musta'in Romli dan Kiai Bishri Kholil membawa banyak perubahan dan perkembangan pada Pondok

<sup>40</sup> Aly Mashar, "Genealogi dan Penyebaran Thariqah ..., 253.

<sup>41</sup> Tim Khusus, *Pondok Pesantren Darul Ulum*, 11-15.

Pesantren Darul Ulum. Beberapa perkembangan tersebut terjadi pada beberapa bidang, antara lain:<sup>42</sup>

a. Bidang Struktur Lembaga

Kiai Musta'in Romli dan Kiai Bishri Kholil membuat perubahan dalam struktur lembaga Pondok Pesantren Darul Ulum. Hal ini dilakukan agar distribusi tugas menjadi jelas dan terperinci. Mereka membagi tugas menjadi beberapa dewan, yaitu:

1) Dewan Kiai

Dewan Kiai menempati struktur tertinggi dalam organisasi. Dewan Kiai dipimpin langsung oleh Kiai Musta'in Romli dan Kiai Bishri Kholil dan beranggotakan para sesepuh pondok pesantren. Dewan ini adalah penentu kebijakan dan prinsipil Pondok Pesantren Darul Ulum.

2) Dewan Harian

Dewan Harian dipimpin oleh Kiai Ahmad Badawi Kholil dan beranggotakan guru-guru muda dan para santri. Dewan Harian bertugas sebagai pelaksana harian Dewan Kiai dalam bidang administrasi, manajemen, dan kegiatan sosial.

3) Dewan Guru

Dewan ini dipimpin oleh Kiai Musta'in Romli dan beranggotakan guru-guru. Dewan Guru bertugas sebagai pelaksana kebijakan Dewan Kiai dalam bidang pendidikan.

---

<sup>42</sup> Tim Khusus, *Pondok Pesantren Darul Ulum*, 16-17.

#### 4) Dewan Keuangan

Dewan ini dibentuk pada tahun 1968 M dan dipimpin oleh Kiai Muhammad As'ad Umar. Dewan Keuangan bertugas dalam menjalankan dan menertibkan administrasi keuangan Pondok Pesantren Darul Ulum.

#### b. Bidang Pendidikan

##### 1) Aspek Materi Pendidikan

Pada masa kepemimpinan Kiai Musta'in Romli dan Kiai Bishri Kholil ini materi pendidikan mengalami perkembangan. Tidak hanya materi pendidikan agama, materi pendidikan umum dengan berbagai disiplin ilmu juga diajarkan. Kedua materi ini diajarkan dengan porsi dan ruang yang seimbang, agar para santri bisa me-sinergi-kan kedua materi tersebut.

##### 2) Aspek Afiliasi Lembaga Pendidikan

Pada 1967 M, Pondok Pesantren Darul Ulum membagi lembaga pendidikannya menjadi dua corak. Corak pertama berafiliasi dengan Kementerian Agama dan corak yang kedua berafiliasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada 1968 M, lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan Kementerian Agama mendapat status sebagai Madrasah Negeri.

#### c. Bidang Sarana dan Prasarana

- 1) Pada 1954 M, berdiri Madrasah Muallimat Atas, setingkat SMA, tapi khusus bagi santri putri.

- 2) Pada 1960 M, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ulum bersama alumnninya mendirikan Himpunan Eks Santri Darul Ulum—yang pada kemudian hari berubah nama menjadi Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Darul Ulum.
- 3) Pada 1965 M, Pondok Pesantren Darul Ulum memiliki sebidang tanah di Jombang bagian kota. Tanah ini merupakan cikal-bakal berdirinya Universitas Darul Ulum (UNDAR).
- 4) Pada periode ini, Kiai Musta'in Romli dan Kiai Bishri Kolil berhasil mengembangkan fasilitas belajar, asrama, dan tempat ibadah.

#### 5. Universitas Darul Ulum

Setelah berurutan mendapat amanah untuk memimpin TQN dan Pondok Pesantren Darul Ulum. Demi perkembangan lembaga yang dipimpinnnya, Kiai Musta'in Romli aktif melakukan kunjungan ke pelbagai lembaga pendidikan; pondok pesantren, sekolah/madrasah, univesitas dari dalam atau pun luar negeri. Hal ini dilakukan untuk menjalin relasi antar lembaga, menjalin persaudaraan antar tokoh/kiai, dan juga studi banding. Sekaligus untuk lebih mengenalkan pondok pesantren Darul Ulum dan tarekatnya ke banyak pihak.

Pada 1963, Kiai Musta'in Romli memulai kunjungan ke negara-negara di Eropa dan Timur Tengah. Ia juga menyempatkan berziara ke makam Syekh Abd al-Qadir al-Jilani—tokoh pemarkasa Tarekat Qadiriyyah, di Baghdad, Irak. Dari beberapa kunjungan inilah Kiai Musta'in Romli memiliki gagasan untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi. Tepat pada 18 September 1965, ia merealisasikan gagasannya mendirikan UNDAR. Beberapa tokoh yang

membersamainya dalam berjuang mendirikan UNDAR, seperti Kiai Bishri Kholil, Kiai Ahmad Baidhowi Kholil, Mochammad Wijono - Gubernur Jawa Timur (1963-1967), Kiai Muhammad As'ad Umar, dan Muhammad Syahrul.<sup>43</sup> Pada perkembangannya, antara tahun 1965 hingga 1969, UNDAR sudah memiliki banyak fakultas; Fakultas Hukum, Fakultas Sosial-Politik, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Alim Ulama.<sup>44</sup>

Pada 1977, Kiai Musta'in Romli mendapat gelar Doktor Honoris Causa [Dr (Hc)] dari Macau University. Gelar akademik ini melengkapi keabsahan Kiai Musta'in Romli menduduki jabatan Rektor UNDAR. Pada 1981, Kiai Musta'in Romli kembali melakukan kunjungan ke Timur Tengah, yaitu Irak dan Kuwait. Hasil kunjungan ini adalah adanya pertukaran tenaga pendidik antara UNDAR dengan Irak University dan beasiswa studi ke Kuwait University. Pada Juli 1984, Kiai Musta'in Romli ikut berpartisipasi dalam Konferensi Rektor Se Dunia di Bangkok, Thailand.<sup>45</sup>

#### 6. Riwayat Jabatan Di Luar Kepemimpinan Darul Ulum

Selain memimpin Pondok Pesantren Darul Ulum, TQN, dan UNDAR. Kiai Musta'in Romli memiliki pergaulan dengan banyak tokoh dan lembaga penting, baik di dalam atau pun luar negeri. Seperti pada 1984, ia menemani Umar Wirahadi—Wakil Presiden RI ke-4 dan Muchtar Kusumaatmaja—Menteri Luar Negeri RI melakukan kunjungan dalam acara KTT Organisasi Konferensi Islam di Casablanca, Maroko. Selain itu, Kiai Musta'in Romli juga

<sup>43</sup> Tim Khusus, *Pondok Pesantren Darul Ulum*, 31.

<sup>44</sup> Tim Khusus, *Pondok Pesantren Darul Ulum*, 17.

<sup>45</sup> Tim Khusus, *Pondok Pesantren Darul Ulum*, 31.

menempati beberapa jabatan strategis. Berikut beberapa jabatan yang pernah diembannya, antara lain:

- a. Ketua Umum Jam'iyah Thoriqoh Mu'tabarah Indonesia pada tahun 1975 sampai wafat.
- b. Pegurus Majelis Rektor Universitas dan Institut Seluruh Indonesia tahun 1981 sampai wafat.
- c. Anggota International Association of University President (IAUP) tahun 1981 di Costarica.
- d. Anggota Badan Kerjasama (BKS) Perguruan Tinggi Swasta atau Lembaga Perguruan Tinggi Swasta (LPTS) tahun 1983 sampai wafat.
- e. Anggota DPR - MPR RI tahun 1983 sampai wafat.
- f. Wakil ketua DPP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) Golongan Karya tahun 1984 sampai wafat.<sup>46</sup>

Perjalanan karir Kiai Mustain Romli sebagai tokoh Islam sangat bersinar di kancah nasional dan internasional. Padahal sebagian besar perjalanan karir Kiai Mustain Romli pada masa Presiden Soeharto memimpin Indonesia—dengan rezim Orde Barunya. Orde yang terkenal garang kepada umat Islam terutama dari kalangan NU. Padahal pada masa itu juga NU—tokoh-tokohnya, pondok pesantrenya, benar-benar termarjinalkan.

Akhirnya, Kiai Musta'in Romli harus berpulang ke pangkuan Allah pada 21 Januari 1985.<sup>47</sup> Kiai Musta'in Romli dikebumikan di kompleks pemakaman *masayikh* Pondok Pesantren Darul Ulum. Seberapa besar ketokohan seseorang, ia tetap akan kembali kepada Tuhannya. Ketokohan Kiai Musta'in Romli

<sup>46</sup> Tim Khusus, *Pondok Pesantren Darul Ulum*, 31.

<sup>47</sup> Tim Khusus, *Pondok Pesantren Darul Ulum*, 32.

meninggalkan kemajuan bagi Pondok Peantren Darul Ulum, meninggalkan teladan bagi para santrinya, memberikan contoh bagi para tokoh Islam lainnya, dan meninggalkan pemikiran bagi bangsa Indonesia.

#### D. Karya

Kiai Mustain Romli memiliki sebuah karya tulis yang berjudul *Rislatu al-Khawasiyah*. Karya tulis ini menggunakan huruf pegon atau bahasa Jawa dengan bentuk huruf/tulisan Arab. Secara garis besar kitab ini menerangkan fadilah dari setiap lafad zikir dalam Istighasah. Dalam kata pengantar kitab ini, Kiai Mustain Romli menjelaskan bahwa ia menulis *Rislatu al-Khawasiyah* tidak dengan hanya menggunakan perspektif pribadi, melainkan juga merujuk kepada beberapa kitab besar, seperti *Tafsir Jamal*, *Khazinatu al-Asrar*, *Isryadu al-'Ibad*, *Kasifatu al-Sajā (sharah Safinatu al-Najah)*, *al-Durru al-Mansur fī Tafsir Asma'I al-Husna bī al-Ma'tsur*, *Tanwiru al-Qulub*, *Manba'u Ushuli al-Hikmah Mujarobatu al-Dairobi al-Kabir*, *Majmau'āti al-Sholawaat*. Kiai Mustain Romli menyelesaikan penulisan kitab *Rislatu al-Khowasiyah* pada 19 Juni 1961 M.<sup>48</sup>

#### E. Karakter Kiai Musta'in Romli

Setiap orang adalah *public figure* untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagai tokoh penting yang dikenal banyak orang, Kiai Musta'in Romli memiliki beberapa karakteristik dan sifat yang memikat bagi para pencintanya. Berikut adalah beberapa analisa terkait sifat dan karakteristik Kiai Musta'in Romli, antara lain:

<sup>48</sup> Musta'in Romli, *Rislatu al-Khowasiyah* (Jombang: TP, 1961), 2-3.

## 1. Visioner

Ciri utama seorang pemimpin visioner mensyaratkan bahwa pemimpin tersebut memiliki kemampuan untuk menentukan arah masa depan dengan menggunakan visi. Visi adalah idealisasi pemikiran pemimpin tentang masa depan organisasi yang dibagikan kepada *stakeholders* dan merupakan kekuatan utama perubahan organisasi yang menciptakan budaya maju dan antisipatif terhadap persaingan global. Dalam keterangan lain, pengertian kepemimpinan visioner adalah kemampuan pemimpin dalam menciptakan, merumuskan, mensosialisasikan, mentransformasikan, mengomunikasikan, dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya sendiri atau dari hasil interaksi sosial antara anggota organisasi dengan *stakeholders* yang diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang harus diwujudkan melalui komitmen bersama.<sup>49</sup>

Tidak diragukan lagi bahwa Kiai Musta'in Romli adalah seorang yang visioner. Hal ini terlihat dari setiap kebijakan yang diambil, seperti pendirian UNDAR, yang artinya santri tidak bisa hanya berhenti belajar di tingkat pesantren dan sekolah, tetapi ke depan mereka harus belajar hingga perguruan tinggi. Hal ini juga terlihat ketika kebijakan pemetaan lembaga pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ulum, selain memiliki pesantren, lembaga formal juga dibagi menjadi dua; berafiliasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Sebuah kebijakan visioner hasil dari refleksi mendalam yang melahirkan semboyan bagi santri, yaitu memiliki “Berotak London dan

---

<sup>49</sup> Toha Ma'sum, “Persinggungan Kepemimpinan Transformational dengan Kepemimpinan Visioner dan Situasional”, *INTIZAM : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 2, No 2 (April 2019), 98.

Berhati Masjid al-Haram”.<sup>50</sup> Semboyan “Berotak London” sebagai pemaparan keluasan penguasaan ilmu pengetahuan, serta ajaran untuk berpikir kritis. “Berhati Masjid al-Haram” sebagai pemaparan kedalaman pemahaman, pengamalan agama, dan mendekatkan diri kepada Allah. Sekolah mengkaji buku-buku pengetahuan umum, sedangkan pesantren dan madrasah mengkaji kitab-kitab kuning.<sup>51</sup> Keseimbangan antara daya pikir dan zikir dalam diri santri. Santri yang kelak mampu mengikuti perkembangan zaman—tidak kolot dan tidak gagap teknologi dengan tetap mendekatkan diri kepada Allah.

Kebijakan Kiai Musta'in Romli seperti melihat perkembangan ke depan, agar dunia pesantren tetap diminati oleh masyarakat, baik masyarakat yang menginginkan anaknya mengenyam pendidikan berbasis ilmu pengetahuan umum maupun masyarakat yang menginginkan anaknya mengenyam pendidikan agama. Oleh karena itu, Kiai Musta'in Romli melakukan perubahan dan penyesuaian yang substansial untuk mengakomodir beberapa tuntutan zaman. Kebijakan yang mampu membawa santri memperoleh ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama secara seimbang.

## 2. Transformasional

Kepemimpinan Transformasional menunjukkan suatu mobilitas “*to transform*” dalam menjadi seorang pemimpin. Artinya seorang pemimpin memiliki kemampuan mentransformasikan atau mengubah suatu hal menjadi

<sup>50</sup> Hartono, *Hubungan antara Kepatuhan dan Otonomi Santri Remaja di Pesantren Darul Ulum Jombang* [Tesis Tidak Dipublikasikan] (Bandung: PPs Univ. Padjadjaran, 2004), 32-33.

<sup>51</sup> Siti Nur Hidayah, “Pesantren For Middle-Class Muslims In Indonesia (Between Religious Commodification And Pious Neoliberalism)”, *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)*, Vol 9 No 1 (2021), 226-227.

bentuk yang lebih berbeda, seperti mentransformasikan ide menjadi realita.<sup>52</sup> Seseorang yang memiliki jiwa kepemimpinan transformasional memiliki beberapa karakteristik dalam dirinya, karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Inspirational Motivastion*

Pemimpin transformasional memiliki tujuan dan dapat mengartikulasikan tujuannya kepada para anggotanya.<sup>53</sup> Terlihat pada awal kepemimpinan Kiai Musta'in Romli di Pondok Pesantren Darul Ulum saat proses mengembangkan pondok pesantren. Cara pertama yang ia lakukan adalah dengan melakukan kunjungan ke pelbagai lembaga pendidikan di dalam dan luar negeri.<sup>54</sup> Studi banding mengambil aspek baik dari lembaga pendidikan lain, kemudian menerapkannya bersama para anggotanya di Pondok Pesantren Darul Ulum. Namun dengan tetap menjaga kebaikan yang sudah ada di Pondok Pesantren Darul Ulum. Cara ini juga sangat bermanfaat bagi perkembangan Pondok Pesantren Darul Ulum di masa selanjutnya.

b. *Intellectual Stimulation*

Pemimpin transformational mendorong kreativitas, perubahan, mengeksplorasi cara-cara baru.<sup>55</sup> Terlihat saat memimpin Pondok Pesantren Darul Ulum. Kiai Musta'in membuat beberapa perubahan kecil, namun sangat berguna dalam manajemen kinerja. Kiai Musta'in Romli

<sup>52</sup> Shalahuddin, "Karakteristik Kepemimpinan Transformasional", *Al-Fikrah: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol x No x (2015), 48-49.

<sup>53</sup> Shalahuddin, "Karakteristik Kepemimpinan Transformasional", 51.

<sup>54</sup> Tim Khusus, *Pondok Pesantren Darul Ulum*, 17.

<sup>55</sup> Shalahuddin, "Karakteristik Kepemimpinan Transformasional", 51.

menata struktur lembaga Pondok Pesantren Darul Ulum; membentuk Dewan Kiai, Dewan Harian, Dewan Guru, dan Dewan Keuangan.<sup>56</sup> Pembagian tugas seperti ini sangat berguna sebagai jalur bagi setiap tokoh dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan kebijakan antar dewan.

c. *Individualized Consideration*

Pemimpin transformasional memberikan dorongan, memberikan motivasi, menjaga komunikasi kepada individu-individu di bawahnya untuk lebih kreatif dan inovatif.<sup>57</sup> Aspek ini juga dibuktikan dengan perkembangan Pondok Pesantren Darul Ulum yang dipimpin oleh kolaborasi antara generasi tua dengan generasi muda. Dilihat perkembangannya dari berbagai aspek; manajemen, sarana dan prasarana pendidikan, program pendidikan, dan sebagainya.<sup>58</sup>

d. *Idealized Influence*

Pemimpin transformasional adalah panutan, berani, serta bertanggung jawab memimpin dan mengendalikan organisasi.<sup>59</sup> Hal ini juga telah dibuktikan oleh Kiai Musta'in Romli ketika berani terjun ke politik praktis, sehingga mau tidak mau tiga lembaga di bawah kepemimpinannya; Pesantren Darul Ulum, TQN, dan Universitas Darul Ulum juga ikut terseret ke dalam pusaran polemik. Di tengah kesibukan politiknya, Kiai Musta'in Romli tetap menjalankan tugasnya sebagai

<sup>56</sup> Tim Khusus, *Pondok Pesantren Darul Ulum*, 17.

<sup>57</sup> Shalahuddin, "Karakteristik Kepemimpinan Transformasional", 51.

<sup>58</sup> Tim Khusus, *Pondok Pesantren Darul Ulum*, 118-19.

<sup>59</sup> Shalahuddin, "Karakteristik Kepemimpinan Transformasional", 51.

pemimpin tiga lembaga sebagai bentuk tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Apalagi sebagai mursyid TQN.<sup>60</sup>

### 3. Pluralis

Harus ada kehati-hatian dalam memahami pengertian pluralisme, apalagi ketika menyematkannya pada seorang tokoh Islam pesantren, seperti Kiai Musta'in Romli. Pengertian pluralisme dalam hal ini tidak untuk menyamakan semua agama, melainkan memahami pengertiannya dengan menggunakan pendekatan sosial. Pluralisme agama adalah memahami kenyataan bahwa kita berbeda, beragam, dan plural dalam hal agama. Ini adalah realitas sosial, sesuatu yang perlu dan tidak dapat disangkal. Dalam realitas sosial, manusia telah memeluk agama yang berbeda. Pengakuan akan adanya pluralisme sosial-keagamaan ini merupakan pluralisme yang paling sederhana, karena pengakuan ini tidak berarti membiarkan pengakuan atas kebenaran teologis atau bahkan etika agama lain.<sup>61</sup>

Sama halnya pendapat Mohammad Rasjidi bahwa agama adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar, apalagi diubah. Ia mengibaratkan agama bukan seperti pakaian atau rumah yang bisa diganti-ganti bila perlu. Jika seseorang menganut suatu kepercayaan, maka kepercayaan itu tidak dapat dipisahkan darinya. Berdasarkan keyakinan ini, Mohammad Rasjidi menerangkan bahwa sulit bagi umat beragama untuk berbicara objektif dalam masalah agama, karena manusianya sendiri terlibat di dalamnya. Semisal sebagai seorang Muslim, ia dengan sepenuhnya menyadari bahwa dirinya

<sup>60</sup> Aly Mashar, "Genealogi dan Penyebaran Thariqah ...", 253.

<sup>61</sup> Umi Hanik, "Pluralisme Agama Di Indonesia", *Tribakti-Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol 25 No 1 (Januari, 2014), 44-45.

terlibat dengan Islam. Di sisi lain, Mohammad Rasjidi juga mengakui bahwa pada kenyataannya sejarah masyarakat merupakan multikompleks yang mengandung pluralisme agama (dalam arti) pelbagai agama. Hal ini adalah sebuah kenyataan, karena mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan mengakui adanya pluralisme agama dalam masyarakat Indonesia.<sup>62</sup> Pengertian singkatnya bahwa dalam pluralism, hubungan sosial antar manusianya yang perlu dieratkan, meski berbeda kepercayaan.

Begitu pula dengan Kiai Musta'in Romli adalah sosok pluralisme sosial-keagamaan. Ia memahami realitas sosial bahwa masyarakat Indonesia memiliki pelbagai keyakinan/agama. Hal itu terungkap dari pernyataan Gus Lukman Hakim bahwa Kiai Musta'in Romli kerap menerima tamu dari pelbagai agama dan latar belakang. Tidak ada alasan baginya untuk memperlakukan orang dengan keyakinan yang berbeda secara berbeda. Bahkan Kiai Musta'in Romli bertindak santai dan biasa saja ketika banyak orang mengira dirinya sebagai keturunan Tionghoa ketika melepas kopiahnya, karena faktor matanya yang sipit. Begitu juga keterangan dari Kiai Cholil Dahlan bahwa sempat datang jamaah Kristiani dari Surabaya menemui Kiai Musta'in Romli dengan tujuan meminta rekomendasi sebagai salah satu syarat (legal formal) pendirian gereja. Selain itu, Kiai Musta'in Romli juga berteman dengan para pastur dari beberapa Gereja di Kota Jombang dan di GKJW di Mojowarno, Jombang.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Fatonah Dzakie, "Meluruskan Pemahaman Pluralisme dan Pluralisme Agama Di Indonesia", *Al-Adyan*, Vol.IX No.1 (Januari-Juni, 2014), 80-81.

<sup>63</sup> Kiai Cholil Dahlan (Ketua Majelis PPDU), *Wawancara*, Kantor Sekretariat PPDU: Jombang, 9 November 2022., Gus Lukman Hakim. (Putra Kiai Musta'in Romli/ Pembina Yayasan UNRAR). *Wawancara*. UNRAR: Jombang, 4 Desember 2022.

#### 4. *Experienced*

Tokoh yang memiliki banyak pengalaman berasal dari kemauan belajar melalui proses transformasi dari pengalaman menjadi pengetahuan.<sup>64</sup> Adanya kemungkinan Kiai Musta'in Romli belajar menggunakan model pembelajaran seperti ini. Sebab Kiai Musta'in Romli lebih banyak belajar dengan bapaknya. Kiai Musta'in Romli memiliki bapak Kiai Romli Tamim yang notabene seorang kiai besar. Pasti ada saatnya bapak mengajak anaknya berdiskusi. Ada saatnya bapak mengajak anaknya ketika berhadapan dengan jamaah, seperti kegiatan tarekat, pengajian, dan lain sebagainya. Ada saatnya bapak mengajak anaknya dalam sebuah urusan penting yang menyatukan banyak relasi dengan tokoh-tokoh besar lainnya. Dari pengalaman tersebut, anak akan mendapatkan sebuah pembelajaran berharga. Seperti sebuah peristiwa ketika Kiai Romli Tamim masih memimpin Pondok Pesantren Darul Ulum. Ia mendapat kunjungan dari Kiai Wahid Hasyim. Ia meminta anaknya—Kiai Musta'in Romli mendampinginya dan meminta anaknya bersalaman. Selesai bersalaman dengan Kiai Wahid Hasyim, Kiai Romli Tamim berkata kepada anaknya, “*opo ora kepingin koyo Gus Wahid ?*”<sup>65</sup>

#### 5. *Istiqomah*

Menurut Kiai Cholil Dahlan, Kiai Musta'in Romli selalu berpesan kepada santri dan jamaahnya agar menjadi orang yang istiqomah. Hal ini tidak hanya disampaikan begitu saja, melainkan ia contohkan secara langsung. Keistiqomahannya bisa terlihat ketika setelah sholat shubuh selalu membaca

<sup>64</sup> David A Kolb, *Experiential Learning: Experience As The Source Of Learning And Development* (Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2015), 49.

<sup>65</sup> Gus Lukman Hakim. (Putra Kiai Musta'in Romli/ Pembina Yayasan UNДАР). *Wawancara*. UNДАР: Jombang, 4 Desember 2022.

istighasah, jika bertepatan dengan hari kamis, maka ia akan lanjutkan ziarah ke makam ayahnya dan masayikh Darul Ulum yang lain.<sup>66</sup> Tidak hanya itu, ketika sudah menjadi anggota DPR-MPR di Jakarta, Kiai Musta'in Romli selalu menyempatkan diri pulang ke Jombang untuk mengisi pengajian Riyadu al-Sholikhin di masjid Darul Ulum.<sup>67</sup>

## 6. Puitis

Dari arsip sejarah<sup>68</sup> yang ditemukan. Terdapat satu tulisan yang bisa menunjukkan Kiai Musta'in Romli merupakan seorang yang sangat puitis. Rangkaian kalimatnya memiliki makna mendalam, sehingga membuat para pembacanya akan menduga bahwa ia adalah seorang *mutashawwifin*.

Apa yang Harus Kita Hadapi?

Dulu, Sekarang, dan Nanti

Telah silam  
Lewat tahun 1954  
Mendatang  
Cahaya surya 1955

Tampakkah sudah?  
Hadang luas itu  
Mengalir kah sudah?  
Air pancaran itu  
Tunaskah sudah pohon beringin itu.

Tidaklah kan kulupakan  
Hadang air ... . terus  
Bila kusampai ke ladang hijau itu  
... Angin sejuk terasa di tubuh insan  
Ah... wahai ... segala itu  
Tarik panggil ... . . . tubuhku  
Biar sampai  
Ke bintang ... di singgasana.

<sup>66</sup> Muhtadi, "Kiai Musta'in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan...", 129-130.

<sup>67</sup> Kiai Cholil Dahlan (Ketua Majelis PPDU), *Wawancara*, Kantor Sekretariat PPDU: Jombang, 9 Novemeber 2022.

<sup>68</sup> Musta'in Romli, *Arsip*, 1 Januari 1954.

### BAB III

#### POLITIK ISLAM ORDE BARU (1966-1998)

Pada bagian sebelumnya telah jelas diketahui figur Kiai Musta'in Romli. Perlu diketahui pula bahwa sepanjang hidupnya berada di masa 'panas' perpolitikan Indonesia. Ia hidup dari masa penjajahan hingga masa Orde Baru. Ia juga merasakan betapa kerasnya politik Islam dari Soeharto dan rezim Orde Barunya. Sebelum melihat partisipasi dan pemikiran politiknya, perlu adanya uraian yang menjelaskan kondisi sosial-politik Indonesia pada masa Orde Baru. Sebab kuasa politik rezim Orde Baru itulah yang secara tidak langsung membentuk pola tindakan dan pemikiran Kiai Musta'in Romli.

#### **A. Islam dan Lahirnya Rezim Orde Baru**

Tidak bisa dipungkiri bahwa lahirnya Rezim Orde Baru berawal dari kegeraman Umat Islam dan Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat (TNI-AD) yang dimotori Soeharto melihat hubungan Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan Presiden Soekarno. Pada masa akhir Orde Lama, PKI memiliki romantisme dengan Presiden Soekarno dan Partai Nasionalis Indonesia. Presiden Soekarno membalas hubungan keduanya dengan memberikan konsesi politik kepada PKI, seperti memasukkan program-program PKI ke dalam program-program nasional. Tidak hanya itu, pada masa Trikora dan Dwikora, PKI juga berani menuntut pemerintah untuk mempersenjatai mereka, kaum buruh, dan kaum tani. Kesewenangan PKI sampai pada puncaknya, yaitu aksi penculikan dan pembunuhan pejabat TNI-AD. Aksi yang terkenal sebagai peristiwa G30S/PKI atau Gestapu (Gerakan September Tiga Puluh) atau Gestok (Gerakan Satu

Oktober).<sup>1</sup> Terdapat satu pejabat TNI-AD yang selamat dari aksi Gestapu, yaitu Abdul Haris Nasution.<sup>2</sup>

Peristiwa kelam ini tidak lepas dari perhatian Umat Islam dari pelbagai organisasi. Gestapu telah membangkitkan kembali kebencian Umat Islam kepada PKI sejak 1948, yaitu pemberontakan PKI (pendirian Negara Soviet Madiun) yang berpusat di Madiun. Aksi pemberontakan PKI itu diawali dengan menciptakan *social chaos* melalui aksi perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan di Madiun dan sekitarnya. Sasaran utama PKI adalah para kiai, santri, simpatisan NU dan Masyumi, serta aparat desa yang enggan bergabung ke dalam PKI. PKI juga melakukan serangan ke pesantren-pesantren, agar pesantren lumpuh. Agitasi PKI dengan slogan “*Pondok Bobrok, Langgar Bubar, Santri Mati*” dengan strategi “Teror, Tangkap, Bantai”. Banyak Kiai yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan dalam pemberontakan ini, seperti Kiai Imam Mursyid dan 14 orang lainnya dari Pondok Pesantren Sabil al-Muttaqin Tekeran, Kiai Keang dan Kiai Malik dari Pesantren Burikan, Kiai Imam Shafwan dari Pondok Pesantren Kebonsari, dan masih banyak lagi.<sup>3</sup>

Sebab aspek sejarah Pemberontakan PKI Madiun 1948 yang terulang lagi dengan Gestapu. Oleh karena itu, pasca Gestapu, hampir keseluruhan organisasi Islam berpihak kepada TNI-AD. Tercatat pelbagai dukungan organisasi Islam kepada TNI-AD, antara lain:

<sup>1</sup> Fitri Yanti, “G-30-S/PKI Event Behind The Establishment Of The 1965 Pancasila Magic Day”, *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol. 2 No. 2 (2017), 33-40.

<sup>2</sup> Albyanka Romero Himawan dan Nala Nandana Undiana, “Pandangan Mahasiswa Terhadap Film Penghianatan G30S/PKI”, *Cinematology: Jurnal Anthology of Film and Television Studies*, Vol 1 No 1 (2021), 43.

<sup>3</sup> TIM PBNU, *Benturan NU-PKI (1948-1965)* (Jakarta: PBNU, 2013), 35-64.

## 1. Sinergi Pemuda Islam dan TNI-AD dalam Penumpasan PKI

Pada 1 Oktober 1965, beberapa tokoh muda Islam dari Gerakan Pemuda Anshor, Pemuda Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Pelajar Islam Indonesia (PII) mengadakan pertemuan di rumah Subchan Zaenuri Echsan—intelektual NU, di Jakarta. Dari pertemuan pertama menghasilkan kesepakatan untuk mendukung TNI-AD dalam menumpas PKI dengan membentuk Komando Aksi Pengganyangan Gestapu (KAP Gestapu).<sup>4</sup>

KAP Gestapu memiliki beberapa langkah sebagai agenda pergerakan, antara lain:

- a. Pada 3 Oktober 1965, PII memainkan langkah pertama dengan mengadakan Apel Akbar di lapangan gedung Front Nasional. Apel akbar ini dihadiri ribuan anggota PII dengan tuntutan agar rakyat Indonesia ikut serta dalam menumpas PKI. Terutama menumpas tokoh-tokohnya, seperti DN Aidit dan Subandrio.<sup>5</sup>
- b. Pada 4 Oktober 1965, KAP Gestapu mengadakan aksi Rapat Umum di Taman Sunda Kelapa, Jakarta. Aksi ini juga mendapat dukungan (ikut hadir) dari beberapa organisasi kepemudaan; Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (GASBIINDO), Pemuda Pancasila, dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Dalam Rapat Umum ini menghasilkan resolusi yang berisi tuntutan kepada pemerintah untuk segera membubarkan PKI dan antek-anteknya.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Darmawijaya, "Islam dan Kekuasaan Orde Baru: Membaca Kembali Politik De-Islamisasi Soeharto, *Sosiologi Refektif*, Vol 10, N0 1 (Oktober, 2015), 63.

<sup>5</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Peta Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam di Indonesia* (Surabaya: Tri Bakti, 1996), 229.

<sup>6</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008* (Jakarta: Serambi, 2008), 594.

- c. Pada 8 Oktober 1965, aksi pemuda Islam mendapat dukungan dari TNI-AD. Mereka menguasai jalanan Jakarta—Ibu Kota Negara. Aksi ini berbuntut hingga terjadinya aksi pembakaran markas besar PKI di Jakarta.<sup>7</sup>

## 2. Sinergi Ormas Islam dan TNI-AD dalam Penumpasan PKI

Pada 9 hingga 11 Oktober 1965, Muhammadiyah mengadakan musyawarah di Jakarta. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan untuk membantu TNI-AD dalam menumpas PKI sebagai dalang dari Gestapu. Hasil musyawarah Muhammadiyah ini mendapat respon baik dari organisasi masyarakat Islam yang lain. Respon Umat Islam seperti demikian adalah sebagai rasa benci dan antipati terhadap PKI yang sering menyerang/menyudutkan Umat Islam. Rasa benci tersebut sampai berubah menjadi sikap sangat emosional hingga meledak menjadi aksi pembunuhan kader-kader PKI di beberapa wilayah Indonesia.<sup>8</sup>

Rangkaian peristiwa dalam upaya menumpas PKI dari Indonesia tersebut tidak membuat Presiden Soekarno goyah dengan pendiriannya dalam menjadikan PKI sebagai relasi politik. Presiden Soekarno seakan enggan untuk menyelesaikan peristiwa Gestapu secara politik. Sikap Presiden Soekarno tersebut membuat geram rakyat. Apalagi rakyat juga tengah menghadapi masalah ekonomi; kenaikan bahan-bahan pokok kehidupan. Pada 25 Oktober 1965, perkumpulan mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) sebagai wadah dalam melakukan aksi politik mendesak pemerintah untuk membubarkan PKI dan memperbaiki ekonomi. Presiden Soekarno tidak bergeming sekali pun dengan tuntutan KAMI. Presiden Soekarno malah membentuk wadah tandingan KAMI,

<sup>7</sup> Darmawijaya, "Islam dan Kekuasaan Orde Baru ...", 64.

<sup>8</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, 595.

yaitu Barisan Soekarno. Pembentukan Barisan Soekarno diumumkan langsung oleh Subandrio—Perdana Menteri 1 melalui Radio Republik Indonesia (RRI). Barisan Soekarno beranggotakan petani, buruh, pemuda, dan bahkan wanita dari kota hingga desa. Barisan Soekarno mengusung agenda utama, yaitu melawan balik segala serangan yang tertuju kepada Presiden Soekarno dan rezim pemerintahannya.<sup>9</sup>

Pembentukan Barisan Soekarno mendapat tanggapan sinis dari KAMI. Pada 24 Januari 1966, KAMI melakukan aksi menuntut Presiden Soekarno membubarkan PKI dan secepatnya memperbaiki ekonomi. Aksi ini berujung pada meninggalnya anggota KAMI yang bernama Arief Rahman Hakim dari mahasiswa Universitas Indonesia. Aksi KAMI tersebut mendapat balasan sengit dari Presiden Soekarno. Pada 26 Januari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan pembubaran KAMI dan menutup Universitas Indonesia. Presiden juga mengerahkan beberapa kekuatan militer yang masih mendukungnya dengan menggelar aksi konvoi kendaraan lapis baja dan pemasangan kawat berduri di banyak ruas jalanan Jakarta.<sup>10</sup>

Pada 4 Maret 1966, KAMI membalas tindakan Presiden Soekarno dan rezimnya dengan membentuk Laskar Arief Rahman Hakim yang bersumber dari 42 Perguruan Tinggi yang terbagi dalam 7 kelompok kekuatan. Pada 5 Maret 1966, PII merespon aksi KAMI dengan mendirikan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI). KAPPI berdiri dengan dukungan organisasi pelajar lain, Ikatan Pelajar al-Washliyah, Gerakan Siswa Nasional Indonesia, dan Ikatan Pelajar Ekonomi. Gabungan kekuatan KAMI dan KAPPI berhasil menduduki

---

<sup>9</sup> Djaelani, *Peta Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam ...*, 239.

<sup>10</sup> Djaelani, *Peta Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam ...*, 241.

Departemen Luar Negeri. Aksi dari KAMI dan KAPPI ini berlangsung hingga beberapa hari setelah aksi pertama berhasil dilakukan.<sup>11</sup>

Soeharto yang memotori TNI-AD melihat dukungan besar dari rakyat Indonesia, terutama dari Umat Islam yang mengambil langkah berani. Ia menekan Presiden Soekarno memberikan Surat Perintah untuk mengatasi segala sesuatu yang tidak/enggannya bisa diatasi oleh pemerintahannya. Sampai pada akhirnya lahir Surat Perintah tertanggal 11 Maret 1966 (Supersemar). Pada 12 Maret 1966, setelah memegang Supersemar, Soeharto melakukan beberapa kebijakan berani yaitu membubarkan PKI dan menangkap beberapa menteri yang ditengarai terlibat dalam tragedi Gestapu.<sup>12</sup>

Pada 20 Juni hingga 5 Juli 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai lembaga tertinggi negara menggelar sidang yang menghasilkan sejumlah keputusan penting. Perlu diketahui bahwa sebelum sidang ini, kekuatan TNI-AD berhasil mengambil alih kuasa di MPRS. Abdul Haris Nasution yang selamat dari tragedi Gestapu dengan segala intrik/strategi politik berhasil menduduki jabatan Ketua MPRS. Abdul Hasis Nasution yang memimpin sidang MPRS menghasilkan beberapa keputusan bersejarah, antara lain:<sup>13</sup>

1. Mencabut pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup,
2. Menetapkan Surat Perintah tertanggal 11 Maret sebagai keputusan resmi MPRS,
3. Mengangkat Soeharto sebagai kepala pemerintahan untuk sementara waktu,

<sup>11</sup> Djaelani, *Peta Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam ...*, 241.

<sup>12</sup> Musyrifah Susanto, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 76.

<sup>13</sup> Darmawijaya, "Islam dan Kekuasaan Orde Baru: ...", 67.

4. Membubarkan PKI dan melarang paham marxisme dijadikan sebagai ideologi politik di Indonesia.

Gebrakan yang dilakukan TNI-AD tidak berhenti sampai sidang pertama. Pada Maret 1967, MPRS mengadakan Sidang Istimewa yang menghasilkan sejumlah keputusan, antara lain yaitu mencabut kekuasaan negara dan pemerintah dari tangan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden sampai terpilihnya presiden definitif dari hasil pemilihan umum di MPRS. Setahun kemudian, Maret 1968, MPRS kembali mengadakan Sidang Istimewa yang menghasilkan keputusan untuk mengangkat Soeharto sebagai presiden definitif dengan masa jabatan 5 tahun ke depan. MPRS juga menetapkan pelaksanaan pemilihan umum harus terlaksana selambat-lambatnya 5 Juli 1968.<sup>14</sup> Dengan jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto adalah periode baru dalam sejarah negara dan pemerintah Indonesia. Tumbangnya Orde Lama dan dimulainya Orde Baru.

#### **B. Perodesasi Politik Islam Orde Baru (1966-1998)**

Sudah tertulis dengan gamblang sinergi antara Umat Islam dan TNI-AD yang dimotori Soeharto berhasil menjatuhkan Soekarno dan rezimnya. Tentu tidak berlebihan bila menyebut keberhasilan Soeharto dan TNI-AD menjatuhkan Soekarno dan rezimnya sebagai keberhasilan Umat Islam pula. Sinergi yang membawa harapan bagi Umat Islam memiliki romantisme politik dengan pemerintahan Orde Baru. Romantisme dalam hal ini adalah dalam bentuk dukungan dari rezim yang berkuasa kepada Islam politik.

---

<sup>14</sup> Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, 595.

Memang pada masa awal Orde Baru romantisme itu terlihat, namun ternyata lambat-laun berubah. Perubahan sikap Orde Baru terhadap Islam politik ditengarai rezim Orde Baru lebih mementingkan pembangunan ekonomi. Kepentingan ini berimplikasi pada roda politik yang macet, karena penekanan pada pembangunan ekonomi memerlukan kondusifitas dan stabilitas politik. Rezim Orde Baru tidak ingin seperti rezim Orde Lama yang terlantung-lantung pembangunan ekonominya karena terlalu fokus bertengkar di arena politik. Dalam mendukung gagasan ide pembangunan ekonomi, rezim Orde Baru menunjukkan ke publik sebagai penguasa dengan wajah politik yang kuat, garang, militeristik, dan represif. Rezim Orde Baru berkaca pada pengalaman Orde lama yang agaknya melihat Islam politik sebagai gangguan untuk mencapai tujuan tadi, sehingga perlu adanya usaha dalam penjinakan Islam politik.<sup>15</sup>

#### 1. Periode Penjinakan

Istilah periodisasi ini meminjam dari Bahtiar Effendy.<sup>16</sup> Sebuah periode yang mengkonstruksi sejarah rezim Orde Baru dalam menjinakkan Islam politik dengan pelbagai cara. Serta konstruksi sejarah yang jelas menunjukkan penghianatan rezim Orde Baru kepada Umat Islam yang telah berjasa dalam membantu berdirinya pemerintahan yang baru. Penghianatan yang menghancurkan harapan Umat Islam untuk berkiprah secara maksimal dalam kegiatan politik tanah-air.

Pada 1966, Umat Islam merasakan kegembiraan ketika pemerintah ‘Transisi Orde Baru’ membebaskan tokoh-tokoh Islam *ex* Partai Masyumi

<sup>15</sup> Endang Turmudi, *Struggling for the Umma ...* 112.

<sup>16</sup> Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara – Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* [edisi digital] (Jakarta : Democracy Project – Yayasan Abad Demokrasi, 2011), 130.

yang menjadi tahanan politik di masa Orde Lama. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah mantan Ketua Partai Masyumi dan Perdana Menteri ke lima, Muhammad Natsir; Wakil Perdana Menteri ke sepuluh dan mantan pimpinan dalam diplomasi Roem-Royen, Mohammad Roem; Ketua Pemerintahan Darurat RI, Syafruddin Prawiranegara; mantan Ketua Partai Masyumi, Prawoto Mangkusasmito; Ketua KNIP pertama, Kasman Singodimejo; Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Umat Islam yang merasa telah mendapatkan angin segar dalam politik sampai berani mengungkit kembali persoalan Piagam Jakarta. Pada 22 Juni 1968, tepat 23 tahun saat Piagam Jakarta pertama kali disahkan, Umat Islam mengadakan acara Peringatan Hari Piagam Jakarta di gedung Pola, Jakarta. Ketua MPR, Abdul Haris Nasution, turut hadir dalam acara peringatan. Menteri Agama, Muhammad Dahlan, juga hadir dalam acara ini. Menteri Agama memberikan sambutan yang emosional. Ia menyatakan bahwa rakyat Indonesia telah lama menjalankan syariat Islam, sehingga syariat Islam tidak hanya berlaku sebagai sumber hukum, tapi sudah menjadi kenyataan sosial. Begitu pun dengan Piagam Jakarta yang menjiwai UUD 1945 yang seharusnya secara otomatis harus menjadi sumber hukum.<sup>18</sup>

Romantisme hubungan Umat Islam dan rezim Orde Baru lambat-laun menjadi bertepuk sebelah tangan. Umat Islam mulai merasa curiga dengan keputusan-keputusan pemerintah. Begitu pun dengan Soeharto dan rezim Orde Barunya seperti pemerintahan yang gamang dan penuh pertimbangan dalam menyikapi potensi kekuatan Umat Islam yang sangat besar. Endang Turmudi

<sup>17</sup> Mundzirin Yusuf et.al, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pinus, 2006), 269.

<sup>18</sup> Darmawijaya, "Islam dan Kekuasaan Orde Baru: ...", 67-68.

menyebut Soeharto sebagai presiden yang memposisikan Islam politik sebagai saingan yang berbahaya.<sup>19</sup> Khawatir Islam politik akan dengan mudah mengambil alih kekuasaan negara, sehingga perlu untuk di-jinak-an. Oleh karena itu, rezim Orde Baru melakukan beberapa tindakan yang terlihat dalam beberapa peristiwa berikut:

a. Penolakan, Intervensi, Kewaspadaan Terhadap Islam Politik

1) Penolakan Rehabilitasi Partai Masyumi

Pada 7 Januari 1967, Soeharto -mandataris Supersemar dan mandataris kepala pemerintahan- memberikan tanggapan resmi tentang ide dari tokoh-tokoh Islam modernis yang ingin menghidupkan kembali Partai Masyumi. Soeharto mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) memiliki satu pendirian dengan dasar yuridis, ketatanegaraan, dan psikologis tidak bisa menerima rehabilitasi mantan Partai Masyumi.<sup>20</sup>

2) Penolakan Pendirian PDII

Pada 11 Januari 1967, bapak proklamator kemerdekaan Indonesia, Mohammad Hatta berniat mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia (PDII). Ia mengirim surat secara langsung kepada Soeharto tentang niatnya tersebut. Satu minggu berselang atau tepat pada 17 Mei 1967, Mohammad Hatta mendapat surat balasan dari Soeharto yang berisi ungkapan tegas tidak memberikan izin pendirian PDII. Soeharto (pemerintah) menimbang bahwa berdirinya PDII tidak

<sup>19</sup> Endang Turmudi, "Islamic Politic in Contemporary Indonesia", *PESA*, Vol 2 No 3 (Desember, 2016), 3.

<sup>20</sup> Darmawijaya, "Islam dan Kekuasaan Orde Baru: ...", 70.

bisa menjamin bersatunya dan tertampungnya seluruh kekuatan Islam di luar partai politik yang sudah berdiri. Padahal sudah tidak diragukan lagi kenasionalisan dari Mohammad Hatta. Soeharto juga menimbang jika pemerintah memberikan izin pendirian PDII, maka akan menimbulkan reaksi negatif dari kalangan Islam modernis yang telah ditolak usulannya untuk merehabilitasi Partai Masyumi. Hal itu akan mengusik stabilitas politik.<sup>21</sup> Alasan penolakan PDII sangat tampak tidak substansial dan terkesan mengada-ngada. Padahal Mohammad Hatta adalah tokoh yang berjasa dalam merayu Umat Islam agar mau menerima perubahan sila pertama pada Piagam Jakarta. Nama Mohammad Hatta juga tidak pernah masuk dalam daftar pemberontakan di masa Orde Lama.

### 3) Intervensi Berdirinya Parmusi

Setelah menolak rebalisitasi Partai Masyumi dan pendirian PDII. Rezim Orde Baru sedikit melonggarkan usulan dari kalangan Islam Modernis untuk mendirikan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dengan syarat tidak ada orang bekas Partai Masyumi. Pendirian Parmusi juga untuk menyeimbangkan partai Islam yang sudah ada; NU, PSII, dan Perti yang berlatar dari kalangan Islam tradisional. Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam terbesar adalah penyokong utama pendirian Parmusi. Pada 20 Februari 1968, pemerintah memberi restu pendirian Parmusi melalui SK Presiden RI Nomor 70 dengan Djanarwi Hadikusumo sebagai ketua

<sup>21</sup> Darmawijaya, "Islam dan Kekuasaan Orde Baru: ...", 72.

dan Lukman Harun sebagai sekretaris jendral sampai Parmusi melaksanakan mukatamar.<sup>22</sup>

Pada November 1968, Parmusi mengadakan muktamar pertama di Malang. Muktamar menghasilkan Muhammad Roem terpilih sebagai ketua Parmusi yang baru. Pemerintah yang mengetahui hal itu segera mengirim pesan ke Malang. Isi pesan tersebut tentang keengganan pemerintah terhadap terpilihnya Muhammad Roem. Akhirnya, muktamar mengembalikan jabatan kepada Djanarwi Hadikusumo dan Lukman Harun.

Pada Oktober 1970, Parmusi mengalami dualisme kepemimpinan. Djaelani Naro dan Ali Imran Kadir memproklamkan diri sebagai Dewan Formatur Partai Parmusi yang baru. Djaelani Naro dan Ali Imran Kadir melakukan hal ini dengan alasan ingin menyelamatkan Parmusi, karena Parmusi di bawah kendali Djanarwi Hadikusumo dan Lukman Harun terlalu berposisi dengan pemerintah dan ABRI.<sup>23</sup> Ternyata intrik yang terjadi dalam tubuh Parmusi juga terdapat andil rezim Orde Baru. Pemerintah merasa tidak puas dengan Djanarwi Hadikusumo dan Lukman Harun yang dianggap terlalu islamis. Rezim Orde Baru kemudian menugaskan Ali Murtopo agar melaksanakan operasi khusus untuk menyokong aksi Djaelani Naro dan Ali Imran Kadir.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Fara Famular, "Peran Majalah Suara Muhammadiyah dalam Perjuangan Politik Muhammadiyah Tahun 1965-1985", *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, Vol 3 No 2 (2018), 236.

<sup>23</sup> Famular, "Peran Majalah Suara Muhammadiyah dalam Perjuangan Politik ...", 337.

<sup>24</sup> Effendy, *Islam dan Negara ...*, 133-134.

Akhirnya, pemerintah secara gamblang melakukan intervensi terhadap masalah dualisme kepemimpinan dan intrik Parmusi. Pada November-Desember 1970, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 77 yang berisi penunjukan Menteri Negara, Mohammad Syafaat Mintareja sebagai ketua Parmusi yang baru. Pemerintah memandang Mintareja sebagai tokoh Islam dari Muhammadiyah yang akomodatif.<sup>25</sup>

#### 4) Penolakan Legalisasi Piagam Jakarta

Pada 1968, Umat Islam yang masih merasakan *euphoria* berusaha menyodorkan usulan pada Sidang Istimewa MPRS agar Piagam Jakarta dilegalisasi/ diterapkan kembali.<sup>26</sup> Akan tetapi, usaha ini mengalami kegagalan, karena mendapat sejumlah penolakan dari pelbagai kalangan. Penolakan datang dari kalangan sosialis dan kalangan Kristen, serta ABRI. Penolakan yang membuat Umat Islam kecewa terutama kepada fraksi ABRI yang notabene terdapat unsur TNI-AD di dalamnya.<sup>27</sup>

#### 5) Pengawasan Partai Islam Akomodatif dan Penundaan Pemilu

NU, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) adalah tiga partai politik Islam yang masih bertahan setelah jatuhnya Orde Lama. Ketiga partai Islam ini tidak menggambarkan sebagai partai yang 'kritis' terhadap rezim Orde Lama. Terlihat cukup mengikuti alur dan sangat akomodatif dengan

<sup>25</sup> Famular, 'Peran Majalah Suara Muhammadiyah dalam Perjuangan Politik ...', 337.

<sup>26</sup> Effendy, *Islam dan Negara ...*, 135.

<sup>27</sup> Darmawijaya, "Islam dan Kekuasaan Orde Baru: ...", 68.

kehendak politik Soekarno.<sup>28</sup> Ketika masa awal rezim Orde Baru berkuasa, ketiga partai Islam ini masih dipertahankan. Meski ketiga partai cukup akomodatif, namun rezim Orde Baru tetap menunjukkan kewaspadaannya, terutama kewaspadaan terhadap kekuatan NU. Sebab NU adalah partai dengan perolehan suara terbesar yang masih tersisa dari sekian banyak peserta pemilu sebelumnya (1955). Setelah PNI melemah berbarengan dengan jatuhnya Orde Lama, Masyumi yang telah dibubarkan sejak tahun 1960, dan PKI yang juga telah dilarang.<sup>29</sup>

Tabel 3.1  
Perolehan Suara Nasional Pemilihan Umum Tahun 1955

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	PNI	22.32%
2	Masyumi	20.92%
3	NU	18.41%
4	PKI	16.36 %

Kemungkinan besar, NU adalah alasan utama rezim Orde Lama mengulur jadwal pemilu. MPRS yang semula menjadwalkan pemilihan umum selambat-lambatnya pada 5 Juli 1968. Kenyataannya memang tidak segera terlaksana meski sudah melewati batas hari pelaksanaan yang ditentukan. Seolah Soeharto dan rezim Orde Barunya ingin mengulur waktu pelaksanaan pemilu untuk mempersiapkan Golkar

<sup>28</sup> Haris Zaky Mubarak, "Wacana Islam Dalam Politik Praktis Di Indonesia", *Jurnal Widya Citra*, Vol. 1 No 2 (September, 2020), 25.

<sup>29</sup> KPU RI, "Pemilu 1955", dalam <https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955> (1 November 2022), 1.

sebagai kendaraan politik dan menahan gelombang keagamaan Islam politik.<sup>30</sup>

Tampak terlihat ada pertimbangan dari Soeharto dan rezim Orde Barunya dalam menyikapi Islam politik. Terdapat kesan bahwa pemerintah dengan sengaja menahan perkembangan Islam politik yang militan dan mewaspadaikan Islam politik yang akomodatif. Sikap Soeharto dan rezim Orde Barunya yang penuh kegamangan ini bisa dianalisis menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1) Antropologis

Secara antropologis, Soeharto tergolong sebagai kalangan Islam Abangan. Seorang Islam Abangan mengakui bahwa dirinya beragama Islam, namun masih memiliki kepercayaan klenik kebatinan Jawa. Oleh sebab itu, tampak Soeharto tidak cukup memiliki pengetahuan yang memadai tentang Islam, sehingga Soeharto sering menaruh curiga terhadap Islam.<sup>31</sup>

Tidak hanya Islam Abangan. Pergaulan politik Soeharto juga banyak berdekatan dengan kalangan Katolik dan Kristen. Hal tersebut juga sangat disadari oleh kalangan NU dan PSII bahwa Soeharto dalam memimpin rezimnya terlalu bergantung kepada dukungan para tokoh Kristen politik. Salah satu tokoh yang terkenal kedekatannya dengan Soeharto adalah Frans Seda dari Partai Kristen.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Darmawijaya, "Islam dan Kekuasaan Orde Baru: ...", 72.

<sup>31</sup> Darmawijaya, "Islam dan Kekuasaan Orde Baru: ...", 69.

<sup>32</sup> Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara ...* [edisi digital], 136. Lihat juga dalam Justus M van der Kroef, *Indonesia After Soekarno* (Vancouver: University of British Columbia Press, 1971), 51. Sementara untuk keterangan tokoh-tokoh Katolik dan Kristen yang dekat dengan Soeharto bisa dilihat

## 2) Historis dan Psikologis

Kecurigaan Soeharto terhadap Islam politik juga bukan tanpa sebab. Sebab secara historis Soeharto bersama rezimnya yang mayoritas berasal dari TNI-AD memiliki pengalaman historis yang tidak mengenakan, yaitu berhadapan dengan kalangan Islam *extreme*. Beberapa peristiwa yang dihadapi TNI-AD, seperti pemberontakan DI/TII, Kahar Muzakar, Daud Beureueh. Peristiwa-peristiwa tersebut tentu mengganggu psikologis TNI-AD dan membuat trauma politik tersendiri. Lantas lahir kecurigaan bahwa memberi kesempatan Umat Islam sama halnya dengan menanam potensi *extremis*.<sup>33</sup>

## 3) Politik

Secara politik, Soeharto memiliki ambisi untuk berkuasa dan cenderung ingin mempertahankan kekuasaannya. Memberi kesempatan bagi tokoh-tokoh Islam untuk berpolitik sama halnya dengan menanam bibit hama yang bisa merusak hegemoni kekuasaannya. Sebab Islam adalah agama mayoritas di dalam negara dengan sistem demokrasi. Melalui dua faktor itu bisa jadi Umat Islam akan dengan mudah mengambil kendali kehidupan politik, berbangsa, dan bernegara.<sup>34</sup>

Faktor politik lainnya terlihat dalam pengkondisian Islam politik. Rezim Orde Baru hanya merestui partai politik Islam yang

---

dalam: Petrik Matanasi, "Orang-Orang Katolik dan Kristen di Sekitar Soeharto", dalam <https://tirto.id/orang-orang-katolik-dan-kristen-di-sekitar-soeharto-enUL>, (5 November 2022), 1.

<sup>33</sup> Okrisal Eka Putra, "Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru", *Jurnal Dakwah*, Vol IX No 2 (Juli-Desember 2008), 187.

<sup>34</sup> Putra, "Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru", 187.

akomodatif dan melarang/menolak partai Islam modernis atau militan yang berpotensi mengganggu hegemoni kekuasaan Soeharto.

Tiga pendekatan tersebut sangat mewakili alasan sikap keras rezim Orde Baru terhadap Islam politik. Sebab politis tampak yang paling kuat dari sebab yang lain. Ketidaksiapan Soeharto bersaing secara sehat dengan kemayoritasan Umat Islam di alam demokrasi. Hal tersebut yang mendasari Soeharto dan rezim Orde Barunya membuat kebijakan-kebijakan otoriter dengan menjinakkan Islam politik, demi tetap menjaga hegemoni kekuasaan.

b. Strukturisasi Partai, Ormas, dan Ideologi

Tampak Soeharto bertindak ke arah ingin mempertahankan rezim Orde Barunya agar berkuasa lebih lama. Sebagaimana Foucault melihat bahwa kekuasaan bukan milik orang/kelompok yang mendominasi, namun kekuasaan adalah milik orang/kelompok yang mampu membuat regulasi (aturan). Kekuasaan bersumber dari adanya regulasi, regulasi bisa tercipta karena adanya pengetahuan, pengetahuan juga membantu menciptakan wacana untuk mendukung regulasi.<sup>35</sup> Begitu pun dengan rezim Orde Baru yang mengetahui bahwa hanya kekuatan Islam yang bisa merusak rencana hegemoni kekuasaannya. Oleh karena itu, rezim Orde Baru menciptakan regulasi-regulasi yang menyusahkan Islam politik. Berikut adalah beberapa regulasi dan wacana pendukungnya yang dibuat oleh rezim Orde Baru.

---

<sup>35</sup> Foucault, *Power/ Knowledge; Selected Interview and Other Writings 1972-1977*, 133.

### 1) Strukturisasi Partai Politik

Sejak setelah berhasil menumbangkan Orde Lama, TNI-AD sudah mengajukan wacana sturkturisasi. Strukturisasi partai politik adalah menata dan menyusun partai politik dengan cara menggabungkan (fusi) beberapa partai politik yang memiliki kesamaan ideologi atau golongan ke dalam satu partai. Strukturisasi ini sangat berguna bagi rezim Orde Baru dalam melakukan pengawasan terhadap partai politik, sehingga tercapai tujuan untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan. TNI-AD menawarkan sebuah wacana agar partai politik dikelompokkan menjadi lima golongan; Golongan Islam, Golongan Kristen-Katolik, Golongan Nasionalis, Golongan Sosialis Pancasila, dan Golongan Karya (Golkar).<sup>36</sup>

Pada 1970, Soeharto juga mewacanakan pemikirannya untuk mengelompokkan partai politik di hadapan 9 partai dan 1 Golkar peserta pemilu 1971. Partai politik akan dikelompokkan menjadi 3; Golongan Spiritual, Golongan Nasionalis, dan Golkar.<sup>37</sup> Akan tetapi, ide ini belum terlaksana pada pemilu 1971. Sebab amanat undang-undang menetapkan peserta pemilu 1971 diikuti oleh satu Golkar dan Sembilan partai politik. Golkar sebagai kendaraan politik kekuasaan Soeharto dan rezim Orde baru menang telak dengan perolehan suara sebesar 62.8%,<sup>38</sup> sementara partai-partai Islam babak belur; NU mendapat 18.68%, Parmusi mendapat 5.36%, PSII mendapat 2.39%,

<sup>36</sup> Mubarak, "Wacana Islam Dalam Politik Praktis ...", 19.

<sup>37</sup> Nurlila Goccing, "Politik Nahdatul Ulama dan Orde Baru", *The Politics; Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol 1 No 1, (Januari, 2015), 66.

<sup>38</sup> Mubarak, "Wacana Islam Dalam Politik Praktis Di Indonesia", 27-29.

Perti 0.69%. Suara sisanya 6.93% bermuara ke PNI, 1.34% ke Parkindo, dan 1.10% ke Partai Katolik.<sup>39</sup>

Tabel 3.2

## Perolehan Suara Nasional Pemilihan Umum Tahun 1971

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN
1	Golkar	62.8%
2	NU	18.68%
3	Parmusi	5.36%
4	PNI	6.93%
5	PSII	2.39%
6	Parkindo	1.34%
7	Partai Katolik	1.10s%
8	Perti	0.69%

Salah satu faktor rezim Orde Baru mendapatkan kemenangan adalah karena pemerintah menerapkan aturan ‘monoloyalty’ bagi setiap pegawai negeri sipil (PNS) di semua departemen harus memiliki loyalitas hanya kepada pemerintah. Artinya PNS harus memilih Golkar dalam pemilu. Aturan itu ditengarahi demi menghadang laju NU dalam pemilu, karena sebelumnya pemerintah tidak berhasil menyelesaikan proses aturan strukutrisasi. Penerapan aturan ini terbukti melemahkan dukungan PNS terhadap NU. Sebaliknya, Golkar yang banyak

<sup>39</sup> KPU RI, “Pemilu 1971”, dalam <https://kab-jembrana.kpu.go.id/page/read/38/pemilu-1971> (1 November 2022), 1.

mendapatkan keuntungan dari ‘monoloyalty’ berhasil memenangkan pemilu dan berhak menguasai parlemen, kabinet,<sup>40</sup> serta bisa mengangkat kembali Soeharto menjadi presiden.

Beruntung bagi NU dalam pemilu 1971 masih mendapat suara dari *grass root*. Meski kebijakan monoloyalty telah menguras dukungan dari anggota dan simpatisan NU yang berada di departemen-departemen, termasuk Departemen Agama. Selepas pemilu NU juga kehilangan jatah Menteri Agama—yang selama sebelumnya (secara adat politik) selalu diangkat dari tokoh NU. Sementara kali ini diduduki seorang teknokrat, yaitu Profesor Mukti Ali.<sup>41</sup>

Hasil pemilu 1971 adalah barometer bagi Soeharto untuk mengukur kekuatan Islam politik, terutama NU. Pada 1973, Soeharto dan rezim Orde Barunya benar-benar menjalankan strategi politiknya, yaitu menerbitkan aturan strukturisasi partai politik melalui UU No. 3 Tahun 1973. Partai-partai Islam ideologis dengan terpaksa menerima (menormalisasi) aturan strukturisasi tersebut. Pada 5 Januari 1973, NU, PSII, Perti, dan Parmusi sepakat melakukan fusi menjadi satu partai. Idham Chalid mewakili NU, Anwar Cokroamionoto mewakili PSSI, Rusli Halil mewakili Perti, dan Mohammad Syafaat Mintareja mewakili Parmusi. Keempat tokoh menandatangani deklarasi berdirinya partai Islam dengan nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Turmudi, *Struggling for the Umma* ..., 115-116.

<sup>41</sup> Turmudi, *Struggling for the Umma* ..., 116.

<sup>42</sup> Darmawijaya, “Islam dan Kekuasaan Orde Baru: ...”, 75.

Selain Islam politik yang terkena imbas aturan strukturalisasi. Partai dengan ideologi nasionalis dan partai keagamaan non-Islam juga dengan terpaksa menjalani (normalisasi) aturan tersebut dengan segera melakukan fusi. Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (Partai IPKI), Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Partai Murba), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katolik melakukan musyawarah untuk segera melakukan fusi. Hasil dari pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan berdirinya Partai Demokrasi Indonesia (PDI).<sup>43</sup>

Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1973 yang dikuatkan dengan TAP MPR No. VIII 1973 yang berisi jadwal pemilu 1977 dengan peserta dua Golongan Politik dan satu Golongan Karya.<sup>44</sup> Sejak saat itu, praktis hanya ada tiga peserta pemilu di tahun berikutnya. Tiga peserta itu adalah PPP, PDI, dan Golkar.<sup>45</sup> Dengan berfusnya partai-partai politik, termasuk partai politik Islam, telah menunjukkan keberhasilan Soeharto dan rezim Orde Barunya dalam menjinakkan dan menggemposi kekuatan Islam politik. Demi tujuan mempertahankan hegemoni kekuasaan.

Puncaknya, rezim Orde Baru menegaskan pengesahan aturan fusi partai politik dengan UU No. 3 tahun 1975. Isi dari konsideran Undang-Undang ini berbunyi:

<sup>43</sup> Retanisa Rizqi, "Efektifitas Penyederhanaan Partai Politik Era Orde Baru", *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol 1 No 3, (Juli, 2022), 207.

<sup>44</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 Tahun 1973 Tentang Pemilu.

<sup>45</sup> Rizqi, "Efektifitas Penyederhanaan Partai Politik ...", 207.

- a) Bahwa dalam rangka penyederhanaan dan pendayagunaan kehidupan politik, dewasa ini organisasi-organisasi kekuatan sosial politik yang telah ada, telah mengelompokkan diri menjadi dua Partai Politik dan satu Golkar, seperti yang telah dinyatakan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
- b) Bahwa dengan adanya tiga organisasi kekuatan sosial politik tersebut. Diharapkan agar dua Partai Politik dan Golkar benar-benar dapat menjamin terpeliharanya persatuan dan kesatuan Bangsa, (terpeliharanya) stabilitas nasional, serta terlaksananya percepatan pembangunan.<sup>46</sup>

Pada pemilu 1977, hasil perolehan suara masih menegaskan Golkar sebagai kendaraan yang bertugas mempertahankan kekuasaan Soeharto dan rezim Orde Baru dengan 62.11% suara. PPP sebagai partai gabungan partai-partai Islam hanya mendapat 29.29% suara. Sedangkan PDI hanya 8.60% suara.<sup>47</sup>

Tabel 3.3  
Perolehan Suara Nasional Pemilihan Umum Tahun 1977

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1	Golongan Karya	62.11%
2	Partai Persatuan Pembangunan	29.29%
3	Partai Demokrasi Indonesia	8.60%

<sup>46</sup> Rizqi, "Efektifitas Penyederhanaan Partai Politik ...", 208.

<sup>47</sup> KPU RI, "Pemilu 1977", dalam <https://kab-bandung.kpu.go.id/page/read/65/pemilihan-umum-tahun-1977> (1 November 2022), 1.

Tidak berhenti begitu saja. Setahun setelah pemilu 1977. Pada Maret 1978, rezim Orde Baru melalui MPR segera mengeluarkan aturan pemilu yang sangat mengikat partai-partai. TAP MPR tersebut menetapkan bahwa pemilu akan diadakan pada tahun 1982. Peserta pemilu pun tetap sama, yaitu dua Golongan Politik dan satu Golongan Karya.<sup>48</sup> Dengan aturan tersebut, praktis PPP dan PDI hanya akan menerima aturan yang telah ditetapkan. Begitu pun dengan Umat Islam tidak memiliki ruang dan waktu untuk sekadar beraspirasi mendirikan partai baru.

## 2) Strukturisasi Organisasi Masyarakat Islam

Tidak hanya partai politik Islam yang terkena imbas aturan strukturisasi rezim Orde Baru. Soeharto dan rezim Orde Baru juga melakukan strukturisasi organisasi masyarakat Islam dengan membentuk Lembaga Masyarakat baru. Pada 26 Juli 1975, pemerintah membentuk Majelis Ulama' Indonesia. MUI beranggotakan dari pelbagai organisasi masyarakat Islam yang ada di Indonesia, termasuk Muhammadiyah dan NU. MUI sendiri memiliki empat rumusan fungsi, antara lain:

- a) Memberi bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat
- b) Memberi nasihat dan fatwa kepada pemerintah dan masyarakat
- c) Menjadi penghubung antara umara' (pemerinta) dan ulama'.

---

<sup>48</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1978 Tahun 1978 tentang Pemilihan Umum.

d) Meningkatkan kerjasama antar organisasi Islam, lembaga Islam, dan cendekiawan muslim.<sup>49</sup>

Tujuan Presiden Soeharto mendirikan MUI adalah sebagai bentuk komitmennya dalam menjaga stabilitas negara demi jalannya proses pembangunan. Presiden Soeharto ingin agar MUI mengurus seluruh persoalan Umat Islam. Oleh karena itu, aturan utamanya adalah setiap urusan Umat Islam harus melalui MUI dan Umat Islam keseluruhan harus mematuhi (menormaslisasi) apa pun hasil yang dikeluarkan MUI. Jika tidak, maka harus berhadapan dengan Soeharto dan rezim Orde Barunya.<sup>50</sup> Sementara Umat Islam sendiri menganggap tujuan pendirian MUI adalah sebagai usaha ‘pengebirian’ ulama’ dan cendekiawan muslim, serta sebagai alat pembatas pergerakan Umat Islam.<sup>51</sup> Terutama sebagai usaha dalam menjinakkan organisasi-organisasi Islam yang ada.

### 3) Asas Tunggal

Setelah berhasil dengan aturan strukturalisasinya. Soeharto dan rezim Orde Baru menyempurnakan mesin politiknya dengan menerbitkan aturan kebijakan “Pancasila sebagai Asas Tunggal” yang sangat menyinggung Umat Islam dan sekaligus merepotkan Islam politik.<sup>52</sup> Tampaknya, melalui aturan itu, rezim Orde Baru masih membutuhkan dukungan Umat Islam dalam upaya pambungan

<sup>49</sup> Ahmad Insyah Ansori dan Moh. Ulumuddin, “Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa di Indonesia”, *Jurnal Mahkamah*, Vol 5 No 1 (2020), 37-38.

<sup>50</sup> Putra, “Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru”, 197.

<sup>51</sup> Subekty, Wibowo et.al, “Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 dan Relevansinya dalam Pembelajaran Sejarah”, *Jurnal Candi*, Vol 17 No 1 (2018), 86.

<sup>52</sup> Effendy, *Islam dan Negara ...*, 141-143.

ekonomi. Dengan aturan Asas Tunggal, pemilih Islam akan memandang PPP dan Ormas Islam sama halnya dengan Golkar dalam segi ideologi.

Fraksi Golkar yang pertama kali mengusulkan wacana ini dalam Sidang Umum MPR tentang penggunaan Pancasila sebagai asas tunggal kepada setiap organisasi politik. Wacana ini sempat mendapat penolakan dari PPP sebagai partai Islam.<sup>53</sup> Akan tetapi, bagi Soeharto dan Rezim Orde Baru penerapan aturan Pancasila sebagai Asas Tunggal harus segera dijalankan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam membendung perkembangan gerakan politik kelompok *extreme* kanan (Islam) dan *extreme* kiri (komunis).

Sementara menurut Faisal Ismail, upaya pemerintah menerapkan Asas Tunggal disebabkan karena situasi dan kondisi politik di dalam dan luar negeri yang berpotensi mengancam stabilitas negara.<sup>54</sup> Setidaknya ada tiga faktor, antara lain:

a) Gerakan Sparatis dalam Negeri

Kondisi politik dalam negeri juga menjadi pertimbangan penting Soeharto dan Rezim Orde Baru untuk sesegera mungkin menerapkan kebijakan Asas Tunggal. Pelbagai gerakan sparatis dari kelompok yang mengatasnamakan Islam mulai bermunculan, seperti pada 1976, lahir gerakan sparatis pimpinan Hasan Tiro yang menginginkan Aceh merdeka atau Gerakan Aceh Merdeka (GAM),

<sup>53</sup> Hasanuddin M. Saleh, HMI dan Reayasa Asas Tunggal Pancasila (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). Dalam Yusup, "Respon Kristen Terhadap Kebijakan Asas Tunggal ...", 4.

<sup>54</sup> Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), 191.

gerakan anti pemerintah dari Abdul Qadir Djaelani (Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam 1976-1978 dan 1982-1984), gerakan sparatis dari Komando Jihad Haji Ismail Pranoto (1976), gerakan sparatis dengan tujuan melakukan pemberontakan dari Dewan Revolusi Islam yang muncul di Cicendo (1981).

b) Kebangkitan Islam di Iran

Pada masa itu juga sedang terjadi revolusi besar-besaran di Iran. Pada 1978-1979, Kelompok Fundamentalisme Kanan melakukan serangkaian aksi yang pada akhirnya berhasil mengambil alih pemerintahan Iran. Hal tersebut yang menjadikan Soeharto dan Rezim Orde Baru merasa khawatir bila peristiwa tersebut akan menyulut semangat kelompok Islam Fundamentalisme Kanan di Indonesia, sehingga bisa saja terjadi gerakan revolusi yang sama. Oleh karena itu, Soeharto dan Rezim Orde Baru merasa perlu sesegera mungkin menerapkan kebijakan Asas Tunggal sebagai langkah pencegahan.

c) Isu Kebangkitan PKI

Pembaharuan strategi politik PKI yang dari awal menjadi musuh besar Soeharto dan rezim Orde Baru adalah salah satu sebab Soeharto dan Rezim Orde perlu sesegera mungkin menerapkan kebijakan Asas Tunggal. Pada masa itu, rezim Orde Baru mencium pergeseran strategi politik dari *ex* PKI, yaitu lebih akomodatif

terhadap sistem kapitalisme. Gerakan PKI yang baru juga menyusup ke dalam birokrasi-birokrasi.<sup>55</sup>

Selanjutnya pada 1977, pemerintah mengajukan wacana tentang perlunya P4, yaitu Pedoman Pengamalan dan Penghayatan Pancasila sebagai pendukung aturan Asas Tunggal. Pada 1978, wacana P4 diterima oleh MPR melalui ketetapan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).<sup>56</sup> Pada 30 Agustus 1982, Abdul Gafur (Menteri Pemuda dan Olahraga ke 4) menghadap Presiden Soeharto. Setelah itu, ia mengeluarkan wacana kepada publik bahwa Pancasila sebagai Asas Tunggal sangat perlu untuk tidak hanya diterapkan pada partai politik, namun perlu juga diberlakukan bagi setiap organisasi kemasyarakatan. Pada 1983, Pancasila sebagai Asas Tunggal resmi masuk dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor 2 tentang GBHN dalam bab Arah dan Kebijaksanaan Pembangunan Umum, sub bab Politik, Aparatur Pemerintah, Hukum, Penerangan dan Media Masa, Hubungan Luar Negeri, dalam Nomor 1 (politik) dari point C dan F.<sup>57</sup>

Point C berisi tentang usaha mewujudkan kehidupan politik yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sehingga perlu upaya untuk lebih mengenalkan P4 kepada masyarakat melalui sarana pendidikan, penataran, dan usaha-usaha lainnya di seluruh lapisan

<sup>55</sup> Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama...*, 191.

<sup>56</sup> Muh. Syamsuddin, "Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru", *Jurnal Dakwah*, Vol 9 No 2 (Juli-Desember 2010), 150.

<sup>57</sup> Lukman Haru, *Muhammadiyah dan Asas Tunggal* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1986), 35. Dalam Yusup, "Respon Kristen Terhadap Kebijakan Asas ...", 5.

masyarakat. Sedangkan point F berisi tentang peran kekuatan sosial politik, khususnya Partai Politik dan Golkar, sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta sebagai modal utama pembangunan nasional. Demi melestarikan dan mengamalkan Pancasila, maka Partai Politik dan Golkar harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang berdasarkan Pancasila sebagai satu-satunya asas.<sup>58</sup>

Pada 20 Oktober 1983, Presiden Soeharto yang memberi sambutan dalam Musyawaran Nasional Golkar yang ketiga juga menggaungkan wacana bahwa setiap organisasi kemasyarakatan harus menggunakan Pancasila sebagai Asas Tunggal. Masih pada 1983, pemerintah mengajukan dua Rancangan Undang-Undang tentang partai politik dan keorganisasimasyarakatan sebagai aturan tambahan demi berjalannya aturan Pancasila sebagai Asas Tunggal. Akhirnya, pada 19 Februari 1985, Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua partai politik benar-benar ditetapkan melalui Undang-Undang No. 3 tahun 1985.

Pada Juni 1985, penerapan Pancasila sebagai Asas Tunggal bagi semua organisasi kemasyarakatan juga ditetapkan melalui Undang-Undang No.8 tahun 1985.<sup>59</sup> Pada 4 April 1986, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 18 sebagai bentuk tindak lanjut terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 8/1985. Dalam Peraturan

---

<sup>58</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 Tahun 1978 tentang Pemilihan Umum.

<sup>59</sup> Syamsuddin, "Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru", 150.

Pemerintah tersebut tercantum dalam pasal 3 ayat 2 dan 3 bahwa setiap organisasi kemasyarakatan wajib mencantumkan “Pancasila sebagai satu-satunya asas” dengan catatan, yaitu meski kata ‘asas’ memiliki makna lain sebagai ‘landasan’ atau ‘dasar’ atau ‘pedoman pokok’, tetapi tetap tiga kata tersebut tidak dapat menggantikan kalimat ‘satu-satunya asas’. Pemerintah juga mewajibkan kepada setiap organisasi kemasyarakatan yang sudah berdiri untuk melaporkan masing-masing organisasinya terkait peraturan pemerintah tersebut selambat-lambatnya pada 17 Juni 1987.<sup>60</sup> Bila tidak, maka siap untuk dibubarkan.

Tentu Soeharto dan rezim Orde Baru memiliki pengetahuan bahwa jantung Islam politik dan Islam Organisasi berada di dalam ideologinya. Aturan Asas Tunggal telah menyentuh hal paling dasar bagi Umat Islam, yaitu Islam sebagai ideologi. Aturan yang sangat melemahkan Umat Islam. Aturan fundamental yang sangat baru dalam perjalanan politik bangsa Indonesia. Bahkan pada masa penjajahan, pemerintah kolonial tidak melarang untuk menjadikan Islam sebagai asas organisasi politik atau pun sosial.<sup>61</sup> Penerapan Pancasila sebagai Asas Tunggal yang berimbas kepada Partai Islam dan Organisasi Kemasyarakatan Islam ini bisa disebut sebagai upaya ‘Deislamisasi’<sup>62</sup> atau ‘Depolitisasi Islam’.<sup>63</sup> Menurut Taufiq Abdullah bahwa dengan

<sup>60</sup> Weinata Sairin, *Himpunan Peraturan Di Bidang Keagamaan* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 178. Dalam Yusup, “Respon Kristen Terhadap Kebijakan Asas Tunggal Pancasila Era Orde Baru”, *Shalom: Jurnal Theologi Kristen*, Vol 1 No 1 (2021), 6.

<sup>61</sup> Darmawijaya, “Islam dan Kekuasaan Orde Baru: ...”, 75.

<sup>62</sup> Samudra Eka Cipta dan Taufan Sopian Riyadi, “Relevansi Pemahaman Islam Madzhab Ciputat & Himpunan Mahasiswa Islam Terhadap Perkembangan Tradisi Keilmuan dan Gerakan Pemikiran”, *El Tarikh*, Vol 1 No 2 (2020), 35.

<sup>63</sup> Syamsuddin, “Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru”, 150.

penerapan Pancasila sebagai Asas Tunggal bagi semua partai politik, tidak terkecuali PPP sebagai partai representatif Islam, merupakan sebuah *last page* (halaman terakhir) dari sejarah Islam politik di Indonesia.<sup>64</sup>

## 2. Periode Akomodatif

Pada 1978, Golkar sudah mulai bertindak akomodatif terhadap Islam dengan ‘berkenan’ mendirikan organisasi sayap yang bercirikan Islam, yaitu Majelis Dakwah Islamiyah (MDI). Pendirian ini bertujuan untuk membantu menghilangkan sisa-sisa pemikiran yang mempertentangkan agama dan Pancasila yang dapat memperlambat pembangunan. Soeharto sendiri menginginkan agar MDI dapat menjadi pelopor ‘dakwah pembangunan’ mengajak Umat Islam secara *ukhuwah Islamiyah* ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara.<sup>65</sup> Akan tetapi, sangat disayangkan MDI belum bisa menjadi barometer atas perbaikan hubungan antara rezim Orde Baru dengan Islam politik. Sebab pada umumnya Umat Islam menganggap bahwa anggota MDI sebagai orang Islam yang membelot ke Golkar.<sup>66</sup>

Para cendekiawan Islam merumuskan adanya indikasi perbaikan hubungan antara rezim Orde Baru dengan Islam politik baru terjadi pada pertengahan 1980-1990. Keduanya saling akomodatif dan integratif. Tanda dari perbaikan hubungan ini adalah longgarnya wacana politik dan adanya

<sup>64</sup> Firdaus A.N, *Dosa-Dosa Politik Orde Lama dan Orde Baru Yang Tidak Boleh Berulang Lagi Di Era Reformasi* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1999), 122.

<sup>65</sup> DPD MDI Riau, “Majelis Dakwah Islamiyah”, dalam <https://golkarriau.com/web/site/ormas-sayap/majelis-dakwah-islamiyah-mdi.html> (9 November 2022), 1.

<sup>66</sup> Seperti halnya Kiai Musta’in Romli yang dianggap sebagai muslim yang membelot dari Islam politik. Kiai Musta’in juga pernah menjabat sebagai wakil ketua DPP MDI pada 1984-1985.

kebijakan yang bergerak positif sejalan bagi Umat Islam. Kebijakan-kebijakan tersebut bersifat struktural, legislatif, infrastuktural, dan kultural.<sup>67</sup>

a. Struktural

Pertama, dalam hal struktural, akomodatifnya berupa semakin banyaknya aktivis Islam yang bisa (diperbolehkan) mengintegrasikan diri ke dalam sistem kenegaraan melalui pelbagai saluran; eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan pada pertengahan 1980an, banyak para aktivis Islam yang berhasil menempati jabatan-jabatan penting dalam kebirokrasian dan juga di dalam Golkar.<sup>68</sup>

b. Legislatif

Pemerintah Orde Baru mulai menerbitkan beberapa undang-undang yang sangat akomodatif bagi kepentingan Umat Islam terutama Islam politik. Pada 1989, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUPN). Pada tahun yang sama, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA). Pada 1991, terbitnya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada tahun yang sama, terbit Surat Keputusan Nomor 100/C/Kep/D/1991 berkenaan dengan pembolehan pemakaian jilbab/kerudung bagi siswi di lembaga pendidikan menengah. Masih pada tahun yang sama, terbit Surat Keputusan Bersama tingkat menteri tentang Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh (BAZIS). Pada

---

<sup>67</sup> Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara - Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), 273.

<sup>68</sup> Efendy, *Islam dan Negara ...*, 276.

1993, terbit kebijakan penghapusan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB).<sup>69</sup>

c. **Infrastuktural**

Adanya kepedulian Pemerintah Orde Baru perihal ketersediaan sarana dan infrastruktur bagi Umat Islam dalam menjalankan ritual keagamaan. Soeharto dan rezim Orde baru mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila—yang memiliki tingkat keberhasilan cukup tinggi dalam membangun ratusan masjid. Disusul dengan kebijakan memberikan sponsor Majelis Ulama Indonesia untuk mengirim da'i-da'i Islam ke pelbagai pelosok daerah, terutama daerah transmigrasi di Indonesia.<sup>70</sup>

d. **Kultural**

Dalam hal ini bisa diketahui dari diterimanya penggunaan idiom-idom yang berbau Islam dalam kosakata dan instrumen-instrumen politik, seperti Sultan, Sayiddin, Khalifatullah, dan lain sebagainya. Diterimanya juga penggunaan idiom-idom berbau Islam dalam instrument ideologi negara, seperti adil, adab, musyawarah, hikmah, rakyat, dan wakil. Serta diterimanya penggunaan idiom-idom berbau Islam dalam penggunaan nama-nama lembaga negara, seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan Mahkamah Agung. Paling utama adalah pengucapan *assaamua'alaikum* sudah menjadi salam nasional meski sifatnya tidak resmi tertulis dalam peraturan atau undang-undang, karena relatif digunakan oleh presiden dan pejabat-pejabat negara yang lain. Hal-

<sup>69</sup> Efendy, *Islam dan Negara ...*, 278.

<sup>70</sup> Efendy, *Islam dan Negara ...*, 305. Lihat juga Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi* (Yogyakarta : Galang Printika, 2001), 35-36.

hal kecil seperti itu sudah sangat menunjukkan gerakan kultural dari negara sebagai bentuk akomodatif terhadap Islam.<sup>71</sup>

Selanjutnya, terdapat indikasi lain yang menunjukkan perbaikan hubungan antara rezim Orde Baru dengan Islam politik. Antara lain, yaitu:

a. Pendirian ICMI

Pada Desember 1990, Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru memberi persetujuan berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Dalam tubuh ICMI banyak duduk orang-orang dari pegawai pemerintah dan tokoh-tokoh Islam. Bahkan beberapa di antara mereka adalah tokoh yang sebelumnya sering memberikan kritikan tajam kepada Soeharto dan kebijakannya terhadap Islam politik.<sup>72</sup> Bagi Soeharto dan rezim Orde Baru pemberian persetujuan berdirinya ICMI memiliki beberapa alasan. Pertama, Soeharto sudah merasa bisa mengatasi kekuatan Islam politik. Kedua, sebagai bentuk konkret Soeharto dalam menunjukkan perubahan sikap, serta sebagai bentuk keinginan untuk mendekatkan diri kepada Umat Islam dan mengakomodasi kepentingannya.<sup>73</sup>

b. Sertifikasi Halal

Presiden Soeharto dan rezim Orde Barunya juga memperlihatkan perhatian terhadap kepentingan Islam. Pada 1988-1989, pemerintah memberi dukungan kepada MUI dalam menjalankan proyek sertifikasi dan labelisasi halal terhadap makanan, obat, dan komestik. Dukungan ini

<sup>71</sup> Efendy, *Islam dan Negara* .., 306-308.

<sup>72</sup> Ilham Muhammad Nurjaman et.al, "Peran ICMI Masa Kepemimpinan BJ Habibie (1990-2000) dalam Pembangunan Nasional, *Hanifiyah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol 5 No 1 (2022), 60-61.

<sup>73</sup> Putra, "Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru", 192.

sebagai tanggapan dari pemerintah atas keresahan Umat Islam Indonesia tentang temuan kasus makanan yang diduga kuat mengandung babi.

c. Dukungan Terhadap Konferensi dan Forum Islam

Perhatian lain dari Presiden Soeharto terhadap Umat Islam terjadi pada 1990an. Presiden Soeharto menghadiri secara langsung Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (KTT OKI). Presiden Soeharto juga memberi izin kepada Umat Islam apabila ingin menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah dalam pertemuan-pertemuan OKI. Bahkan pada 1996, Indonesia menjadi tuan rumah untuk Forum Islam Internasional dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Sumber Daya Manusia (IFTIHAR).<sup>74</sup>

## C. Kondisi dan Sikap Umat Islam Terhadap Politik Islam Orde Baru

### 1. Sikap Terhadap Penolakan dan Intervensi Islam Politik

Dari hambatan yang diterima kelompok Islam modernis untuk merehabilitasi Masyumi, penolakan pendirian PDII, dan pendiktean berdirinya Parmusi. Terjadi perpecahan pemikiran untuk menyelamatkan Islam politik di antara intelektual muslim Indonesia. Perpecahan pemikiran muncul menjadi dua arus besar. Terdapat intelektual yang memiliki terobosan pemikiran baru, namun tidak sedikit yang masih mempertahankan pemikiran lama.

Pertama, pemikiran sekularisasi, memisahkan Islam dengan bentuk partai politik. Pemikiran ini salah satunya datang dari Nurcholis Madjid

---

<sup>74</sup> Putra, "Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru", 194-195.

dengan semboyan “Islam? Yes, Partai Islam? No”.<sup>75</sup> Nurcholis Madjid merasa Umat Islam harus menyesuaikan diri dengan kondisi politik Indonesia di bawah kendali Presiden Soeharto dan rezim Orde Barunya yang sangat otoriter. Jika tetap ingin memiliki eksistensi dalam politik, maka Umat Islam harus mendesain ulang perjuangannya. Umat Islam harus berkomitmen kepada nilai-nilai Islam, bukan berkomitmen kepada lembaga-lembaga Islam, apalagi kepada partai Islam.<sup>76</sup> Pemikiran Nurcholis Madjid cenderung menormalisasi kebijakan otoriter dari rezim yang berkuasa. Meski pemikiran tersebut memang sangat logis di tengah kondisi Islam politik yang serba sulit.

Kedua, mempertahankan religiusitas, tidak bisa dipisahkannya antara Islam dengan politik. Pemikiran ini salah satunya datang dari Mohammad Rasjidi yang mengatakan bahwa sudah sejak masa kolonial, Umat Islam memperjuangkan agar tidak memisahkan antara Islam dengan politik. Muhammad Rasjidi dan Daud Rasyid menerangkan bahwa ide sekularisasi bertentangan dengan syariat Islam dan tidak sesuai dengan prinsip kenegaraan dari ulama’ pendiri bangsa. Bahkan Abdul Qadir Djaelain dengan tegas menuduh ide sekulerisasi adalah gerakan deislamisasi dan anti Islam.<sup>77</sup>

## 2. Kondisi dan Sikap Pelaksanaan Pemilu 1971

Respon negatif terhadap penyelenggaraan pemilu 1971 -sebagai pemilu pertama di masa Orde Baru- datang dari partai yang dari awal berdirinya Orde

<sup>75</sup> Nurcholis Nadjid dua kali melontarkan wacana sekulerisasi Islam dalam politik. Pertama, pada 2 Januari 1970, Nurcholis member sambutan dalam acara halal bi halal dengan tema ‘Keharusan Memperbaharui Pemahaman Islam dan Masalah Integrasi Islam’. Kedua, pada 30 Oktober 1972 di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Nurcholis Madjid kembali melontarkan wacana bahwa perlu adanya sekulerisasi Islam dalam politik dan meninggalkan langkah konservatif dan formalistic dalam politik. Lihat Ahmad Ibrahim et.al, *Islam di Asia Tenggara Perkembangan Kontemporer* (Jakarta: LP3ES, 1990), 549.

<sup>76</sup> Effendy, *Islam dan Negara ...*, 170.

<sup>77</sup> Darmawijaya, “Islam dan Kekuasaan Orde Baru: ... ”, 71.

Baru bersikap akomodatif, yaitu NU. Pada 1971, Rois Aam NU, Kiai Wahab Hasbullah dalam muktamar NU ke 25 sampai memberikan isyarat bahwa NU seperti sia-sia menjadi partai politik. Partai NU dan partai Islam lainnya tidak akan bisa memenangkan pemilu yang dalam praktek lapangannya sangat diskriminatif terhadap Islam politik. Tidak jarang simpatisan NU ditangkap, dipukul, dan sampai dihukum. Para tokoh Islam yang memiliki keterikatan dengan NU juga mendapatkan ancaman agar mau meninggalkan NU. Hampir setiap hari ada saja simpatisan NU yang berurusan dengan Baramil, Babinsa, Polisi, Aparat Desa, dan Aparat Kecamatan. Sehingga tidak jarang kader NU memilih sikap untuk keluar dan merapat ke barisan pendukung rezim Orde Baru. Begitu pun dengan simpatisan NU, lebih memilih untuk menyatakan diri sebagai bagian dari barisan pendukung rezim Orde Baru daripada harus menerima intimidasi dan persekusi.<sup>78</sup>

Pondok pesantren sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NU juga tidak luput dari perlakuan kasar rezim Orde Baru. Sebut saja Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. Pondok tersebut sering disatroni aparat dan simpatisan Golkar. Pemimpinnya—Kiai Musta'in diculik tentara. Santri dan jamaahnya dipersekusi dan diintimidasi agar mau ikut Golkar.<sup>79</sup>

Sementara Muhammadiyah memberi respon atas kondisi politik pemilu 1971 dengan seksama mengambil sikap untuk menerbitkan Khittah Politik 1971. Khittah Politik 1971 berisi dua garis perjuangan Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah menyatakan tidak berafiliasi dan tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai politik atau organisasi

<sup>78</sup> Mubarak, "Wacana Islam Dalam Politik Praktis Di Indonesia", 19-28.

<sup>79</sup> Nur Rifa'i, *Wawancara*, Rumah: Jombang, 9 November 2022.

apa pun. Kedua, Muhammadiyah mempersilahkan setiap anggotanya untuk bergabung atau tidak dengan organisasi lain, selama tidak menyalahi aturan Muhammadiyah.<sup>80</sup> Padahal di sisi lain, Muhammadiyah adalah penyokong utama berdirinya Parmusi. Sehingga Khittah Politik 1971 ini, yang mempertegas jarak antara Muhammadiyah dan partai politik, sarat akan kepentingan Muhammadiyah untuk mengamankan warganya dari intimidasi dan persekusi pihak-pihak yang tidak menginginkan kehadiran Islam politik.

### 3. Kondisi dan Sikap NU Terhadap PPP

Partai-partai Islam memang menerima aturan strukturisasi yang kemudian melahirkan PPP. Akan tetapi, dari semua partai Islam, NU menjadi organisasi Islam yang paling menderita selama berada di dalam PPP. NU benar-benar termarginalkan dalam tubuh PPP. Kondisi NU sangat memprihatinkan dalam banyak aspek.

#### a. Ketua Umum PPP Tidak Pernah dari NU

Ketua Umum PPP tidak pernah berasal dari tokoh NU, melainkan berasal dari tokoh-tokoh kalangan rezim Orde Baru. Ketua Umum PPP pertama (1973-1978) Mohammad Syafaat Mintareja adalah utusan Soeharto. Begitu pun dengan Ketua Umum PPP kedua (1978-1989), Djaelani Naro, juga utusan Soeharto. Bahkan yang lebih menyakitkan, intervensi pemerintah yang kedua ini dilakukan tidak melalui jalan Muktamar.<sup>81</sup> Sebelumnya, kedua tokoh ini juga menjadi bidak pemerintah dalam mengintervensi Parmusi, sehingga para tokoh NU tidak begitu

<sup>80</sup> Mubarak, "Wacana Islam Dalam Politik Praktis Di Indonesia", 28.

<sup>81</sup> Gocning, "Politik Nahdatul Ulama dan Orde Baru", 67.

menyukai Djaelani Naro dan Mintareja. Apalagi saat keduanya berhasil menguasai kursi Ketua Umum PPP.<sup>82</sup>

b. PPP Represif Terhadap NU

Para pemangku PPP Non-NU tidak pernah mendengar dan mengindahkan nasihat kiai-kiai NU. Ditambah Djaelani Naro ketika menjabat sebagai ketua umum selalu berlaku sewenang-wenang terhadap NU. Seperti halnya ketika ia dengan sengaja mengganti susunan daftar nama usulan calon legislatif dari faksi NU. Tidak ada jawaban pasti atas kesewenang-wenangan tersebut, malah Djaelani Naro memberi jawaban yang terkesan melecehkan warga NU.<sup>83</sup>

Barisan Kiai NU seperti Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Sahal Mahfudz, Kiai Yusuf Hasyim, dan kiai-kiai lain menyikapi kondisi NU yang sangat termarginalkan dalam tubuh PPP dengan usulan agar NU kembali ke Khittah 1926. Dengan segala pro-kontra dalam internal NU, antara kelompok yang mendukung NU keluar dari politik dan kelompok yang terus menginginkan NU tetap berpolitik, pada akhirnya NU memutuskan untuk menarik lokomotif organisasinya dari politik praktis. Sekaligus menyatakan keluar dari PPP melalui Muktamar ke 27 tahun 1984, di Situbondo.<sup>84</sup> Merespon hasil Muktamar 1984 tersebut, Kiai Yusuf Hasyim yang dari awal sangat geram kepada Djaelani Naro, dengan seksama langsung menggalang santri agar menarik diri dari PPP. Langkah ini

<sup>82</sup> Sukamto, "Kilas Balik Khitah NU ...", 30-31.

<sup>83</sup> Sukamto, "Kilas Balik Khitah NU ...", 30.

<sup>84</sup> Muhammad Eko Subagtio, "Perjalanan Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1973-1984: Keluarnya Nahdlatul Ulama dari Partai Persatuan Pembangunan", *Avatar: e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol 7 No 2 (2019), 27

mampu menggembosi PPP, sehingga perolehan suara PPP dalam pemilu 1987 menjadi merosot tajam.<sup>85</sup>

#### 4. Respon Terhadap Asas Tunggal

Dari awal NU berada pada posisi yang tidak mempertentangkan Islam dan Pancasila. Akan tetapi, NU sempat menunjukkan penolakan ketika rezim Orde Baru menerbitkan gagasan Pancasila sebagai Asas Tunggal bagi organisasi masyarakat. Setelah adanya pendekatan diplomatik dan diskusi-diskusi antara pemerintah dengan sejumlah tokoh NU. Pada akhirnya NU memberi sikap bersedia menerima aturan Asas Tunggal. Pada 1984, pernyataan penerimaan NU terhadap Asas Tunggal yang telah lebih dahulu dibahas dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama, kemudian ditegaskan kembali dalam acara Muktamar ke 27 1984, di Situbondo.<sup>86</sup>

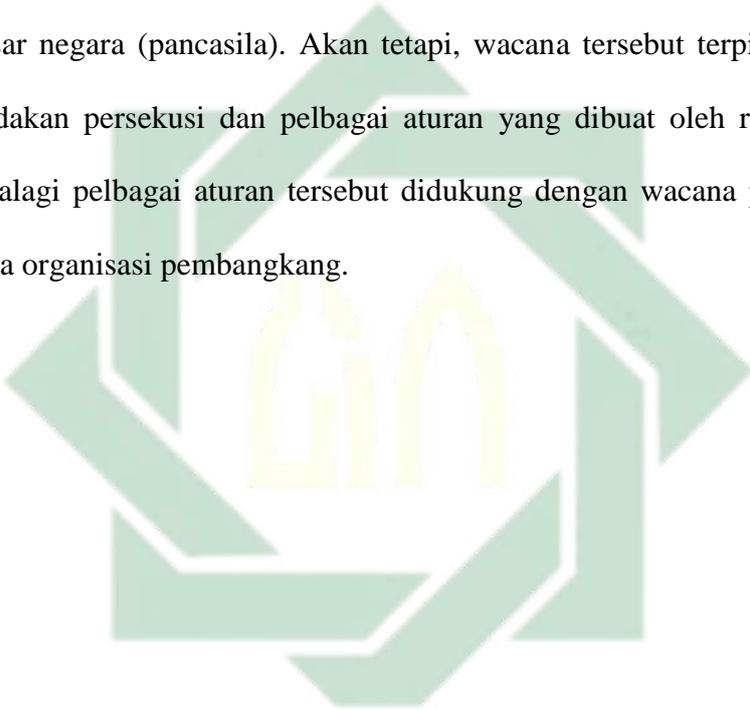
Sementara Muhammadiyah yang juga dari awal berada pada posisi tidak mempertentangkan Islam dan Pancasila merasakan dilematik. Tidak mungkin menolak pemberlakuan Pancasila sebagai Asas Tunggal, tetapi lebih mungkin lagi menghapus asas Islam yang menjadi landasan utama berdirinya Muhammadiyah. Berjalannya waktu Muhammadiyah terus melakukan safari, diskusi, dan lobi-lobi berbagai pihak ; pemerintah dan sesama organisasi masyarakat seperti NU. Akhirnya, Muhammadiyah menjadi organisasi paling akhir yang menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal, yaitu Desember 1985. Muhammadiyah merasa tidak memiliki masalah untuk

<sup>85</sup> Sukamto, "Kilas Balik Khitah NU ...", 30-31.

<sup>86</sup> Subagtio, "Perjalanan Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1973-1984: ...", 27

menjadikan Pancasila sebagai dasar perserikatan -daripada dibubarkan-, namun Islamlah yang tetap menjadi motivasi pergerakan Muhammadiyah.<sup>87</sup>

Padahal NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat Islam yang memiliki andil besar dalam mendirikan Negara Indonesia. Keduanya juga memiliki andil besar saat para pendiri bangsa merumuskan dasar negara (pancasila). Akan tetapi, wacana tersebut terpinggirkan dengan tindakan persekusi dan pelbagai aturan yang dibuat oleh rezim Orde Baru. Apalagi pelbagai aturan tersebut didukung dengan wacana pembubaran bagi para organisasi pembangkang.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>87</sup> Famular, ‘Peran Majalah Suara Muhammadiyah dalam Perjuangan Politik ...’, 240-241.

BAB IV  
PARTISIPASI DAN PEMIKIRAN POLITIK KIAI MUSTA'IN ROMLI  
(1973-1985)

Setelah mengetahui sosok Kiai Musta'in Romli dan memahami kondisi Islam politik yang termarginalkan pada masa Orde Baru. Ternyata terdapat disparitas antara keduanya. Kiai Musta'in Romli yang notabene merupakan tokoh Islam pesantren, mursyid TQN, tokoh NU mendobrak paradigma Islam politik pada masa itu. Ia justru berpartisipasi dalam politik dengan melawan arus Islam politik, yaitu bergabung ke Golkar. Tentu jalan yang Kiai Musta'in Romli ambil memiliki landasan yang kuat dengan segala konsekuensi yang menyertai. Di sisi lain, keputusan berani dari Kiai Mustain Romli juga menghasilkan *positive impact* bagi lembaga dan organisasi yang dipimpinya.

**A. Partisipasi Politik Kiai Musta'in Romli (1973-1985)**

Perlu diketahui bersama tentang fakta sejarah yang belum pernah tertulis di dalam penelitian terdahulu. Hal ini diungkapkan oleh Kiai Cholil Dahlan. Ternyata Soeharto yang telah resmi menjabat sebagai presiden sejak 1968 pernah memiliki agenda kunjungan rahasia ke Pondok Pesantren Darul Ulum pimpinan Kiai Musta'in Romli. Kunjungan tersebut terjadi pada tahun 1970 atau satu tahun sebelum penyelenggaraan pemilu. Dalam pertemuan antara Presiden dan Pimpinan Darul Ulum itu Presiden Soeharto secara gamblang menyampaikan tujuan utamanya mengunjungi beberapa pesantren di Jawa Timur (termasuk Darul Ulum), yaitu ingin menjajaki seberapa jauh dukungan Islam kepada dirinya.<sup>1</sup> Besar kemungkinan dukungan yang dimaksud adalah dukungan terhadap

---

<sup>1</sup> Kiai Cholil Dahlan (Ketua Majelis PPDU), *Wawancara*, Kantor Sekretariat PPDU: Jombang, 9 November 2022.

rezimnya pada pemilu 1971. Kemungkinan kuat dalam pertemuan itu Presiden Soeharto juga meminta Kiai Musta'in Romli agar mau bergabung ke Golkar.

Semula agenda resmi kunjungan hanya sebatas silaturahmi dan pertemuan. Akan tetapi, Kiai Ahmad Badawi yang menjabat sebagai pemimpin Dewan Harian/Sekretaris Darul Ulum secara diam-diam mengumpulkan sekitar 3.000 santri di lapangan voli. Pimpinan Darul Ulum meminta dengan hormat kepada Presiden Soeharto untuk menemui para santri. Akhirnya, presiden pun berkenan memberi sambutan di hadapan santri-santri Darul Ulum.<sup>2</sup> Tindakan ini bisa dinilai sebagai tindakan untuk menunjukkan bahwa Darul Ulum memiliki massa yang besar.

Pada 1971, sebelum pelaksanaan pemilu, Kiai Musta'in Romli yang sedang bercengkrama bersama santri-santrinya pada malam hari di teras rumah (sekarang Pendopo Agung) merasakan firasat akan kedatangan tamu yang berniat jahat. Berselang tidak lama, ternyata firasat itu benar, datang empat mobil tentara berseragam. Mereka menjemput paksa Kiai Musta'in Romli dengan cara memborgol tangannya dan memasukkannya ke dalam mobil. Kemudian mereka membawanya pergi ke arah barat Jombang.<sup>3</sup>

Nyai Jumi'atin yang mengetahui kejadian itu segera menghubungi keluarga Tambakberas (ayahnya Kiai Wahab Hasbullah, pusat kekuatan NU) agar membantu mencari informasi dari Jakarta tentang 'penculikan' Kiai Musta'in Romli. Tidak hanya itu, Nyai Jumi'atin juga secara langsung menelpon Presiden Soeharto, ia meminta agar segera memulangkan suaminya. Jika suaminya tidak

<sup>2</sup> Kiai Cholil Dahlan (Ketua Majelis PPDU), *Wawancara*, Kantor Sekretariat PPDU: Jombang, 9 November 2022.

<sup>3</sup> Nur Rifa'i (Santri senior Kiai Musta'in). *Wawancara*. Rumah: Jombang, 9 November 2022. Nur Rifa'i adalah satu di antara santri yang sedang bercengkrama dengan Kiai Musta'in Romli.

segera dipulangkan, maka Nyai Juma'atin tidak bisa menahan gejolak amarah warga NU, termasuk santri dan jamaahnya.

Nyai Jumi'atin juga meminta bantuan Kolonel Baidlowi (alumni Darul Ulum) untuk mencari suaminya. Berselang satu hari, Kolonel Baidlowi berhasil menemukan Kiai Musta'in Romli yang sedang ditawan di kawasan hutan Saradan, Nganjuk-Madiun Jawa Timur. Setelah melakukan lobi-lobi dengan sesama tentara, Kolonel Baidlowi dan anggotanya kemudian mengantar Kiai Musta'in Romli kembali pulang ke Darul Ulum.<sup>4</sup> Kemungkinan kuat penculikan ini terjadi karena Kiai Musta'in Romli belum memberikan kepastian perihal dirinya mau bergabung ke Golkar atau tidak. Padahal waktu sudah mendekati hari pelaksanaan pemilu 1971.

Setelah peristiwa-peristiwa tersebut, silih berganti tokoh politik dari Jakarta (pusat) dan dari Surabaya (provinsi) datang menemui Kiai Musta'in Romli mengajaknya untuk masuk Golkar.<sup>5</sup> Utusan rezim terus berusaha melakukan *lobbying*. Tampak rezim Orde Baru benar-benar menginginkan Kiai Musta'in Romli bergabung, karena rezim Orde Baru membutuhkan sosok tokoh Islam yang bisa membantu mereka dalam agenda meng-golkar-kan Jawa Timur. Sekaligus dijadikan sebagai pionir/percontohan bagi daerah lainnya.<sup>6</sup>

Fakta sejarah pada kemudian harinya memang Kiai Musta'in Romli bergabung ke Golkar. Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apa saja faktor-faktor hingga proses bergabungnya Kiai Musta'in Romli ke Golkar.

---

<sup>4</sup> Nur Rifa'i (Santri senior Kiai Musta'in). *Wawancara*. Rumah: Jombang, 9 November 2022.

<sup>5</sup> Mahmud Sujuthi, *Politik Tarekat* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 79.

<sup>6</sup> Ma'nuratus Sa'diyah (putri Kiai Musta'in) dan Binhad Nurrahmat (menantu), *Wawancara*, Al Hambra: Jombang, 20 Desember 2022.

## 1. Faktor-Faktor Bergabung ke Golkar

Kiai Musta'in Romli telah menentukan sikap dalam mewujudkan keinginannya terlibat politik praktis yang kemudian mendorong dirinya bergabung ke Golkar. Tentu ada faktor-faktor yang mendorong Kiai Musta'in Romli dalam menentukan sikap. Milbart memiliki konsep berisi dua faktor yang mendorong seseorang berkenan untuk berpartisipasi dalam politik. Salah satunya adalah faktor pendukung yang berisi lima unsur.

### a. Perangsang Politik.<sup>7</sup>

Apabila unsur yang satu ini dicari dalam diri Kiai Musta'in Romli, maka bukanlah karena materi duniawi. Berpolitik untuk kepentingan pribadi dan keluarga, tanpa bergabung dengan Golkar pun materi sudah lebih dari cukup. Sebab Kiai Musta'in Romli bisa mengelolah kebun dan sawahnya. Satu-satunya rangsangan adalah 'perjuangan', memperjuangkan agama Allah dimana pun berada, termasuk di dalam Golkar.<sup>8</sup> Politik adalah perkara mencari cara untuk mencapai tujuan. Apalagi tujuan seorang ulama', selain menyeru kebajikan (dakwah) dan menegakkan kalimat tauhid.<sup>9</sup>

### b. Karakteristik Pribadi.<sup>10</sup>

Kiai Musta'in Romli memang memiliki karakter *intellectual stimulation* dan *idealized influence*. Seseorang yang memiliki karakter *intellectual stimulation* memiliki dorongan dalam dirinya untuk membawa/membuat perubahan yang lebih baik dengan mencari cara-cara

<sup>7</sup> Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, 156.

<sup>8</sup> Muhtadi, "Kiai Musta'in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan...", 130.

<sup>9</sup> Sujuthi, *Politik Tarekat*, 75-78.

<sup>10</sup> Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, 156.

baru. Sedangkan seseorang yang memiliki karakter *idealized influence* memiliki jiwa berani, bertanggung jawab, dan sosok panutan.<sup>11</sup> Begitu pula Kiai Musta'in Romli yang merasakan susahny Islam politik pada masa Orde Baru. Jika Umat Islam tetap menggunakan cara lama, yaitu meng-kotak-an diri dalam Partai Islam, maka kondisi Islam politik tidak akan ada perubahan lebih baik. Sehingga ia dengan penuh keberanian mengambil jalan berbeda dengan arus utama Islam politik dengan bergabung ke Golkar.

c. Karakteristik Sosial.<sup>12</sup>

Kiai Musta'in Romli adalah tokoh Islam pesantren dan mursyid TQN yang memiliki banyak santri, murid, dan jamaah. Ia juga termasuk tokoh NU. Orang terdekatnya juga merupakan tokoh nasional; mertua pertama pernah menjadi anggota Konstituante RI 1950, mertua kedua pendiri NU dan Rais Aam NU (1947-1971).<sup>13</sup> Status sosial tersebut yang menjadikan Kiai Musta'in Romli merasa mengemban tanggung jawab melindungi santri dan jamaahnya. Oleh karena itu, dengan menjadi tokoh nasional dari Golkar, ia bisa membantu santri dan jamaahnya terjauh dari perlakuan diskriminatif dan persekusi dari rezim Orde (aparap pemerintah, aktivis, dan simpatisan Golkar Baru). Seperti yang terjadi pada pemilu 1971, perlakuan kasar rezim turut menyasar santri Darul Ulum dan jamaah TQN. Memaksa mereka agar mau bergabung ke Golkar.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Shalahuddin, "Karakteristik Kepemimpinan Transformasional", 51.

<sup>12</sup> Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, 156.

<sup>13</sup> Lihat Bab II, Sub Bab A, Point 3b.

<sup>14</sup> Nur Rifa'in menceritakan bahwa ia dan teman-temannya mendapat perlakuan kasar dari rezim agar mau bergabung ke Golkar. Setiap peristiwa itu terjadi mereka selalu bersembunyi di belakang Kiai

d. Unsur Situasi Politik<sup>15</sup>

Pada masa Orde Baru, situasi politik secara penuh dikendalikan Soeharto dan rezimnya yang militeristik, serta Golkar sebagai kendaraan politik. Sedangkan Islam politik sudah tidak memiliki kekuatan yang mumpuni. Tidak ada yang bisa diharapkan dari partai Islam pada masa itu. Dalam tubuh Partai NU saja sudah berhembus usulan untuk mengembalikan NU menjadi *jam'iyah dinniyah*.<sup>16</sup> Ditambah lagi pemerintah sudah mewacanakan strukturisasi partai politik. Berkaca pada sejarah, NU pernah mengalami konflik internal saat masih berada di dalam Masyumi. Tidak menuntut kemungkinan hal yang sama akan terjadi dengan berlakunya fusi partai.<sup>17</sup>

Pasca diberlakukannya fusi partai, tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari partai Islam dan partai nasionalis yang lain. PPP dan PDI ada hanya untuk formalitas demokrasi belaka. Bila berada di dalam keduanya, maka mustahil untuk melakukan hal-hal yang besar. Golkar dengan sokongan logistik dan militer rezim tetap akan menjadi penguasa. Oleh sebab itu, Kiai Musta'in Romli praktis hanya melihat *the only way*—jalan tunggal agar bisa menyelamatkan Islam, yaitu Golkar.

---

Musta'in Romli. Nur Rifa'i (Santri senior Kiai Musta'in). *Wawancara*. Rumah: Jombang, 9 November 2022.

<sup>15</sup> Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, 156.

<sup>16</sup> Sukamto, "Kilas Balik Khitah NU ...", 26-27

<sup>17</sup> Kedepannya memang benar terjadi konflik NU dan PPP. Lihat Turmudi, *Struggling for the Umma ...*. Lihat juga Sukamto, "Kilas Balik Khitah NU ...". Tulisan mereka berdua paling mewakili gambaran konflik NU dan PPP.

e. Unsur Pendidikan Politik<sup>18</sup>

Selain mendapat pendidikan politik dari pengalaman organisasi kepemudaan. Kiai Musta'in Romli juga mendapat pendidikan politik dari bapaknya. Setiap ada tokoh yang berkunjung ke Darul Ulum. Bapaknya selalu memberikan motivasi kepada Musta'in Romli agar bisa menjadi tokoh nasional yang bermanfaat.<sup>19</sup>

Di sisi lain, ketika memimpin Darul Ulum, Kiai Musta'in Romli mendapati pendidikan Islam tidak bisa bergerak pada masa Orde Baru. Pemerintah menunjukkan kesan yang sangat tidak memperhatikan (dana tidak mengalir ke) lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan pondok pesantren. Oleh karena itu, menurut Kiai Cholil Dahlan salah satu faktor dari merapatnya Kiai Musta'in Romli ke rezim Orde Baru adalah untuk kebaikan lembaga pendidikan. Sementara pada masa itu, hanya Golkar sebagai kendaraan politik pemerintah yang ideal dalam menjembatani dirinya mencapai dua tujuan tersebut.<sup>20</sup>

2. Periodisasi Politik Praktis

Penentuan sikap Kiai Musta'in Romli bergabung ke Golkar tampaknya penuh dengan pertimbangan, kehati-hatian, dan tidak terburu-buru. Kiai Musta'in Romli banyak melakukan diskusi dengan berbagai tokoh, seperti Kiai Cholil Dahlan (Darul Ulum),<sup>21</sup> Ki Suwaru (Lurah Mojoagung, Jombang),

<sup>18</sup> Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, 156.

<sup>19</sup> Gus Lukman Hakim. (Putra Kiai Musta'in Romli/ Pembina Yayasan UNDAR). *Wawancara*. UNDAR: Jombang, 4 Desember 2022. Lihat lagi bab 2 dalam sub bab *experienced*.

<sup>20</sup> Kiai Cholil Dahlan (Ketua Majelis PPDU), *Wawancara*, Kantor Sekretariat PPDU: Jombang, 9 November 2022.

<sup>21</sup> Diskusi yang berlangsung Kiai Musta'in Romli bertanya, "Cholil, bagaimana seumpama paman ikut Golkar?". Kiai Cholil Dahlan pun menjawab dengan beberapa masukan, "pertama, pasti ada resiko yang melibatkan Darul Ulum dan TQN, karena tentu dukungan wali santri dan jamaah TQN masih ke

Kiai Imam Sarang,<sup>22</sup> dan lain-lain. Terbukti Kiai Musta'in Romli tidak sembarangan memilih waktu memproklamirkan diri bergabung ke Golkar. Muhtadi dalam disertasinya menjelaskan bahwa Kiai Musta'in Romli bergabung ke Golkar dengan dua fase; sembunyi-sembunyi dan terang-terangan.

a. Fase Sembunyi-Sembunyi (1973-1975)

Ada dua pendapat yang menjelaskan keterlibatan Kiai Musta'in Romli dalam politik praktis. Pendapat pertama menjelaskan bahwa Kiai Musta'in Romli pertama kali terlibat dalam politik praktis dengan langsung bergabung ke Golkar pada 1973. Pendapat kedua menjelaskan bahwa Kiai Musta'in Romli terlebih dahulu bergabung ke PPP, sebelum merapat ke Golkar.<sup>23</sup> Seperti halnya Endang Turmudi yang menjelaskan bahwa Kiai Musta'in beralih kesetiannya dari PPP ke Golkar pada 1977.<sup>24</sup>

Agaknya pendapat pertama lebih kuat, sedangkan pendapat kedua lemah karena dua sebab; 1) Endang Turmudi tidak menunjukkan kapan pertama kali Kiai Musta'in Romli aktif di PPP, sedangkan tahun 1977 yang ia tunjukkan adalah masa-masa sekitar pemilu ke dua pada masa Orde Baru. 2) PPP baru berdiri pada 1973. Oleh karena itu, tidak mungkin

---

PPP yang sama-sama berasaskan Islam. Kedua, lembaga pendidikan formal yang susah pada masa ini (orde baru) butuh dukungan Golkar (pemerintah) dari segi operasional. Kiai Cholil Dahlan (Ketua Majelis PPDU), *Wawancara*, Kantor Sekretariat PPDU: Jombang, 9 November 2022.

<sup>22</sup> Soraya Dimiyathi, "Mengapa di masa Orba pemimpin Darul Ulum memilih Golkar?", dalam [https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid037kZk8tDqDq2Bb1bAyjPPDYqpv7zvuoiCjugU2tYdNvVwVELPkJ46nmfwEkBNwsn8l&id=1831435197](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid037kZk8tDqDq2Bb1bAyjPPDYqpv7zvuoiCjugU2tYdNvVwVELPkJ46nmfwEkBNwsn8l&id=1831435197) (11 November 2022), 1. Kiai Imam Sarang adalah teman diskusi Kiai Musta'in Romli. Kurang lebih diskusi mereka seperti ini, "Kiai Musta'in. Mungkin atau tidak mengajak Pak Suharto masuk ke dalam tarekat? Pasti tidak mungkin kita bilang Mari Pak Harto, anda yang masuk tarekat saja'. Hal itu Mustahilkan?". Kiai Imam Sarang akhirnya juga masuk Golkar bersama Kiai Musta'in Romli.

<sup>23</sup> Muhtadi, "Kiai Musta'in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan...", 127.

<sup>24</sup> Turmudi, *Struggling for the Umma* ..., ix.

dalam waktu yang sama, Kiai Musta'in Romli berada di PPP pada 1973 dan juga bergabung ke Golkar pada 1973.

Dalam menghadapi perbedaan pendapat tersebut, tesis ini memiliki pandangan sendiri, yaitu Kiai Musta'in Romli terlebih dahulu berada di (Partai) NU sebelum bergabung ke Golkar. Pendapat ini didukung dengan cerita Kiai Cholil Dahlan yang pernah menemani Kiai Musta'in Romli dalam acara kampanye NU yang sedang menghadapi pemilu 1971 di Pamekasan.<sup>25</sup> Pendapat ini juga didukung Endang Turmudi sendiri bahwa Kiai Musta'in Romli pernah memimpin NU (sebagai partai) Cabang Jombang pada 1963 menggantikan Kiai Masduqi Zain.<sup>26</sup>

Terdapat hal menarik dengan bergabungnya Kiai Musta'in Romli ke Golkar. Ia pertama kali bergabung dengan cara sembunyi-sembunyi. Maksud dari sembunyi-sembunyi dalam hal ini adalah tidak serta-merta menyatakan diri ke publik, sehingga membuat goncang Islam politik. Terutama jamaah dan santrinya, serta Umat Islam pada umumnya. Tentu keputusan Kiai Musta'in Romli bergabung ke Golkar secara sembunyi-sembunyi memiliki landasan pertimbangan yang kuat. Muhtadi dalam disertasinya juga menjelaskan bahwa Kiai Musta'in Romli sangat penuh pertimbangan dan kehati-hatian sebelum menyatakan diri bergabung ke Golkar secara terang-terangan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Kiai Cholil Dahlan (Ketua Majelis PPDU), *Wawancara*, Kantor Sekretariat PPDU: Jombang, 9 November 2022., Pendapat ini juga diamini H. Lukman Hakim, S. H., M. Hum (Putra Kiai Musta'in Romli/ Pembina Yayasan UNDAR), *Wawancara*, UNDAR: Jombang, 4 Desember 2022.

<sup>26</sup> Turmudi, *Struggling for the Umma ...*, 105.

<sup>27</sup> Muhtadi, "Kiai Musta'in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan ...", 127-128.

Tampaknya aspek-aspek berikutlah yang menjadi landasan pertimbangan Kiai Musta'in Romli bergabung ke Golkar dengan cara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu dari 1973 hingga 1975..

#### 1) NU Babak Belur

Sebelum pemilu 1971, sudah beredar wacana kebijakan strukturalisasi partai politik. Tentu kebijakan ini adalah upaya rezim Orde Baru untuk menggembosi NU. Ternyata benar, meski kebijakan strukturalisasi belum diberlakukan pada pemilu 1971, Partai NU benar-benar sudah merasakan babak belur dalam perolehan suara. Begitu juga simpatisan NU juga babak belur akibat intimidasi dan persekusi dari berbagai komponen pendukung rezim Orde Baru, termasuk simpatisan Golkar, aparat pemerintah, kepolisian, dan tentara.<sup>28</sup>

Pasti kondisi psikologi politik NU menjadi pertimbangan utama Kiai Musta'in Romli, sehingga menyembunyikan kabar bergabungnya dirinya ke Golkar pada 1973. Kiai Musta'in Romli juga sama halnya dengan tokoh-tokoh yang lain dalam tubuh NU, sama-sama merasakan sakitnya. Tidak mungkin dengan jedah dua tahun rasa sakit yang diderita NU bisa hilang. Jadi, sangat tidak mungkin Kiai Musta'in Romli menyatakan secara terang-terangan ke publik bahwa dirinya telah bergabung ke Golkar. Tidak bisa dibayangkan jika hal itu terjadi, maka amarah simpatisan NU pasti berkobar.

<sup>28</sup> Mubarak, "Wacana Islam Dalam Politik Praktis Di Indonesia", 19-28.

## 2) PPP Baru Lahir

Pada 1973, Islam politik tengah menghadapi kebijakan strukturalisasi dari pemerintah yang mengakibatkan partai-partai Islam harus berfusi menjadi satu. Fusi yang menghasilkan berdirinya PPP tepat pada 5 Januari 1973. Dalam tubuh PPP sebagai satu-satunya partai Islam terdapat berbagai unsur Islam. Termasuk unsur NU sebagai partai/organisasi.<sup>29</sup> Kiai Musta'in Romli tentu mempertimbangkan kondisi Islam politik saat itu. Tidak mungkin menyatakan diri bergabung ke Golkar pada publik di tengah arus Islam yang sedang berfusi menjadi satu. Jika mungkin dilakukan, maka kemungkinan besar *negative impact* yang timbul akan terlalu besar. Oleh karena itu, Kiai Musta'in Romli terlebih dahulu menyembunyikan kabar dirinya bergabung ke Golkar. Di sisi lain, tentu saja untuk menghormati NU yang di dalamnya banyak kiai sepuh.

Fase sembunyi-sembunyi Kiai Musta'in Romli ini mengingatkan pada fase dakwah Nabi Muhammad. Ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam. Nabi Muhammad mengambil langkah awal dengan cara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui publik terlebih dahulu.<sup>30</sup> Sudah pasti terdapat banyak hikmah dan pelajaran di dalamnya.

<sup>29</sup> Aritonang, *Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia*, 377-378.

<sup>30</sup> Halimatus Sakdiah, "Komunikasi Interpersonal sebagai Strategi Dakwah Rasulullah (Perspektif Prikologi)", *Alhadharah*, Vol 15 No 30 (Juli-Desember), 40-50.

### 1) Keselamatan Jiwa

Dalam situasi yang serba tidak mungkin, lebih baik mendahulukan prinsip keselamatan jiwa (*Hifzhu al-Nafs*).<sup>31</sup> Mengingat kondisi psikologi politik Umat Islam sedang tidak baik pasca pemilu 1971. Ditambah dengan kebijakan strukturisasi yang semakin mempersulit gerak Islam politik. Sangat tidak mungkin Kiai Musta'in Romli sebagai tokoh Islam pesantren, Mursyid TQN, dan tokoh NU dengan serta-merta mengumumkan diri ke publik bergabung ke Golkar. Jiwa adalah taruhannya.

Andai saja Kiai Musta'in Romli terburu-buru menerangkan dan memperlihatkan kepada publik atas keterlibatannya dalam politik praktis sebagai kader Golkar. Bisa jadi akan banyak korban berjatuhan antara simpatisan yang mendukung dan menolak langkah Kiai Musta'in Romli. Terutama jiwa Kiai Musta'in Romli juga akan terancam. Hal tersebut sama sekali tidak memberikan manfaat. Justru sebaliknya, akan lebih banyak memberikan kerugian dan bahaya (*muhdlorot*).

### 2) Metode Baku Dakwah

Jika belum memiliki kekuatan massa yang sepaham dan sepemikiran, maka jalan yang paling aman adalah berdakwa secara sembunyi-sembunyi terlebih dahulu. Hal ini sudah menjadi metode baku dalam berdakwah. Meski pun memiliki keyakinan yang cukup

<sup>31</sup> Muhammad Ishom, "Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah", *al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol 7 No 2 (Desember, 2016), 128-129. Lihat juga di 'Izuddin Abdi al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 95.

tinggi bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada hambaNya. Tidak ada salahnya untuk terlebih dahulu membuat strategi yang mapan dan mengimbangnya dengan tawakal.<sup>32</sup>

Kiai Musta'in Romli tidak hanya sekadar masuk Golkar di tengah kondisi rezim Orde Baru belum memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap Islam, terutama Soeharto yang Islam Abangan<sup>33</sup> dan memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh kristen.<sup>34</sup> Tentu ada unsur untuk memperlihatkan Islam lebih mendalam di kalangan rezim Orde Baru. Di sisi lain, tidak banyak Umat Islam yang memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan utamanya bergabung dengan Golkar. Oleh karena itu, keputusan Kiai Musta'in Romli sangat tepat dengan terlebih dahulu menyembunyikan kabar bergabungnya dirinya ke Golkar. Sebaliknya, jika langsung terang-terangan, maka resiko yang akan didapat sangat tinggi.

Pada fase sembunyi-sembunyi ini, Kiai Musta'in sesekali sudah menunjukkan kedekatan dengan Presiden Soeharto sekaligus sebagai tanda-tanda merapat ke barisan pemerintah. Pada 19 Februari 1974, Kiai Musta'in Romli bertemu dengan Presiden Soeharto di Bina Graha (ruang kerja kepresidenan). Pertemuan ini dalam rangkah mendukung program Repelita II (program pemerintah dalam upaya menggenjot pembangunan infrastruktur negara). Sepulang dari Bina Graha, Kiai Musta'in Romli

<sup>32</sup> Muhamad Abror, "Hikmah di Balik Dakwah Sembunyi-sembunyi Rasulullah", dalam <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/hikmah-di-balik-dakwah-sembunyi-sembunyi-rasulullah-tMjTG> (7 November 2021), 1. Lihat juga di Said Muhammad Ramadhan al-Buthy, *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyah*, Kairo: Dar al-Salam, 2012), 69.

<sup>33</sup> Darmawijaya, "Islam dan Kekuasaan Orde Baru ...", 69.

<sup>34</sup> Effendy, *Islam dan Negara ...* [edisi digital], 136.

membawa ‘oleh-oleh’ berupa MoU: 10 hektar tanah dan 20 gedung untuk UNDAR dengan biaya pembangunan mencapai Rp 4.120.000.000,- (kurs rupiah pada masa tersebut).<sup>35</sup> Menurut Zulkfli dalam ‘Sufism in Java’ bahwa bantuan inilah yang menjadi awal dari segala ketegangan politik yang dihadapi Kiai Musta’in Romli.<sup>36</sup>

b. Fase Terang-Terangan (1975-1985)

Setelah mendapat rida bapaknya melalui kontak *batiniyah*<sup>37</sup> dan setelah mendapat doa dari para kiai dan *sesepeuh* di sekitarnya, serta setelah mempertibangkan situasi kondisi politik tanah air. Kiai Musta’in Romli baru secara resmi menyampaikan secara terang-terangan kabar dirinya bergabung ke Golkar pada 1975.<sup>38</sup> Sepertinya, ia memang menunggu momentum yang pas. Sebab momentum penyampaian tersebut bertepatan tahunnya dengan pemerintah memberikan pengesahan terhadap PPP, PDI, dan Golkar.<sup>39</sup> Sehingga agaknya fusi partai-partai sudah matang.

Tahun 1975 juga bertepatan dengan dua tahun sebelum pemilu 1977. Sehingga ada waktu yang cukup untuk menyiapkan diri ikut serta terlibat dalam agenda-agenda politik Golkar. Kenyataannya memang benar demikian, deklarasi diadakan berbarengan dengan kampanye Golkar di Stadion 10 November, Surabaya. Kiai Musta’in Romli mengajak seorang

<sup>35</sup> PPDU/UNDAR, *Arsip*, 19 Februari 1974.

<sup>36</sup> Zulkfli, “Sufism in Java: The Role of The Pesantren in the Maintenance of Sufism in Java”, *Milla*, Vol 3 No 2 (2004), 324.

<sup>37</sup> Setelah salat shubuh Kiai Mutsa’in Romli diikuti santri-santrinya berziara ke makam bapaknya. Setelah selesai berdoa, ia sempat terdiam cukup lama, kemudian berkata, “alhamdulillah bapak saya rida dengan langkah politik saya. Seandainya bapak tidak rida, saya tidak akan meneruskan. Muhtadi dalam disetasinya menyebut peristiwa ini sebagai kontak *batiniyah*. Lihat Muhtadi, “Kiai Musta’in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan ...,” 130.

<sup>38</sup> Muhtadi, “Kiai Musta’in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan ...,” 127.

<sup>39</sup> UU No. 3 Tahun 1975. Lihat Rizqi, “Efektifitas Penyederhanaan Partai Politik Era Orde Baru”, 208.

murid (sudah menjadi Kiai) dari Madura untuk memukulkan Gong sebagai tanda peresmian. Dalam sambutan deklarasinya, ia juga langsung mengkampanyekan Golkar dengan sebuah orasi, “Mana dimana? Tempat pilihan kita? Tempat pilihan kita ada di nomor 2! (sembari mengangkat dua jari) *Lā Ilaha Ilāllah, Muhammad al-Rasulullah*, Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah”.<sup>40</sup> Betapa heroiknya orasi Kiai Musta’in Romli tersebut, mampu menggelorakan dua kalimat syahadat di hadapan tokoh-tokoh Golkar dan di tengah lautan kader dan simpatisan Golkar.

Hal serupa juga berulang setiap Kiai Musta’in Romli berpartisipasi dalam kampanye Golkar. Seperti halnya ketika berkampanye di Parusuan, ia berorasi dengan teknik yang serupa, “Mana dimana? Tanda gambar saya? Tanda gambar saya ada di nomor 2! *Ya Arhama al-Rahimin, Ya Arhama al-Rahimin, Farrij ‘alā al-Muslimin*”.<sup>41</sup>

Lagi-lagi Kiai Musta’in Romli mampu mengajak/menghipnotis kader dan simpatisan Golkar bermunajat kepada Allah agar berkenan memberi pertolongan kepada Umat Islam.

<sup>40</sup> Menggunakan nada lagu ‘Anak Kambing Saya’. Kisah deklarasi ini diamini oleh Lukman Hakim yang menemani (bapaknya) Kiai Musta’in Romli selama berada di Stadion 10 November. H. Lukman Hakim, S. H., M. Hum (Putra Kiai Musta’in Romli/ Pembina Yayasan UN DAR), *Wawancara*, UN DAR: Jombang, 4 Desember 2022. Kisah yang sama juga bersumber dari Dr. Muhtadi, S. Ag. M.HI yang mendapatkan cerita dari temannya. Temannya ini memiliki bapak yang menjadi santri Kiai asal Madura yang menemani Kiai Musta’in Romli deklarasi masuk Golkar. Bapak ini yang menyertai Kiainya selama di Stadion 10 November. Setelah peristiwa ini, Kiai asal Madura tersebut mendapatkan kecaman yang luar biasa dari Umat Islam Madura. Sehingga para santri harus siap siaga menjaga pesantrennya. Kisah ini juga diamini oleh Kiai Tuhanik (Santri/ Abdi Ndalem Kiai Musta’in) yang sering mengantar Kiai Musta’in bepergian.

<sup>41</sup> Kiai Tuhanik (Santri/ Abdi Ndalem Kiai Musta’in), *Wawancara*, Wisma Musta’in: Jombang, 27 November 2022.

Keputusan untuk menyampaikan secara terang-terangan telah menjadikan Kiai Musta'in Romli sebagai individu yang aktif berpolitik. Seperti pendapat Miriam Budiarjo dan Herbert McClosky bahwa individu yang sudah mejalani partisipasi politik adalah individu yang secara aktif dan sukarela ikut serta dalam kegiatan politik secara langsung demi bisa memberikan pengaruh pada kebijakan pemerintah.<sup>42</sup>

Jika merujuk kepada Gabriel Almond dalam memberikan klasifikasi bentuk partisipasi politik<sup>43</sup>, maka bergabungnya Kiai Musta'in Romli ke Golkar tergolong sebagai partisipasi politik konvensional. Menjadi bagian dari Golkar sudah termasuk dalam partisipasi politik konvensional. Sebab bentuk konvensional merupakan bentuk kegiatan politik yang umum terjadi, termasuk bergabung ke dalam kelompok kepentingan (dalam hal ini adalah Golkar), diskusi politik, komunikasi dengan pejabat politik, dan kegiatan kampanye.

Kiai Musta'in Romli aktif berkampanye sebagai anggota yang memiliki tanggung jawab ikut serta berupaya memenangkan Golkar dalam pemilu. Hanya saja model kampanye Kiai Musta'in Romli berbeda dengan kader atau simpatisan Golkar sebelum-sebelumnya yang memakai cara intimidasi, persekusi, dan diskriminasi. Kiai Musta'in Romli lebih halus dalam berkampanye dan lebih pada mengenalkan Islam melalui orasi selawatnya tadi. Cara lainnya adalah dengan tidak menggunakan unsur paksaan kepada santri dan jamaahnya agar harus mengikutinya. Terbukti Kiai Musta'in Romli pernah memanggil 5 kiai (muridnya) yang dekat

---

<sup>42</sup> Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, 367.

<sup>43</sup> Mas'oed, *Perbandingan Sistem Politik*, TH.

dengannya dan yang telah memiliki pondok pesantren dan jamaah tarekat. Lantas ia mengungkapkan maksud dan tujuannya dengan berkata “Yai... (saya minta) tolong, agar disampaikan kepada santri atau jamaah tarekat kalian, ‘Kamu dalam pemilihan umum nanti akan memilih pilihan gurumu atau memilih yang lain (pilihan sendiri)? Kalau memilih pilihan gurumu untungnya apa? Dan ruginya juga apa? Kalau tidak memilih pilihan gurumu untungnya apa? Dan ruginya juga apa?’.”<sup>44</sup> Secara eksplisit perkataan Kiai Musa’in Romli ini memiliki makna ajakan agar muridnya ikut memilih Golkar, namun secara faktual sama sekali tidak ada unsur paksaan sama sekali. Murid diberikan kebebasan berfikir dalam menafsirkan dan memaknai perkataan gurunya.

Model kampanye lainnya adalah tegas, keras, dan berani. Hal ini diungkap Nur Rifa’i (santri) yang mengikuti kampanye Golkar Kiai Musta’in Romli dalam persiapan pemilu 1977 di Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Dalam acara kampanye tersebut Kiai Musta’in Romli terlebih dahulu mengumpulkan massa yang cukup besar. Kebanyakan massa yang datang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur. Kebanyakan dari mereka juga membawa senjata tajam. Kiai Musta’in Romli ketika berorasi di atas panggung menyampaikan, “bunuh Amir Murtono... !!! *duk tali layangan, awak sitok ilang-ilangan*”.<sup>45</sup> ‘Bukan benang layang-layang. Badan satu sering hilang’. Kalimat ini dilontarkan untuk menggebrak Mayjen Amir Murtono—ketua umum Golkar yang pada saat kampanye

<sup>44</sup> Muhtadi “Kiai Musta’In Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan ...”, 133-134.

<sup>45</sup> Peribahasa ini bisa diartikan sebagai “badan satu perlu dikorbankan sampai darah penghabisan dalam perjuangan”.

sebelumnya mencelah Kiai Musta'in Romli sebagai tokoh yang matre dan penakut, karena berhalangan hadir dalam kampanye. Orasi keras dari Kiai Musta'in Romli ini membuat jendral-jendral di atas panggung menjadi tercengang dan sangat kaget.<sup>46</sup>

Jika kembali merujuk kepada Gabriel Almond, maka Keputusan Kiai Musa'in Romli berpartisipasi dalam politik secara konvensional adalah keputusan terbaik. Daripada berpartisipasi secara non-konvensional, seperti; demonstrasi, konfrontasi, penggalangan petisi, dan lain-lain partisipasi yang menjurus pada kekerasan.<sup>47</sup> Sebab cara seperti itu lebih berbahaya, mengingat rezim Orde Baru terlalu kuat hingga tega melakukan segala cara untuk memarjinalkan Islam politik, termasuk cara kekerasan. Terbukti, cara konvensional Kiai Musa'in Romli yang sangat kooperatif lebih mudah diterima oleh rezim Orde Baru.

Ramlan Surbakti juga ikut andil memberi klasifikasi bentuk partisipasi politik.<sup>48</sup> Jika merujuk kepadanya, maka bergabungnya Kiai Musta'in Romli ke Golkar tergolong sebagai partisipasi aktif. Aktif dalam pengusulan kebijakan publik. Aktif dalam memberikan alternatif pemikiran untuk perbaikan-perbaikan kebijakan. Dalam hal ini Kiai Musta'in Romli sudah membuktikannya ketika menjadi anggota DPR-MPR RI 1983, lembaga negara yang bertugas membuat undang-undang kebijakan publik. Partisipasi aktif lebih baik daripada partisipasi pasif yang menerima begitu saja setiap kebijakan pemerintah. Bersikap pasif tentu

<sup>46</sup> Nur Rifa'i (Santri senior Kiai Musta'in). *Wawancara*. Rumah: Jombang, 9 November 2022.

<sup>47</sup> Mas'oed, *Perbandingan Sistem Politik*, TH

<sup>48</sup> Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, 142.

tidak dapat merubah apa pun dan tetap akan mendapat perlakuan kejam, memang pilihan terbaik adalah dengan berpartisipasi secara aktif.

## **B. Pemikiran Politik Kiai Musta'in Romli (1973-1985)**

Soeharto dan rezim Orde Barunya berhasil mempertahankan kekuasaannya dengan waktu yang cukup lama dengan cara menjepit Islam politik dari segala arah menggunakan berbagai kebijakan; menolak rehabilitasi Masyumi, menolak pendirian PDII, intervensi berdirinya Parmusi, penolakan legalisasi Piagam Jakarta, dan pengawasan terhadap partai yang meski sudah terbukti sangat akomodatif. Rezim Orde Baru juga memiliki pengetahuan bahwa jantung kekuatan Islam berada di dalam ideologinya, sehingga mereka menekan Islam politik dengan berbagai aturan; strukturisasi partai politik, strukturisasi ormas Islam, dan pemberlakuan Asas Tunggal. Mereka mendukung kebijakan dan aturan tersebut dengan berbagai wacana sampai benar-benar berhasil, seperti ancaman pembubaran partai dan organisasi.

Bahkan ketika menjelang pemilu 1977 dan seterusnya, seluruh komponen dan simpatisan Golkar berkampanye dengan wacana-wacana keislaman, agar memberikan kesan bahwa mereka juga memiliki sisi keislaman. Tujuannya jelas untuk meraup suara Islam yang mayoritas agar berlabuh ke Golkar, bukan ke PPP sebagai partai Islam. Golkar mengutip ayat 18 dari surat al-Fath, “Sungguh Allah meridai mu'min jika mereka membai'at kamu di bawah pohon”.<sup>49</sup> Secara literal ayat ini relevan dengan Golkar yang memiliki lambang pohon beringin. Maksud penggunaan ayatnya, jika rakyat –dalam hal khusus Umat Islam- ingin mendapat rida dari Allah, maka harus memilih berada di bawah naungan Golkar. Produksi

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Karya Toha Putra, 1998), 1033-1034.

wacana dengan narasi-narasi seperti itu terus digelorkan dalam kampanye-kampanye.<sup>50</sup>

Berbagai wacana dari rezim Orde Baru untuk mendukung aturan politik lebih terlihat oleh Umat Islam sebagai aturan yang mengorbankan Islam politik. Meski rezim Orde Baru beralasan bahwa penerapan aturan tersebut adalah untuk percepatan pembangunan yang memang harus dibarengi dengan politik yang kondusif dan stabil.<sup>51</sup> Tampaknya tujuan tersirat ini tidak terlihat dari wajah politik Soeharto dan rezim Orde Barunya. Sehingga wacana-wacana seperti ‘Soeharto Bapak Pembangunan’, ‘ABRI Pelopor Stabilitas Politik dan Ekonomi’, ‘Hancurkan Gerombolan Cina Komunis’, dan lain-lain menjadi terkesampingkan.<sup>52</sup> Padahal untuk wacana yang ketiga itu Islam politik dan rezim Orde Baru pernah saling bersinergi.

Begitulah kenyataan yang lebih menunjukkan betapa garangnya Presiden Soeharto dan rezim Orde Barunya dengan segala aturan-aturan dan wacana politiknya. Selama Orde Baru berkuasa tidak ada yang bisa menandingi hegemoni kekuasaannya. Termasuk Islam politik yang sudah terseok-seok. Apalagi mencoba menabrak aturan yang berlaku, malah sangat tidak mungkin hal tersebut terjadi. Islam politik hanya bisa menerima begitu saja dengan menjalani aturan demi aturan yang berlaku. Lantas dengan berjalannya waktu menormalisasi tatanan politik yang sudah dibuat rezim Orde Baru.

<sup>50</sup> Fadhli Lukman, “Cerita Lama Qur'an dan Kampanye Politik di Indonesia”, dalam <https://blog.uinsuka.ac.id/fadhli.lukman/cerita-lama-quran-dan-kampanye-politik-di-indonesia> (7 November 2022), 1.

<sup>51</sup> Turmudi, *Struggling for the Umma* ..., 112.

<sup>52</sup> Al-Donna Zhara Khairani, “Jargon-Jargon Politik Masa Orde Baru dalam Menciptakan Stabilitas Nasional”, *Avatar e-Journal Pendidikan Islam*, Vol 3 No 2 (2015), 270-271.

Sama halnya dengan Kiai Musta'in Romli yang tampak juga berfikir bahwa Soeharto dan rezim Orde Barunya sudah terlalu kuat dalam arena politik dan Golkar tidak mungkin dapat dikalahkan dalam pemilu. Oleh karena itu, bergabung ke Golkar adalah pilihan paling realistis bila tetap ingin memperjuangkan agama Allah. Golkar yang kuat bisa menjadi kendaraan untuk menciptakan perubahan kondisi bagi Islam politik dan Umat Islam pada umumnya. Dengan menjadi bagian dari Golkar, Kiai Musta'in Romli bisa menjauhkan santri, murid, dan jamaahnya dari perlakuan kasar rezim Orde Baru dan simpatisannya.

Ungkapan pertama Kiai Musta'in Romli yang mewakili pemikirannya dalam melegitimasi Golkar sebagai alat politik yang kuat dan tidak tertandingi, sehingga bisa dimanfaatkan. Ia berkata, *"Ibarat'e Kiai Musta'in iku duwe ondo, tapi ondone cilik. Nek (ondo cilik) ditumpaki wong akeh (biso-biso) ondone cuklek. Lha Golkar (nduwe) ondone (digawe tekan) wesi tur kuwat, dene ditumpak'i kok cuklek, Pak Harto yo melu tibo. Lha kito (jek) duwe cekelan pokok, yoiku Iman lan Islam"*.<sup>53</sup> "Ibaratnya Kiai Musta'in itu memiliki tangga, tapi tangganya kecil. Kalau (tangga kecil) tersebut dinaiki oleh orang banyak (bisa saja) tangganya akan patah. Sedangkan Golkar memiliki tangga yang terbuat dari besi yang sifatnya kuat, andaikan dinaiki orang banyak kok patah, Pak Harto juga akan ikut jatuh. Akan tetapi, kita masih memiliki pegangan utama, yaitu Islam dan Iman". Kiai Musta'in Romli memang berfikir bahwa Golkar sebagai alat politik yang kuat, sehingga ia bisa menggunakannya sebagai alat untuk menggapai tujuan

<sup>53</sup> Muhtadi (Santri Kiai Musta'in), *Wawancara*, UNDAR: Jombang, 11 November 2022., H. Lukman Hakim, S. H., M. Hum (Putra Kiai Musta'in Romli/ Pembina Yayasan UNDAR), *Wawancara*, UNDAR: Jombang, 4 Desember 2022.

perbaikan Islam politik dan mencegah santri, mahasiswa, dan jamaah TQN dari perlakuan kasar pemerintah. Kiai Musta'in Romli juga berfikir bahwa kekuasaan Soeharto dan rezimnya di satu hari di suatu saat bisa saja runtuh, jika ketika waktu itu datang, maka Kiai Musta'in Romli akan kembali fokus ke urusan keagamaan.

Ungkapan kedua Kiai Musta'in Romli yang mewakili pemikirannya dalam melegitimasi Golkar sebagai kendaraan politik yang besar, sehingga ia bisa memanfaatkan. Ia berkata, *“Golkar iku umpamane kapal gedeh, lha partai laine iku cuma kapal cilik. Nek pingin selamat ng laut, kudu melu Golkar”*. *“Golkar diumpakan sebagai kapal besar. Sedangkan partai lain sebagai partai kecil. Agar selamat di laut, harus ikut Golkar”*. Kiai Musta'in Romli memang mengakui bahwa Golkar sebagai kendaraan politik yang besar. Ia juga berfikir jika ingin selamat atau ingin menyelamatkan Islam politik, santri, mahasiswa, dan jamaah TQN di sepanjang masa rezim Orde Baru berkuasa. Maka cara idealnya adalah bergabung ke rezim melalui Golkar. Analisa ini juga diamini oleh Kiai Cholil Dahlan dan Gus Lukman Hakim yang membantu menjelaskan pemikiran Kiai Musta'in Romli bergabung ke Golkar bahwa semata-mata hanya untuk menyelamatkan Pondok Pesantren Darul Ulum, UNDAR, dan TQN. Sebab sulit sekali menyelenggarakan kegiatan apa pun bila tanpa ada kaitan hubungan dengan Golkar.<sup>54</sup>

Ungkapan ketiga Kiai Musta'in Romli yang mewakili pemikirannya dalam melegitimasi Golkar sebagai kendaraan politik yang lebih memiliki kecepatan, sehingga bisa dimanfaatkan. Ia bertaka *“Ibarate Kiai Musta'in iku duwe kapal*

<sup>54</sup> Kiai Cholil Dahlan (Ketua Majelis PPDU), *Wawancara*, Kantor Sekretariat PPDU: Jombang, 9 Novemeber 2022. H. Lukman Hakim, S. H., M. Hum (Putra Kiai Musta'in Romli/ Pembina Yayasan UNDAR), *Wawancara*, UNDAR: Jombang, 4 Desember 2022.

*karet, mlayune gak iso banter. Golkar duwe kapal wesi sing iso mlayune banter. Supoyo iso mlayu banter, kapal karete mau ditumpakne (ng) kapal wesi. Engkok nek wis teko nggone, kapal karete yo mudun*".<sup>55</sup> "Ibarat Kiai Musta'in itu memiliki kapal -yang terbuat dari- karet (perahu karet) yang tidak bisa melaju dengan cepat. (Sedangkan) Golkar memiliki kapal yang terbuat dari besi yang bisa melaju dengan cepat. Supaya bisa melaju dengan cepat juga, kapal karet tadi harus dinaikkan ke kapal besi. Nanti jikalau sudah sampai tujuan, maka kapal karetnya pasti turun". Kiai Musta'in Romli memang berfikir bahwa Golkar sebagai kendaraan politik yang didukung logistik besar, sehingga mempunyai kecepatan dalam membangun peradaban. Oleh karena itu, Kiai Musta'in Romli terlebih dahulu harus menumpang ke Golkar agar secepat mungkin juga 'mendapatkan bagian' dari program pembangunan. Apabila tujuannya sudah didapatkan, maka Kiai Musta'in Romli juga akan turun/keluar dari Golkar. Analisa ini juga diamini oleh Kiai Dahlan Cholil dan Gus Lukman Hakim bahwa tujuan utama Kiai Musta'in Romli bergabung ke Golkar –selain untuk menyelamatkan- adalah untuk kemajuan Pondok Pesantren Darul Ulum, UNDAR, dan TQN.<sup>56</sup>

Setelah merapat ke dalam kekuasaan rezim Orde Baru, Kiai Musta'in Romli meyakini bahwa keputusannya adalah benar. Di sisi yang lain, sebagai Kiai yang memimpin jutaan santri dan jamaah, ia memahami kondisi santri dan jamaahnya belum bisa memahami maksud dan tujuannya bergabung ke Golkar. Oleh karena itu, pada masa itu diberlakukan aturan di Darul Ulum; pendidikan dan tarekat tetap berjalan seperti sedia kala dan tidak ada kaitan dengan politik.

<sup>55</sup> Muhtadi (Santri Kiai Musta'in), *Wawancara*, UNDAR: Jombang, 11 November 2022.

<sup>56</sup> Kiai Cholil Dahlan (Ketua Majelis PPDU), *Wawancara*, Kantor Sekretariat PPDU: Jombang, 9 November 2022. H. Lukman Hakim, S. H., M. Hum (Putra Kiai Musta'in Romli/ Pembina Yayasan UNDAR), *Wawancara*, UNDAR: Jombang, 4 Desember 2022.

Kiai dan Gus mendapat kebebasan untuk masuk partai apa pun, tetapi tidak boleh ada simbol partai yang masuk di lingkungan Darul Ulum.<sup>57</sup>

Setiap pengajian Kiai Musta'in Romli melakukan transfer pemikiran politik kepada santri dan jamaahnya dengan berbagai wacana perumpamaan, agar secara bertahap mereka juga bisa memahami keputusannya memang benar. Wacana perumpamaan pertama, *"Politik iku ibarate ngumbulne layangan. Bolah iku minongko cekelan, yoiku salate lan imane. Layangan minongko partai (Golkar, PPP, lan PDI). Mestine yen angine ngidul, bolahe lak ditarek ngalor, ben layangane iso mumbul."*<sup>58</sup> "Politik itu ibaratnya seperti menaikkan layang-layang. Benang itu selayaknya pegangan (kita), yaitu salat dan iman. Sedangkan layang-layang selayaknya partai (Golkar, PPP, dan PDI). Seharusnya bila angin berhembus ke selatan, maka benangnya harus ditarik ke utara, agar layang-layangnya bisa naik ke atas". Wacana pertama memberikan keterangan mengenai pemikiran politik Kiai Musta'in Romli bahwa politik hanyalah sebuah permainan, tetapi sarat akan tujuan. Sedangkan salat dan keimanan adalah hal penting yang tidak bisa dipertukarkan. Seseorang boleh saja berpolitik praktis untuk mewujudkan tujuannya yang mulia. Jika suatu saat ada keuntungan yang berpihak ke partai, maka politikus yang memiliki keimanan tadi bisa turut mengambil keuntungan dari partai untuk kemudian disalurkan kepada umat.

Wacana perumpamaan kedua, *"Perjuangan iku yo ngono. Koyok Golkar, PPP lan PDI iku minongko kalambi dicantolne nang endi wae kenek. Saiki nok kamar ngarep, engkok nok ruang santai, lan mene nok kamar mburi. Seng penting*

<sup>57</sup> Menurut Kiai Cholil Dahlan Cholil, Kiai Sofyan Cholil yang menjabat sebagai pengurus pusat PPP dan sebagai anggota DPR-MPR juga berlaku sama dengan tidak membawa simbol PPP masuk ke Darul Ulum. Aturan tidak tertulis ini masih berlaku sampai sekarang.

<sup>58</sup> Muhtadi (Santri Kiai Musta'in), *Wawancara*, UNDA: Jombang, 11 November 2022.

*iku salate: Inna Ṣalāti Wa Nusukiy Wa Maḥyaya Wa Mamati Lillahi Robbi al-‘Ālamīn*”.<sup>59</sup> “Perjuangan itu ya demikian. Sama halnya Golkar, PPP, dan PDI itu selayaknya pakaian yang bisa digantung dimana saja. Sekarang digantung di kamar depan, nanti (digantung) di ruang keluarga, dan besok (digantung) di kamar belakang. Yang paling penting itu salatunya: sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”. Wacana kedua memberikan keterangan mengenai pemikiran politik Kiai Musta’in Romli bahwa perjuangan (menegakkan agama Allah) bisa dilakukan di mana saja, termasuk dengan bergabung ke dalam partai. Tidak penting partai politik apa yang digunakan. Sebab partai itu bisa berubah-ubah tujuan, tergantung waktunya saja. Sedangkan hal paling penting adalah salat, karena manusia adalah hamba Allah dan status itu tidak bisa berubah.

Selain dengan wacana perumpamaan. Kiai Musta’in Romli pernah berkata secara lugas dalam sebuah pengajian di masjid Darul Ulum bahwa “*Saktemene Golkar, PPP, lan PDI iku mbujuk’i kabeh*”.<sup>60</sup> “Sebenarnya Golkar, PPP, dan PDI itu pembohong semua.” Perkataan ini sangat jelas menggambarkan pemikiran politik Kiai Musta’in Romli bahwa tidak ada partai politik yang benar-benar suci. Partai selalu penuh dengan tipu muslihat. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada tindakan yang tidak sesuai dengan hati nurani ketika berkecimpung dalam partai politik.

Kiai Musta’in Romli terus melakukan transfer pemikiran politik dengan berbagai wacana dimana pun berada. Hal ini dikarenakan masih banyak santri dan jamaah yang belum bisa memahami langkah politiknya. Sampai ada santri yang

<sup>59</sup> Muhtadi (Santri Kiai Musta’in), *Wawancara*, UN DAR: Jombang, 11 November 2022.

<sup>60</sup> Muhtadi, “Kiai Musta’in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan...”, 139.

pergi menghadap Kiai Hamid Pasuruan yang masyhur memiliki karamah, demi ingin memahami langkah politik Kiai Musta'in Romli. Sebelum santri tersebut bertanya, Kiai Hamid sudah menerangkan terlebih dahulu bahwa Kiai Musta'in Romli adalah seperti penyerang dalam sepakbola dan Kiai Hamid Pasuruan adalah penjaga gawangnya.<sup>61</sup> Penjelasan Kiai Hamid membantu mengurai pemikiran Kiai Musta'in Romli bergabung ke Golkar. Kiai Musta'in Romli memiliki tugas (tergugah untuk) mendobrak lawan-lawan yang menghambat Islam politik, agar tujuan Islam tidak terhambat. Sedangkan Kiai Hamid Pasuruan tetap dalam maqom awal untuk menjaga Umat Islam.

Hal tersebut terbukti dari penuturan Kiai Musta'in, "*Santri sing kudu biso ngarahno pemerintah. Santri sing kudu dadi pejabat daripada wong abangan. Makane aku tak melbu ndisek daripada kendisik'an LB Moerdani*".<sup>62</sup> "Santri yang harus bisa mengarahkan pemerintah. Santri yang harus menjadi pejabat. Oleh karena itu, saya yang akan lebih dahulu masuk (ke pemerintahan) daripada kedahuluan LB Moerdani". LB Moerdani adalah pembisik Presiden Soeharto yang terkenal sebagai tentara anti Islam.

Terdapat juga sekelompok Islam yang berduyun-duyun menghadap Kiai Hamid terlebih dahulu, sebelum melakukan 'demo' ke Kiai Musta'in Romli. Ketika jamaah baru sampai di depan teras rumah Kiai Hamid, Kiai Hamid sudah berkata dengan mimik keras kepada sekelompok ini bahwa Kiai Musta'in Romli

<sup>61</sup> Gus Ishomuddin dalam Muhtadi, "Kiai Musta'in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan ...", 136.

<sup>62</sup> Kiai Tuhanik (Santri/ Abdi Ndalem Kiai Musta'in), *Wawancara*, Wisma Musta'in: Jombang, 27 November 2022.

adalah *wong langit* (Orang Langit)- *waliyullah*, sehingga Kiai Musta'in Romli lebih tahu daripada kelompok tersebut.<sup>63</sup>

Memang cerita tersebut berada dalam ranah yang tidak bisa dibuktikan dengan saintifik. Namun secara empiris ranah ini dapat dibuktikan kebenarannya. Pembuktiannya terletak pada konsep Islam tentang karamah dan barakah. Konsep ini sudah tertanam kuat dalam keyakinan Umat Islam, khususnya para santri dan jamaah tarekat. Karamah adalah karakteristik seseorang yang didapat karena sangat dekat dengan Allah. Seorang yang memiliki karamah biasa disebut dengan *waliyullah*. *Waliyullah* dengan kekaramahannya bisa melakukan hal-hal yang *Khawariqu al-'Ada* (berlawanan dengan situasi manusia normal). Dalam perspektif Islam ortodoks, Allah berkenan membocorkan rahasianya hanya kepada orang-orang pilihan, termasuk para wali tersebut. *Waliyullah* dengan kekaramahannya juga bisa memberikan barakah, yaitu berupa efek positif yang timbul dari interaksi dengan orang yang memiliki karamah. Begitu pun sebaliknya, jika berlawanan, maka bisa saja mendapat efek negatif. *Waliyullah* juga mendapat keistimewaan dari Allah untuk menjembatani seorang hamba yang membutuhkan keberkahanNya.<sup>64</sup> Teori tersebut memang terbukti terjadi pada para santri dan jamaah Kiai Musta'in Romli. Santri Kiai Musta'in Romli yang sudah memiliki pesantren sendiri, jika dahulu ia patuh dengan keputusan politik Kiai Musta'in Romli, maka pesantrennya masih subur sampai sekarang. Sebaliknya, santri yang kurang patuh, pesantrennya juga kurang subur sampai sekarang.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Amir Maliki Abitolkha (Akademisi dan Peneliti TQN), *Wawancara*, UIN Sunan Ampel: Surabaya, 15 September 2022 dan Kiai Tuhanik (Santri/ Abdi Ndalem Kiai Musta'in), *Wawancara*, Wisma Musta'in: Jombang, 27 November 2022.

<sup>64</sup> Turmudi, *Struggling for the Umma ...*, 71-74.

<sup>65</sup> Muhtadi (Santri Kiai Musta'in), *Wawancara*, UNDAAR: Jombang, 11 November 2022.

Sebagai ungkapan kepada santri dan jamaah tarekat yang masih ragu dengan langkah politik gurunya. Kiai Musta'in Romli mengatakan "*Lek digendong guru iku mestine gondelan seng ruso. Wong digendong gurune kok kudu mlorot wae. Ceblok lak dadi gawe*".<sup>66</sup> "Kalau guru menggendong muridnya itu seharusnya muridnya memegang dengan kuat gurunya, bukan malah berupayah dengan paksa untuk turun. Kalau jatuh malah berbahaya". Ungkapan ini memberikan keterangan mengenai pemikiran politik Kiai Musta'in Romli bahwa langkahnya masuk Golkar adalah untuk membawa muridnya -santri dan jamaah tarekat- menuju perbaikan kehidupan (Islam politik, Islam Pendidikan, dan Tarekat). Serta untuk menyelamatkan murid-muridnya dari mara bahaya yang setiap saat bisa saja terjadi pada masa rezim Orde Baru dan bukan untuk menjerumuskan murid-muridnya.

Kiai Musta'in Romli juga mengatakan, "*wit pelem sg uwoh, lak mesti keterak angin, uwoh sg kuat bakal dadi pelem mateng, sg ceblok ya rutuh*".<sup>67</sup> "Pohon mangga yang sedang berbuah pasti akan terkena terjangan angin. Buah yang kuat akan menjadi mangga masak, sedangkan yang tidak kuat akan jatuh". Ungkapan ini memberikan keterangan mengenai pemikiran politik Kiai Musta'in Romli bahwa bergabungnya dirinya ke Golkar adalah untuk membantu muridnya berproses sampai menjadi orang hebat dalam bidang apa pun. Seyogyanya muridnya juga harus kuat menerima resiko dari hembusan isu politik. Bila tidak kuat, maka proses tersebut tidak akan pernah selesai.

Kiai Musta'in Romli juga pernah mengungkapkan pemikirannya terhadap partai lain (lawan politik) yang dengan tegah menghujat, mencaci-maki, dan

<sup>66</sup> Muhtadi, "Kiai Musta'in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan...", 137.

<sup>67</sup> Muhtadi (Santri Kiai Musta'in), *Wawancara*, UNDAR: Jombang, 11 November 2022.

menuduh kafir kepada dirinya. Termasuk dalam kelompok tersebut adalah para kiai yang berpolitik di dalam PPP. Ia berkata, “*Jaman saiki wis kuwalek. Mestine kiai iku dadi contoh seng apik, tapi saiki malah nguwei contoh seng elek; nandur kebencian nang podo kiai’ne. Mesti’ne kiai iku seng misah wong tukaran. Lhakov saiki malah kiai’ne podo tukaran. Terus lek kiai’ne podo tukaran, sopo seng misah lek enek wong tukaran?*”<sup>68</sup> “Pada masa sekarang zaman (kondisi manusia dan alamnya) sudah terbalik. Seharusnya kiai bisa menjadi contoh yang baik. Akan tetapi, pada masa sekarang kiai malah memberi contoh yang tidak sepatutnya, seperti menanam kebencian kepada sesama kiainya. Seharusnya kiai menjadi pihak yang memisahkan orang yang bertengkar. Akan tetapi, pada masa sekarang, sesama kiai malah bertengkar. Lalu jika sesama kiai bertengkar, maka siapa lagi yang bisa menjadi pemisah kalau ada orang yang bertengkar”. Pada masa itu, Kiai Musta’in Romli berfikir bahwa kiai yang bergabung ke PPP lebih menunjukkan sifat politisnya daripada sifat ke-kiai-anya. Sebab para kiai tersebut malah ikut bertarung pada urusan politik sampai tegah melontarkan hujatan, cacian, dan tuduhan kafir kepada sesama kiai yang berbeda partai. Seharusnya, meski kiai berpolitik praktis, jangan sampai merubah jiwa pejuang untuk menegakkan agama Allah. Serta tetap menjadi tauladan bagi santri dan jamaah dengan ikut memberikan penjelasan-penjelasan yang logis dan masuk akal. Bukan malah menambah panas situasi politik.

Semua pemikiran politik Kiai Musta’in Romli tadi mengerucut pada sebuah pemikiran politik yang sangat besar dan fenomenal pada masa Orde Baru. Ia berkata, “ ... akan makin nyatalah bagi kita semua khususnya para jamaah

<sup>68</sup> Muhtadi (Santri Kiai Musta’in), *Wawancara*, UNJAR: Jombang, 11 November 2022.

tarekat (tentang) betapa kuat dan ampuhnya Pancasila.”. Pemikiran tentang kepercayaan terhadap kehebatan Pancasila sebagai asas, termasuk sebagai pedoman jalannya TQN (yang dipimpinya) yang sudah terbukti dalam sejarah.<sup>69</sup> Kepercayaan ini datang lebih dahulu daripada arus utama Umat Islam yang masih bergumul antara mempertahankan Islam sebagai ideologi atau menerima tawaran pemerintah untuk mengakui Pancasila sebagai asas tunggal.<sup>70</sup> Oleh karena itu semua, bisa dibilang bahwa Kiai Musta’in Romli adalah pionir Islam politik dalam hal pengakuan Pancasila sebagai asas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pandangan orang lain terlalu cepat menilai langkahnya salah jalan. Hanya karena menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik tanpa memperhatikan substansi dari sudut pandang yang lain. Padahal Kiai Musta’in Romli sendiri melarang Kiai Hasyim Umar keluar dari PPP dan berharap saudaranya tersebut tetap berjuang melalui PPP. Sementara dirinya sendiri berjuang di Golkar.<sup>71</sup> Kiai Musta’in Romli juga tidak sedikit pun membenci lawan politik yang telah membenci dirinya dan tetap menganggap mereka semua sebagai teman. Wacana yang sering digaungkannya, *“konco sewu kurang, musuh siji kakean”*. “Seribu teman masih terasa kurang, sedangkan satu musuh saja terlalu banyak”. dan *“koncomu kancanono, koncone koncomu kancanono”*. “Temani temanmu, temani teman (dari) temanmu”. Memang begitulah seharusnya konsep pertemanan diterapkan. Meski banyak perbedaan yang menyertai. Termasuk perbedaan

<sup>69</sup> Kiai Musta’in Romli (Kata Sambutan) dalam Hendro, *Sejarah Surat Wasiat ‘Ijazah Baiat’ ...*, 7.

<sup>70</sup> Subagtio, “Perjalanan Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1973-1984: ...”, 27

<sup>71</sup> Muhtadi, “Kiai Musta’in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan...”, 128.

gambar partai atau pun berbeda agama. Pertemanan tetap bisa terjalin dengan landasan kemanusiaan.<sup>72</sup>

Orang yang menilai langkah politik Kiai Musta'in Romli sebagai bentuk kafir/kemurtadan, karena meninggalkan partai Islam. Tampaknya mereka terlalu menganggap partai sebagai agama, sehingga tidak memperhatikan konsen Kiai Musta'in Romli terhadap pendidikan yang tidak terpengaruh sama sekali dengan politik. Padahal sesibuk-sibuknya di dalam Golkar dan di dalam DPR-MPR RI, ia selalu pulang ke Darul Ulum pada setiap senin malam untuk mengisi pengajian *Riyadu al-Solihin* pada Selasa paginya di Masjid Induk pesantren.<sup>73</sup> Wacana pendidikan yang selalu disampaikan kepada santri saat sebelum dan sesudah bergabung ke Golkar juga tetap sama, “berotak London dan berhati Masjidi al-Haram” dan “Cintai Almamatermu”.<sup>74</sup> Sebuah pemikiran pendidikan dari Kiai Musta'in Romli yang selalu konsen pada keseimbangan akal (pendidikan) dan hati (tarekat).

Ketika berhasil mendirikan UNDAR, wacana pendidikan tersebut lebih sempurna lagi dengan terciptanya filsafat pendidikan Trisula. Filsafat yang terdiri dari tiga unsur; pendidikan pesantren, tarekat, pendidikan tinggi dengan lima nilai yang terkandung; taat kepada guru, tekun, jujur, sabar, dan ikhlas.<sup>75</sup> Semua hal tersebut sangat membuktikan bahwa Kiai Musta'in Romli tetap memperhatikan pendidikan dan tarekat, meski sedang sibuk berpartisipasi dalam politik.

<sup>72</sup> Muhtadi, “Kiai Musta'in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan...”, 106, 138.

<sup>73</sup> Kiai Cholil Dahlan (Ketua Majelis PPDU), *Wawancara*, Kantor Sekretariat PPDU: Jombang 9 November 2022.

<sup>74</sup> Kiai Cholil Dahlan (Ketua Majelis PPDU), *Wawancara*, Kantor Sekretariat PPDU: Jombang, 9 November 2022. H. Lukman Hakim, S. H., M. Hum (Putra Kiai Musta'in Romli/ Pembina Yayasan UNDAR), *Wawancara*, UNDAR: Jombang, 4 Desember 2022.

<sup>75</sup> Tim Pendaran, *Trisula Universtiar Darul Ulum* (Jombang, Lembaga Trisula Universtiar Darul Ulum), 1-35.

## C. Landasan Partisipasi dan Pemikiran Politik

### 1. Tasawuf

Sangat berat sekali perjuangan Kiai Musta'in Romli melalui jalur politik. Meski demikian, tampak dalam sejarah ia tetap teguh berjuang dengan ikhlas. Muhtadi menjelaskan bahwasanya Kiai Musta'in Romli memiliki ketenangan dalam menghadapi kondisi politik apa pun dan selalu menyerahkan semua urusannya kepada Allah.<sup>76</sup> Sedari muda ia memang memiliki motto hidup yang luar biasa, “*when the God be us, who will against us*”.<sup>77</sup> Ungkapan ini memang sangat sufistik. Ia selalu yakin bahwa Allah selalu menyertai langkahnya, bersamaan dengan hal itu, ia percaya tidak akan ada lawan yang mampu menghalangi perjuangannya. Hal itu erat kaitan dengan kedudukannya sebagai *mutasawwifin*, mursyid TQN, yang senantiasa mengajarkan untuk mengingat Allah (*dzikrullah*) dalam kondisi apa pun. TQN sendiri memiliki amaliyah Zikir Jahr dan Zikir Khafi yang bertujuan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan hamba sampai pada tingkatan bisa melakukan interaksi ‘ghaib’ dengan Allah SWT.<sup>78</sup>

### 2. Sejarah TQN dalam Pusaran Politik

Jika ditarik ke zaman sebelum-sebelumnya, maka kiai Musta'in Romli bukanlah mursyid TQN pertama yang melakukan gerakan politik. Sebut saja yang pertama adalah Abd al-Karim al-Bantani, mursyid TQN, ialah aktor intelektual dibalik peristiwa Pemberontakan Petani Banten melawaan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1888. Para pelakunya juga banyak

<sup>76</sup> Muhtadi (Santri Kiai Musta'in), *Wawancara*, UNDAR: Jombang, 11 November 2022.

<sup>77</sup> Musta'in Romli, *Arsip*, 1 Oktober 1954.

<sup>78</sup> Abitolkha, et.al, “Revitalizing National Political Values Through The Socio-Political Movements Of The Tarekat: ...”, 379.

yang berasal dari jamaah TQN. Kedua, Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad (Abah Sepuh), mursyid TQN Suralaya. Ia memerintahkan para santri dan jamaah tarekat untuk membantu pemerintah dan tentara republik bila terjadi kontak senjata dengan pemberontak DI/TII pada tahun 1947-1948.<sup>79</sup> Bahkan Abah Anom (putra Abah Sepuh) sudah dekat dengan rezim Orde Baru sejak 1967 sampai bersedia mendukung Golkar.<sup>80</sup>

Menurut Azyumardi Azra, tarekat memang mengalami pergeseran. Sebelum abad 12 tarekat lebih mendalami ajaran asketisme, namun sesudah abad 12 tarekat memiliki kerangka organisasi yang solid dalam rangkai gerakan sosial-politik.<sup>81</sup> TQN sendiri memiliki fakta sejarah yang tidak anti pati terhadap politik, justru ikut andil dalam gerakan sosial-politik. Berkenaan dengan hal ini, Kiai Musta'in Romli berfikir bahwa tarekat itu bukan partai politik, namun jamaah tarekat harus mengerti politik. Sebagai mursyid, ia tidak memaksa jamaahnya untuk ikut berpolitik, namun minimal mampu memahami seperti apa itu politik.<sup>82</sup>

### 3. Politik Sunni

Jika ditarik pula dengan konsep Nurchlolis Madjid tentang 'Islam? Yes, Partai Islam? No'.<sup>83</sup> Maka konsep itu sama seperti yang dilakukan Kiai Musta'in Romli dengan lebih memilih Golkar daripada partai Islam. Kemungkinan besar pemikiran keduanya berdasar pada kondisi sosial-politik—partai Islam yang sangat sulit bergerak pada masa Orde Baru. Akibat

<sup>79</sup> Abitolkha, et.al, "Revitalizing National Political Values Through The Socio-Political Movements Of The Tarekat: ...", 377-386. Lihat juga seluruh aktivitas politik dari kelompok tarekat.

<sup>80</sup> Zulkifli, "Sufism in Java: ...", 324.

<sup>81</sup> Azyumardi Azra, *Akar-akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia: Neo Sufisme Abad XI-XII H* (Jakarta: Paramadina), 3.

<sup>82</sup> Muhtadi, "Kiai Musta'in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan...", 128.

<sup>83</sup> Effendy, *Islam dan Negara ...*, 170.

dari pemikiran tersebut Nurcholis Madjid dinilai sekuler, sedangkan Kiai Musta'in Romli dinilai kafir.

Akan tetapi, tesis ini menilai bahwa partisipasi dan pemikiran politik Kiai Musta'in Romli bukanlah sekulerisasi Islam yang menjerumus sampai pada kekafiran. Melainkan buah dari penerapan dari konsep politik Sunni. Bahkan Kiai Hamid Pasuruan sampai menyebut Kiai Musta'in Romli sebagai Imam Ghazalinya zaman Orde Baru.<sup>84</sup>

Imam Ghazali (1058-1111 M) adalah tokoh sunni yang hidup pada zaman Dinasti Abbasiyah. Imam Ghazali memiliki pandangan yang hampir sama dengan Ibn Abi Rabi' yang berpendapat bahwa pemimpin adalah wakil Allah di bumi. Sementara Imam Ghazali berpendapat bahwa Allah merupakan sumber kekuasaan mutlak, sedangkan pemimpin adalah bayang-bayang Allah di bumi. Kemudian Allah memberikan sebagian kecil kekuasaannya tersebut kepada manusia tertentu untuk menjadi pemimpin di bumi, termasuk Kepala Negara.<sup>85</sup>

Imam Ghazali dalam *al-Tibr al-Masbuk* menjelaskan bahwa Allah telah memilih dua kelompok manusia, yaitu Nabi/Rasul dan Penguasa (pemimpin). Allah memilih pemimpin agar menjaga manusia dari permusuhan, pertikaian, perpecahan, dan lain sebagainya. Allah memilih mereka menduduki posisi yang terhormat untuk menangani kemaslahatan dan pengayom umat manusia di bumi. Oleh karena itu, setiap manusia wajib

---

<sup>84</sup> Penjulukan ini adalah kisah lanjutan dari santri yang menghadap Kiai Hamid Pasuruan untuk menanyakan tentang bergabungnya Kiai Musta'in Romli keGolkar. Kiai Hamid berkata, "Kiai Musta'in iku Imam Ghazaline jaman sak iki" (Kiai Musta'in itu (seperti) Imam Ghazali (pada) zaman sekarang/ Orde Baru).

<sup>85</sup> Toguan Rambe dan Seva Mayasari, "Pemikiran Politik Sunni Sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan", *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, Vol. 11 No. 1 (2020), 20.

mencintai dan tunduk (hormat, menghargai, mematuhi) kepada pemimpin. Ia mengutip, “Hai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri di antara kamu”.<sup>86,87</sup>

Imam Ghazali juga melarang manusia melawan dan mendurhakai penguasa dengan pemberontakan. Ia juga menjelaskan bahwa negara berdiri tidak hanya menggunakan pertimbangan rasio, namun juga dengan pertimbangan syar’i. Ia menguraikan lebih lanjut bahwa ajaran dan hukum Islam tidak mungkin bisa berjalan dengan baik bila keadaannya tidak mendukung, sedangkan faktor utama pendukungnya adalah negara. Merujuk pada kaidah ‘*Ma Lā Yatimmu al-Wajib Illā Bihi Fahuwa Wajib*’. “Suatu kewajiban tidak sempurna terpenuhi kecuali melalui sarana atau alat. Oleh karenanya, sarana atau alat tersebut juga wajib dipenuhi”. Agama adalah landasan untuk menjalankan kehidupan manusia, sedangkan kekuasaan adalah alat penjanganya. Kekuasaan politik tanpa dibarengi agama akan hancur, sedangkan agama tanpa adanya kekuasaan tidak akan bisa berjalan atau berjalan menuju ketiadaan.<sup>88</sup>

Tampak bahwa pemikiran Imam Ghazali lebih condong pada penggunaan dasar *al-maslahat* (kemanfaat hidup manusia).<sup>89</sup> Atas dasar kemaslahatan Imam Ghazali melegitimasi kekuasaan atau mengakui *status quo*-nya. Meski pemimpin itu berlaku tidak adil, tetap harus dipatuhi demi

<sup>86</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Karya Toha Putra, 1998), 162.

<sup>87</sup> Muhammad Iqbal, “Akar Tradisi Politik Sunni di Indonesia Masa Kerajaan Islam di Nusantara”, *ISLAMICA*, Vol. 6, No. 1, (September, 2011), 56. Lihat juga al-Ghazali, *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*, terj. Ahmadie Thaha dan Ilyas Ismail (Bandung: Mizan, 1994).

<sup>88</sup> Rambe et.al., “Pemikiran Politik Sunni Sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan”, 21-26. Lihat al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulum al-Din* (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), 31.

<sup>89</sup> Rambe et.al., “Pemikiran Politik Sunni Sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan”, 21-26. Lihat al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulum al-Din* (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), 31. Lihat juga al-Ghazali, *al-Iqtishad fi al-I’tiqad* (Mesir : Maktabah al Jund, 1972), 198-199.

tujuan-tujuan praktis yang bermanfaat bagi umat manusia. Alasan yang dilontarkan Imam Ghazali sungguh sangat bijak, yaitu siapa pun yang memimpin selama tidak mengesampingkan Islam, justru lebih baik daripada peperangan. Selanjutnya, meski seorang pemimpin berlaku buruk (keji dan jahat) harus disingkirkan, namun bila ia mendapat dukungan kekuatan militer, sehingga susah untuk diturunkan, serta jika tetap dipaksakan untuk melawan malah berakibat pada keburukan; perang saudara, jatuh korban, maka yang lebih maslahat adalah tetap membiarkannya berkuasa.<sup>90</sup>

Pemikiran Imam Ghazali senada dengan Ibn Taimiyah bahwa pemimpin adalah bayang-bayang Allah di bumi dan kekuasaannya bersumber dari Allah. Barang siapa yang tidak menyukai perilaku pemimpinnya, maka hendaklah bersabar. Barang siapa yang mati dalam keadaan melakukan pemberontakan, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah. Pemikiran fenomenal dari Ibn Taimiyah berkenaan dengan penguasa adalah ‘enam puluh tahun berada di bawah kekuasaan imam (pemimpin) yang zalim, lebih baik daripada satu malam tanpa adanya pemimpin’.<sup>91</sup>

Sudah terbukti bila pemikiran Imam Ghazali sama halnya dengan Kiai Musta’in Romli pada masa rezim Orde Baru. Sudah dijelaskan di atas bahwa ia melegitimasi kekuasaan Presiden Soeharto. Besar kemungkinan ia juga berfikir bahwa Soeharto menjadi presiden semata-mata Allah yang telah menulis takdirnya. Ia juga melihat kekuasaan Presiden Soeharto sangat kuat dengan latar belakang dan dukungan militer. Ketika ia merasakan Umat Islam

<sup>90</sup> Rambe et.al., “Pemikiran Politik Sunni Sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan”, 21-26.

<sup>91</sup> Iqbal, “Akar Tradisi Politik Sunni di Indonesia Masa Kerajaan Islam di Nusantara”, 57-63. Lihat juga di Ibn Taimiyah, *al-Siyasah al-Syar’iyah fi Ishlahi al-Ra’i wa al-Ra’iyyah*, Cet.2 (Mesir, Dar al Kitab al Arabi, 1951), 172-173.

termarginalkan dan mendapat perlakuan keji (persekusi, intimidasi, kriminalisasi), ia berfikir bahwa bergabung dengan rezim Orde Baru melalui Golkar lebih membawa masalah/manfaat daripada mengambil posisi bersebrangan dengan pemerintah. Sebab ia memiliki santri dan mahasiswa yang kegiatan pendidikannya harus tetap berlangsung dan jamaah TQN yang zikirnya harus tetap bergema.

#### **D. Hasil Partisipasi dan Pemikiran Politik**

Penjelasan partisipasi dan pemikiran politik Kiai Musta'in Romli sudah sangat jelas dan terperinci. Walau perjuangannya harus diberangi dengan konsekuensi yang beresiko berupa resistensi dari berbagai pihak. Tentu perjuangan tersebut juga memiliki hasil-hasil positif yang luar biasa, baik hasil dari tujuan utama atau pun hasil lain yang menyertainya.

##### **1. Resistensi**

Partisipasi dan pemikiran politik Kiai Musta'in Romli dalam hal ini harus dibayar dengan resiko yang sangat tinggi. Resiko terbilang tidak main-main karena mendapat perlawanan dan pertentangan.

##### **a) Hujatan**

Banyak sekali kiai dan lawan politik, sebagian wali santri dan jamaah TQN, dan warga umum yang menentang keputusan politik Kiai Musta'in Romli bergabung ke Golkar dengan melontarkan berbagai hujatan seperti kafir, murtad, dan lain sebagainya.<sup>92</sup>

<sup>92</sup> Nur Rifa'i (Santri senior Kiai Musta'in). *Wawancara*. Rumah: Jombang, 9 November 2022. H. Lukman Hakim, S. H., M. Hum (Putra Kiai Musta'in Romli/ Pembina Yayasan UN DAR), *Wawancara*, UN DAR: Jombang, 4 Desember 2022.

b) Persimpangan dengan NU

Utamanya hujatan dan tuduhan murtad terlontar karena dianggap bergabung dengan Golkar berarti keluar dari NU. Memang Kiai Musta'in Romli juga mendapat pertentangan dari kalangan NU sendiri. Sebab pertama karena ia adalah menantu Kiai Wahab Hasbullah—pendiri NU. Sebab kedua karena istrinya, HJ Jumiatin, juga adalah tokoh PPP. Bahkan HJ Jumiatin sempat 'bersebrangan' dengan suaminya. Sebab ketiga karena mayoritas tokoh NU (kiai, santri, politisi) menyatakan bahwa PPP adalah partainya orang NU.<sup>93</sup> Seperti halnya Kiai Yusuf Hasyim (petinggi PPP nasional dari Tebuireng) yang sempat dengan gamblang menunjukkan sikap keras menentang tindakan Kiai Musta'in Romli masuk Golkar. Termasuk di antaranya juga ialah Kiai Adlan Aly (Pesantren Walisanga, Jombang) dan Kiai Syansuri Baidhawi (rektor IKAHA/UNHASY Jombang).<sup>94</sup> Menanggapi hal-hal tersebut Kiai Musta'in Romli dengan lantang menyatakan bahwa "*Kartu NUku urip*". Hal yang dimaksud adalah Kiai Musta'in Romli lebih dari tokoh NU yang menghujatnya, karena ia adalah suami dari Hj. Jumiatin atau menantu Kiai Wahab Hasbullah—pendiri NU.<sup>95</sup>

c) Pecahnya TQN dan JATM

Resiko juga berimbas pada tarekat. Beberapa khalifah pendamping; Kiai Adlan Ali Cukir, Kiai Usman al-Ishaqi Sawah Pulo, Kiai Muhammad Siddiq Dawe Kudus, dan Kiai Zamrodji Kencong memisahkan diri dari

<sup>93</sup> Muhtadi, "Kiai Musta'in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan ...", 129.

<sup>94</sup> Sukamto, "Kilas Balik Khittah NU...", 42.

<sup>95</sup> H. Lukman Hakim, S. H., M. Hum (Putra Kiai Musta'in Romli/ Pembina Yayasan UN DAR), *Wawancara*, UN DAR: Jombang, 4 Desember 2022.

TQN Rejoso.<sup>96</sup> Mahmud Sujuthi menjelaskan bahwa akibat politik TQN Rejoso terpecah menjadi tiga, dua di antaranya menjadi TQN Cukir dan TQN Kedinding Lor. Kiai Adlan Aly mendirikan TQN Cukir murni karena motif politik. TQN Cukir merasa menjadi bagian dari NU, sedangkan NU menjadi bagian dari PPP sebagai partai Islam. Sementara berdirinya TQN Kedinding Lor lebih pada motif masalah sanad 'kemursyidan' antara Kiai Musta'in Romli dengan Kiai Usman al-Ishaqi. Sementara dalam urusan politik, TQN Kedinding Lor berusaha untuk lebih netral.<sup>97</sup>

Perpecahan tidak hanya terjadi di tingkat tokoh TQN. Pada tingkat murid/jamaah pun terjadi perpecahan antara yang tetap bertahan di TQN Rejoso atau memilih berpindah. Mahmud Sujuthi dalam bukunya 'Politik Tarekat' memperkirakan sebesar 50% jamaah TQN Rejoso melakukan pembelotan.<sup>98</sup> Sebagian jamaah TQN Rejoso yang menentang keputusan Kiai Musta'in Romli menunjukkan perlawanannya dengan pindah ke TQN Cukir.

Begitu pun dengan Jam'iyah Ahli Thoriqoh Mu'tabarrah (JATM) yang dipimpin Kiai Musta'in Romli sejak kongres ke 5, tahun 1975, di Madiun harus terpecah menjadi Jam'iyah Ahli Thoriqoh Mu'tabarrah Indonesia (JATMI) yang masih dipimpin Kiai Musta'in Romli dan Jam'iyah Ahli Thoriqoh Mu'tabarrah al-Nahdliyah (JATMAN) yang dipimpin oleh Kiai Adlan Aly dan kiai-kai lain melalui Muktamar NU ke 26 di Semarang. Pendirian JATMAN adalah bentuk perlawanan dari para

<sup>96</sup> Aly Mashar, "Genealogi dan Penyebaran Thariqah ...", 253. Kiai Adlan Ali mengambil ijazah mursyid kepada Kiai Mushlih Mranggen di Semarang.

<sup>97</sup> Sujuthi, *Politik Tarekat ...*, 74-98.

<sup>98</sup> Sujuthi, *Politik Tarekat ...*, 76.

kiai yang menentang keputusan Kiai Musta'in Romli bergabung ke Golkar. Sebab mereka menganggapnya sebagai penghianat NU.<sup>99</sup>

d) Santri Boyong

Pundok Pesantren Darul Ulum pun juga tidak bisa menghindari dari resiko. Para wali santri yang merasa terkejut dengan keputusan politik Kiai Musta'in Romli dengan berat hati memindahkan anaknya ke lembaga pendidikan lain. Tindakan tersebut sebagai bentuk upaya menentang keputusan kiaiinya. Santri yang boyong sekitar 30% dari jumlah keseluruhan. Kondisi seperti itu baru pulih kembali hingga pada tahun 1981<sup>100</sup> dimana pesantren masih di bawah pimpinan Kiai Musta'in Romli.

2. Hasil Positif

a. Pendidikan dan Tarekat

Sudah terungkap dengan jelas tujuan utama Kiai Musta'in Romli terjun dalam politik praktis dengan bergabung ke Golkar adalah sebagai bentuk perjuangan menegakkan agama Allah dalam bentuk melindungi dan menyelamatkan pendidikan; agar santri Darul Ulum dan mahasiswa UNDAK mendapat ketenangan dalam menuntut ilmu dengan dukungan bantuan operasional pendidikan dari pemerintah. Tidak sekadar menyelamatkan, tapi juga untuk perkembangan yang lebih maju.

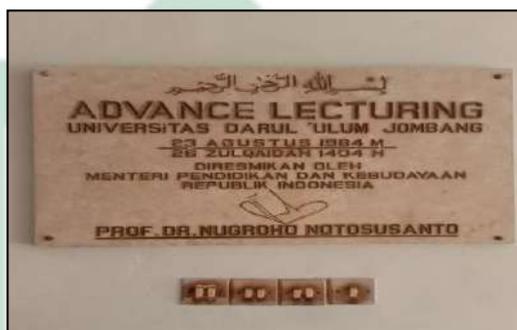
Hal tersebut memang terbukti. Pada 23 Agustus 1984, UNDAK mendapat bantuan gedung *Advance Lecturing* dari pemerintah sebagai

<sup>99</sup> Abitolkha, et.al, "Revitalizing National Political Values Through The Socio-Political Movements Of The Tarekat: ...", 387. Lihat juga website resmi JATMI, "Sejarah JATMI", dalam <http://www.jatmi.or.id/sejarah-jatmi/>. (10 November 2022), 1.

<sup>100</sup> Kiai Cholil Dahlan (Ketua Majelis PPDU), *Wawancara*, Kantor Sekretariat PPDU: Jombang, 9 November 2022.

penunjang perkuliahan. Tidak tanggung-tanggung, wakil pemerintah yang datang dan meresmikan langsung gedung ini adalah Prof. Dr. Nugroho Notosusanto yang menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu.

Gambar 4.1  
Prasasti Peresmian Gedung *Advance Lecturing*



Dua hari berselang, pada 25 Agustus 1984, giliran TQN Rejoso mendapat bantuan gedung ‘Pendopo Agung’ dari pemerintah. Sudomo—Laksamana Laut yang menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja meresmikan gedung ini. Pendopo Agung ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai tempat rutinitas jamaah dan tempat Kiai Musta’in menerima tamu politik.<sup>101</sup>

Gambar 4.2  
Prasasti Peresmian Gedung Pendopo Agung



<sup>101</sup> Ma'nuratus Sa'diyah (putri Kiai Musta'in) dan Binhad Nurrahmat (menantu), *Wawancara*, Al Hambra: Jombang, 20 Desember 2022.

Kiai Musta'in Romli meninggalkan *legacy* yang luar biasa, yaitu relasi antara Darul Ulum dengan pemerintah Orde Baru. Hal tersebut juga masih berlangsung setelah wafatnya. Terbukti UNDAR masih menerima bantuan pembangunan dari rezim yang berkuasa. Bantuan pertama adalah pendirian masjid dari Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila yang diketuai oleh Presiden Soeharto sendiri. Masjid ini diberi nama Al-Musta'in untuk mengenang ketokohan Kiai Musta'in Romli. Pada 8 November 1987, *the big boss of the new order regime* sendiri yang datang ke UNDAR untuk meresmikan masjid al-Musta'in.

Gambar 4.3  
Masjid Al-Musta'in dan Prasasti Peresmiannya



Pada hari yang sama, 8 November 1987, Presiden Soeharto juga membawa serta Sudarmono yang menjabat sebagai Sekretaris Negara RI. Sudarmono atas nama negara menyerahkan bantuan Gedung Fakultas

Hukum dan Fakultas Ekonomi kepada UNDAR. Ia juga yang secara langsung meresmikannya.

Gambar 4.4  
Prasasti Peresmian Gedung  
Fakultas Hukum dan Faklutas Ekonomi



Dua tahun berselang, empat tahun setelah wafatnya Kiai Musta'in Romli, relasi antara UNDAR dan pemerintah masih tetap terjalin. Pada 3 Oktober 1989, giliran Soedomo—Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI mengunjungi UNDAR untuk meresmikan Gedung Laboratorium Rumah Kaca sebagai fasilitas penunjang perkuliahan mahasiswa Fakultas Pertanian.

Gambar 4.5  
Prasasti Gedung Laboratorium Rumah Kaca  
Fakultas Pertanian



Keberhasilan Kiai Musta'in Romli masih terasa sampai sekarang. Kedua lembaga itu masih berdiri dengan kokoh. Pondok Pesantren Darul Ulum menjadi salah satu pesantren terbesar di Indonesia. Memiliki ribuan tenaga pendidik, puluhan ribu santri (tiap tahun pelajaran), dan puluhan lembaga pendidikan formal dan non-formal. Sementara UNDAR tetap menjaga keeksistensiannya sebagai perguruan tinggi. Aktivitas perkuliahan masih berlangsung dan banyak meluluskan mahasiswa.

Gambar 4.6

#### Pondok Pesantren Darul Ulum dan UNDAR Jombang



Tujuan utama yang lain adalah agar jamaah TQN tetap tenang melakukan rutinitas zikir berjamaah. Tidak mendapat gangguan dari aktivis dan simpatisan ekstrem Golkar. Sungguh tujuan tersebut benar-benar sudah tercapai. Selain gedung-gedung yang masih berdiri kokoh, sampai sekarang TQN Rejoso dan TQN UNDAR juga masih menjadi tujuan safari politik tokoh-tokoh dari berbagai tingkat, dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan bahkan sekaliber Presiden Indonesia.

Gambar 4.7

Gedung JATMI - Pusat TQN UNRAR



Gambar 4.8

Aktivitas TQN Rejoso

Keterangan: Kunjungan Presiden Jokowi dalam Baiat TQN 2018



b. Kader

Kiai Musta'in Romli juga meninggalkan *legacy* berupa kader politik untuk menjaga relasi antara Darul Ulum dengan pemerintah. Ialah Kiai As'ad Umar yang membersamai Kiai Musta'in Romli bergabung ke Golkar. Kiai Musta'in Romli selalu mengajaknya dalam kampanye-kampanye Golkar.<sup>102</sup> Kader lainnya adalah Kiai Dimiyati Romli yang juga

<sup>102</sup> Soraya, "Kiai dan Politisi: Upaya dan Pemikiran K. H. As'ad Umar dalam Pengembangan Pondok Pesantren Darul Ulum 1985-2010", (Tesis—Universtas Indonesia, 2021), 54 dan Soraya (sejarawan dan keluarga PPDU), *Wawancara*, WhatsApp: 26 November 2022.

bergabung ke Golkar. Keduanya juga berhasil menjadi wakil rakyat.<sup>103</sup>

Pada kemudian hari, keduanya yang memimpin Darul Ulum dan TQN sepeninggal Kiai Musta'in Romli.

c. Politik

1) Prestasi Jabatan

Dalam politik, prestasi Kiai Musta'in Romli juga terhitung luar biasa meski datang sebagai putra daerah Jombang, sebuah kabupaten di Jawa Timur. Ia berhasil menduduki jabat sebagai anggota DPR-MPR RI, Wakil Ketua DPP MDI Golkar, Delegasi bersama Umar Wirahadi (Wakil Presiden RI ke-4) dan Mughtar Kusumaatmaja (Menteri Luar Negeri RI) dalam acara KTT Organisasi Konferensi Islam di Casablanca, Maroko.<sup>104</sup>

2) Relasi Politik

Selain pejabat negara yang datang untuk meresmikan gedung-gedung tadi. Tidak terhitung lagi jumlah pejabat yang menjadi relasi Kiai Musta'in Romli dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Mereka hampir semua pernah berkunjung ke Darul Ulum. Adam Malik (Wakil Presiden ke 3) pernah dikawal belasan tank saat berkunjung. Ia juga berkenan duduk bersama para jamaah untuk mengikuti pengajian Kiai Musta'in Romli.<sup>105</sup>

Pejabat lain yang pernah berkunjung adalah Abdul Ghafur—Menteri Pemuda dan Olahraga. Berikut adalah momen pertemuan

<sup>103</sup> Sujuthi, *Politik Tarekat ...*, 78-79.

<sup>104</sup> Tim Khusus, *Pondok Pesantren Darul Ulum*, 31.

<sup>105</sup> Kiai Tuhanik (Santri/ Abdi Ndalem Kiai Musta'in), *Wawancara*, Wisma Musta'in: Jombang, 27 November 2022.

antara Kiai Musta'in Romli dengan Abdul Ghafur yang terabadikan dalam foto.

Gambar 4.9

Kiai Musta'in bersama Menpora Abdul Ghafur



#### d. Inspirasi NU

Meski bukan termasuk prestasi, perihal ini bisa disebut sebagai inspirasi. Kendati banyaknya Kiai NU yang 'membenci' keputusan Kiai Musta'in Romli bergabung ke Golkar. Kiai Musta'in Romli masih menerima ajakan Presiden Soeharto untuk mendampingi datang ke Muktamar NU Situbondo.<sup>106</sup> Kehadiran Kiai Musta'in Romli ke Muktamar tentu sangat strategis. Mengingat tidak baiknya hubungan antara rezim Orde Baru dengan NU, sedangkan Kiai Musta'in Romli adalah tokoh Islam yang berakar dari NU yang sedang mengambil posisi di barisan pendukung pemerintah. Secara tidak langsung Kiai Musta'in Romli adalah jembatan antara pemerintah dengan NU di tengah terbitnya aturan penerapan Pancasila sebagai asas tunggal.

<sup>106</sup> Nur Rifa'i (Santri senior Kiai Musta'in). *Wawancara*. Rumah: Jombang, 9 November 2022. Ma'nuratus Sa'diyah (putri Kiai Musta'in) dan Binhad Nurrahmat (menantu), *Wawancara*, Al Hambra: Jombang, 20 Desember 2022.

Pada akhirnya NU juga mengambil jalan yang sama sejak Mukhtar Situbondo 1984, yaitu menyatakan menerima Pancasila sebagai asas tunggal<sup>107</sup> dan menarik organisasi dari arena politik praktis yang berarti mengembalikan NU ke khittah awalnya sebagai *jamaah dinniyah*. Sekaligus membebaskan warga NU untuk memilih sendiri partai politiknya, tidak harus ke PPP.<sup>108</sup> Dengan NU kembali khittah, praktis para tokoh NU tidak lagi menilai gerakan Kiai Musta'in Romli sebagai keputusan yang salah dan menyimpang. Bahkan banyak di antara tokoh NU yang mau meminta maaf kepada Kiai Musta'in Romli.<sup>109</sup> Meski dalam sisi pandangan hukum, ia merupakan warga negara yang memiliki hak menentukan pilihan politiknya. Begitu juga dalam pandangan konstitusional yang menilai langkahnya sah sebagai bentuk aspirasi demokrasi.<sup>110</sup> Dengan demikian, sejarah telah mencatat bahwa Kiai Musta'in Romli memiliki pemikiran yang lebih dahulu maju beberapa langkah daripada tokoh-tokoh NU pada masa itu. Meski pun demikian, Kiai Musta'in tetaplah anak kandung NU yang lahir dan meninggal dalam status sebagai warga Nahdliyin.

e. Umat Islam

1) Penyelamatan Kiai

Kiai Musta'in Romli juga tidak segan mengajak para kiai lain untuk ikut bergabung ke Golkar, agar tidak mendapat perlakuan kasar

<sup>107</sup> Subagio, "Perjalanan Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1973-1984: ...", 27.

<sup>108</sup> Sukanto, "Kilas Balik Khittah NU ...", 32-33.

<sup>109</sup> Ma'nuratus Sa'diyah (putri Kiai Musta'in) dan Binhad Nurrahmat (menantu), *Wawancara*, Al Hamba: Jombang, 20 Desember 2022.

<sup>110</sup> Abitolkha, et.al, "Revitalizing National Political Values Through The Socio-Political Movements Of The Tarekat: ...", 388.

dari rezim Orde Baru. Beberapa di antaranya ialah Kiai Muafiq dari Sampang dan Kiai Alwi bin Abdullah dari Bangkalan. Mereka tidak sekadar terjauh dari perlakuan kasar rezim Orde Baru, melainkan juga menerima ‘manfaat’ dari pemerintah seperti yang didapatkan Kiai Musta’in Romli.<sup>111</sup>

## 2) Hilangnya Fanatisme Partai Politik

Setelah diterbitkannya aturan asas tunggal dan setelah Muktamar NU Situbondo. Praktis Umat Islam (termasuk warga Nahdliyin) tidak lagi menilai bergabung dengan partai di luar Islam, seperti langkah Kiai Musta’in Romli, adalah sebagai tindakan dosa. Bahkan Umat Islam lambat-laun mengikuti jejak Kiai Musta’in Romli, yaitu tidak fanatik terhadap partai politik. Para politisi muslim bebas memilih partai sesuai kehendak pribadinya.<sup>112</sup>

## 3) Relasi Pemerintah dan Pesantren

Setelah adanya relasi antara Kiai Musta’in Romli dan rezim Orde Baru. Selanjutnya tidak hanya Darul Ulum yang menerima manfaat atas terbentuknya relasi dengan pemerintah. Secara perlahan pondok pesantren lain, seperti Bahrul Ulum Tambakberas dan Mambaul Maarif Denanyar juga menerima manfaat yang sama.<sup>113</sup>

## 4) Duduk dalam Jajaran Pemerintahan

Keberanian Kiai Musta’in Romli bergabung ke Golkar telah membuka jembatan bagi Umat Islam untuk sebisa mungkin masuk ke

<sup>111</sup> Humaini, “Politik Sufisme ...”, 61-62.

<sup>112</sup> Humaini, “Politik Sufisme ...”, 60-61.

<sup>113</sup> Humaini, “Politik Sufisme ...”, 61.

dalam jajaran pejabat negara.<sup>114</sup> Dalam periode akomodatif sudah dijelaskan bahwa banyak aktivis dan politisi Islam yang berhasil masuk dan menduduki beberapa jabatan di Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

f. Presiden Soeharto Baiat TQN

Presiden Soeharto semakin dekat dengan TQN. Terdapat kabar menarik mengenai kedekatan ini, yaitu Presiden Soeharto sudah berbaiat menjadi murid TQN kepada Kiai Musta'in Romli.<sup>115</sup> Tentu kabar ini perlu kajian lebih mendalam, karena melibatkan tokoh besar. Namun ada satu peristiwa yang menguatkan kebenaran kabar ini. Pada 16 Januari 2008, Harmoko mengajak Kiai Maktub Effendi (Ketua Umum JATMI) ke Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk menjenguk dan 'memberikan doa' kepada Presiden Soeharto pada saat-saat menjelang wafatnya.<sup>116</sup>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>114</sup> Humaini, "Politik Sufisme ...", 62.

<sup>115</sup> Kiai Tuhanik (Santri/ Abdi Ndalem Kiai Musta'in), *Wawancara*, Wisma Musta'in: Jombang, 27 November 2022.

<sup>116</sup> Lumtiur K.N.M, "Harmoko Bawa Ahli Tarekat Doakan Soeharto", dalam <https://news.okezone.com/read/2008/01/16/1/75828/harmoko-bawa-ahli-tarekat-doakan-soeharto> (28 November 2022), 1.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kiai Musta'in Romli merupakan tokoh Islam yang lahir dari keturunan tokoh-tokoh hebat yang memiliki nasab sampai kepada Nabi Muhammad. Tumbuh besar dari lingkungan keluarga pesantren. Takdir membawanya menjadi tokoh Islam pesantren yang memimpin Pondok Pesantren Darul Ulum, tokoh Islam sufistik yang memimpin TQN, akademisi muslim yang memimpin UNDAR, dan tokoh Islam politik.
2. Politik Islam Orde Baru memuat dua periodisasi. Pertama, periode penjinakan adalah sebuah masa pemerintahan yang rezimnya sangat memusuhi Islam politik. Pemerintah menjinakkan Islam politik dengan menerbitkan berbagai aturan dan wacana pendukung disertai tindakan represif. Kedua, periode akomodatif adalah sebuah masa pemerintahan yang rezimnya mulai memiliki perhatian kepada Islam politik.
3. Kiai Musta'in Romli merasa prihatin dengan kondisi Umat Islam pada periode penjinakan. Hal tersebut yang menjadi faktor utama Kiai Musta'in Romli memutuskan untuk bergabung ke Golkar. Partisipasi politik Kiai Musta'in Romli adalah sebagai Juru Kampanye, Anggota DPR-MPR RI fraksi Golkar, dan Wakil Ketua DPP MDI. Sementara pemikiran politiknya memuat tiga hal besar, yaitu melegitimasi kepemimpinan Presiden Soeharto dan rezim Orde Barunya, berpolitik untuk Islam, pengakuan terhadap betapa kuat dan ampuhnya Pancasila.

## B. Saran

Setelah menjalani proses penelitian “Partisipasi dan Pemikiran Politik Kiai Musta’in Romli Pada Masa Orde Baru (1973-1985)”. Perlu disampaikan pula beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para mahasiswa dan cendekiawan muslim untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Kiai Musta’in Romli dan Politik Islam Orde Baru. Sebab masih banyak sekali ditemukan kesenjangan antara teori dengan fakta yang terjadi.
2. Kepada para aktivis dan kader Islam politik untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Tetap berpolitik dengan landasan kemaslahatan dan berpegang pada nilai-nilai pancasila dan keislaman. Tidak perlu merasa paling benar dan menganggap kelompok lain salah, karena setiap keputusan selalu dibarengi dengan niatan yang baik.
3. Kepada seluruh rakyat Indonesia agar tetap bersatu-padu. Jangan ada lagi sekat antara kelompok nasionalis dan kelompok Islamis. Kelompok nasionalis tetap membutuhkan Islam politik dalam memimpin negara yang mayoritas pendudukannya adalah muslim, sedangkan kelompok Islamis sudah membuktikan kenasionalisannya di sepanjang arus sejarah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Jurnal

- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Abitolkha, Amir Maliki. et.al. "Revitalizing National Political Values Through The Socio-Political Movements Of The Tarekat: Studied at the Political Social Role of Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah in Nusantara". *Al Tahrir*, Vol. 20 No. 2 (November, 2020).
- \_\_\_\_\_. "A Cult In Tariqa Leadership (A Case Study at the Qadiriyyah wa Naqshbandiyyah Tariqa in Jombang - Indonesia)". *Journal of Positive School Phsycology*, Vol 6 No 4 (2022).
- Afandi, Ahmad Hasan dan Jenny Yudha Utama. "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Dukungan Politik Kyai Musta'in Romly terhadap Pengembangan Pesantren". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Majapahit Policy*, Vol 1 No 1 (2020).
- Afandi, Ahmad Hasan. *Kontroversi Politik Kyai Tarekat: Studi Pergeseran Orientasi Politik Kyai Tarekat Qodiriyyah wa Naqsabandiyah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Afkar, Tashwirul. *Partai-partai Islam: Transformasi Gerakan Islam dan Ruang Demokrasi*. Jakarta: Edisi No. 4 1999.
- Alfaqi, Mifdal Zusron. "Memahami Indonesia Melalui Prespektif Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol 28, Nomor 2 (Agustus, 2015), 113.
- Ansori, Ahmad Insya' dan Moh. Ulumuddin. "Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa di Indonesia". *Jurnal Mahkamah*, Vol 5 No 1 (2020), 37-38.
- Azra, Azyumardi. *Akar-akar Historis Pembaharuan Islam di Indonesia: Neo Sufisme Abad XI-XII H*. Jakarta: Paramadina.
- Bertens, K. *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*. Jakarta: Gramedia, 2001.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik..* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022.
- \_\_\_\_\_. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obar Indonesia, 1998.
- Buthy (al), Said Muhammad Ramadhan. *Fiqh al-Sirah al-Nabawiyyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2012.
- Cipta, Samudra Eka dan Taufan Sopian Riyadi. "Relevansi Pemahaman Islam Madzhab Ciputat & Himpunan Mahasiswa Isam Terhadap Perkembangan Tradisi Keilmuan dan Gerakan Pemikiran". *El Tarikh*, Vol 1 No 2 (2020), 35.
- Darmawijaya. "Islam dan Kekuasaan Orde Baru: Membaca Kembali Politik De-Islamisasi Soeharto". *Sosiologi Refektif*, Vol 10, N0 1 (Oktober, 2015), 63.
- Djaelani, Abdul Qadir. *Peta Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam di Indonesia*. Surabaya: Tri Bakti, 1996.
- Dzakie, Fatonah. "Meluruskan Pemahaman Pluralisme dan Pluralisme Agama Di Indonesia". *Al-Adyan*, Vol. IX No.1 (Januari-Juni, 2014), 80-81.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara – Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* [edisi digital]. (Jakarta : Democracy Project – Yayasan Abad Demokrasi, 2011).

- \_\_\_\_\_. *Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*. Yogyakarta : Galang Printika, 2001.
- Eriyanto. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Fahmi, Naufan. et.al, *SKI-Kedarululuman*. Jombang: Njoso Press, 2021.
- Famular, Fara. “Peran Majalah Suara Muhammadiyah dalam Perjuangan Politik Muhammadiyah Tahun 1965-1985”, *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, Vol 3 No 2 (2018), 236.
- Faulks, Keith. *Sosiologi Politik*. Bandung: Nusa Media., 2010.
- Firdaus A.N. *Dosa-Dosa Politik Orde Lama dan Orde Baru Yang Tidak Boleh Berulang Lagi Di Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1999..
- Foucault, Michel. *Power/ Knowledge; Selected Interview and Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books, 1980.
- Ghazali (al). *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*. Mesir : Maktabah al Jund, 1972.
- \_\_\_\_\_. *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*. Terj. Ahmadie Thaha dan Ilyas Ismail. Bandung: Mizan, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Bairut: Dar al-Fikr, 1995.
- Goncing, Nurlila. “Politik Nahdatul Ulama dan Orde Baru”. *The Politics; Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Vol 1 No 1, (Januari, 2015), 66.
- Hanik, Umi. “Pluralisme Agama Di Indonesia”. *Tribakti - Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol 25 No 1 (Januari, 2014), 44-45.
- Hartono. *Hubungan antara Kepatuhan dan Otonomi Santri Remaja di Pesantren Darul Ulum Jombang* [Tesis Tidak Dipublikasikan]. Bandung: PPs Univ. Padjadjaran. 2004.
- Hendro. *Sejarah Surat Wasiat “Ijazah Baiat” (Janji Thariqat) Dari KH. Romly Tamim kepada Mustain Romly*. Jombang: Tanpa Penerbit. 1984.
- Hidayah, Siti Nur. “Pesantren For Middle-Class Muslims In Indonesia (Between Religious Commodification And Pious Neoliberalism)”. *Qudus International Journal of Islamic Studies (QIJIS)*, Vol 9 Num 1 (2021), 226-227.
- Himawan, Albyanka Romero dan Nala Nandana Undiana. “Pandangan Mahasiswa Terhadap Film Penghianatan G30S/PKI”. *Cinematology: Jurnal Anthology of Fil and Television Studies*, Vol 1 No 1 (2021), 43.
- Humaini, M Ubaidillah. “Politik Sufisme – Studi Kasus Afiliasi KH. Musta’in Romly dalam Partai Golkar”, *Jurnal Putih*, Vol 7 No 2. September 2022.
- Ibrahim, Ahmad. et.al. *Islam di Asia Tenggara Perkembangan Kontemporer*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Iqbal, Muhammad. “Akar Tradisi Politik Sunni di Indonesia Masa Kerajaan Islam di Nusantara”. *ISLAMICA*, Vol. 6, No. 1, (September, 2011), 56.
- Ishom, Muhammad. “Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah”. *al-Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, Vol 7 No 2 (Desember, 2016), 128-129.
- Ismail, Faisal. *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Kamuaruzzaman. *Relasi Islam dan Negara: perspektif Modernis & Fundamentalis*. Magelang: Indonesia Tera, 2001.
- Kementerian Agama RI. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Karya Toha Putra, 1998.

- Khairani, Al-Donna Zhara. "Jargon-Jargon Politik Masa Orde Baru dalam Menciptakan Stabilitas Nasional. *Avatar e-Journal Pendidikan Islam*, Vol 3 No 2 (2015), 270-271.
- Kolb, David A. "Experiential Learning: Experience As The Source Of Learning And Development" (*Upper Saddle River, NJ: Pearson*, 2015), 49
- Kroef, Justus M van der. *Indonesia After Soekarno*. Vancouver: University of British Columbia Press, 1971.
- Ma'shum, Ishomuddin. *Mengenal Al-Mursyid Syekh Muhammad Romly Tamim – Shahib al-Awrad al-Istighatsah bi Hadrati Rabb al-Bariyyah*. Pasuruan: Pustaka, 2015.
- \_\_\_\_\_. *Sejarah dan Keutamaan Istighatsah*. Surabaya: LTN Pustaka, 2018.
- Ma'shum, Toha. "Persinggungan Kepemimpinan Transformational dengan Kepemimpinan Visioner dan Situasional". *INTIZAM : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol 2, No 2 (April 2019), 98.
- Maran, Rafael Raga. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007).
- Mas'ood, Mochtar. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Mashar, Aly. "Genealogi dan Penyebaran Thariqah Qadiriyyah Wa Naqshabandiyah Di Jawa". *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XIII, No. 2 (Juli-Desember, 2016), 252-253.
- Mubarak, Haris Zaky. "Wacana Islam dalam Politik Praktis Di Indonesia". *Jurnal Widya Citra*, Vol. 1 No 2 (September, 2020), 25.
- Muhtadi. "Kiai Musta'in Romli dan Transformasi Sosial Keagamaan Generasi Muda Tarekat Qadiriyyah dan Naqsyabandiyah Universitas Darul 'Ulum (TQN UNDA) Jombang". Disertasi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Mujiwati, Yuniar. dan Ana Ahsana El-Sulukiyyah. "Analisis Nilai-Nilai Sastra dan Bentuk Nasionalisme dalam Lagu *Yaa Lal Wathon* Ciptaan KH. Abdul Wahab Hasbullah". *Educazione*, Vol 5 No 1 (Mei 2017), 63-64.
- Musta'in dan Wahyu Budiantoro. "Dimensions of Sufistic Da'wah KH. Musta'in Ramly (1931-1985)". *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Vol 16 No 1 (2022), 37-54
- Notosusanto, Nugrogo. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*. Jakarta, Yayasan Idayu: 1978.
- Nurjaman, Ilham Muhammad. et.al. "Peran ICMI Masa Kepemimpinan BJ Habibie (1990-2000) dalam Pembangunan Nasional". *Hanifiyah: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol 5 No 1 (2022), 60-61.
- Putra, Okrisal Eka. "Hubungan Islam dan Politik Masa Orde Baru". *Jurnal Dakwah*, Vol IX No 2 (Juli-Desember 2008), 187.
- Rahman, Arifn. *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Struktural Fungsional*. Surabaya: SIC, 2002.
- Rambe Toguan dan Seva Mayasari. "Pemikiran Politik Sunni Sebagai Alat Legitimasi Kekuasaan". *Jurnal: Penelitian Medan Agama*, Vol. 11 No. 1 (2020), 20.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi, 2008.
- Rizqi, Retanisa. "Efektifitas Penyederhanaan Partai Politik Era Orde Baru". *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol 1 No 3, (Juli, 2022), 207.
- Romli, Musta'in. *Rislatu al-Khowasiyah*. Jombang: TP, 1961.

- Sakdiah, Halimatus. "Komunikasi Interpersonal sebagai Strategi Dakwah Rasulullah (Perspektif Psikologi)". *Alhadharah*, Vol 15 No 30 (Juli-Desember), 40-50.
- Salam (al), 'Izuddin Abdi. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Sastroatmodjo, Sudijono. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press, 1995.
- Shalahuddin. "Karakteristik Kepemimpinan Transformasional". *Al-Fikrah: Jurnal Kependidikan Islam*, Vol x No x, (2015), 48-49.
- Soraya. "Kiai dan Politisi: Upaya dan Pemikiran K. H. As'ad Umar dalam Pengembangan Pondok Pesantren Darul Ulum 1985-2010". Tesis—Universtas Indonesia, 2021.
- Subagio, Muhammad Eko. "Perjalanan Politik Nahdlatul Ulama Tahun 1973-1984: Keluarnya Nahdlatul Ulama dari Partai Persatuan Pembangunan". *Avatar: e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol 7 No 2 (2019), 27.
- Subekty, Wibowo et.al. "Peran Majelis Ulama Indonesia Pada Masa Orde Baru 1975-1998 dan Relevansinya dalam Pembelajaran Sejarah". *Jurnal Candi*, Vol 17 No 1 (2018), 86.
- Subiyakto, Rudi. "Panggung Politik Kiai di Era Pemilukada". *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45 No. II (Juli-Desember, 2011), 1571-1573.
- Sujuthi, Mahmud. *Politik Tarekat Qadiriyah Wa Naqsabandiyah Jombang* (Yogyakarta: Galang Press, 2001), 79.
- Sukanto. "Kilas Balik Khitah NU dalam Konteks Politik Lokal di Jombang". *Al-Daulah*, Vol 2 No 1 (April, 2002)", 30-31.
- \_\_\_\_\_. *Pergulatan Politik Lokal Elite Tarekat*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2012.
- Sukamtono, Ali. "Pengaruh Status Sosial Kiai Terhadap Jumlah Santri di Pesantren Jombang". Tesis—UNAIR, 1996.
- \_\_\_\_\_. "Rekonstruksi Pemikiran Kiai Musta'in Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Darul Ulum Jombang". Disertasi—Universitas Merdeka Malang, 2011.
- \_\_\_\_\_. *Kiai Musta'in Ramly, Tarekat Pesantren dan Sains, Otak London dan Hati Masjidil Haram, Rekonstruksi Pemikiran Sosial Pendidikan Agama Islam*. Surabaya: Jengala Pustaka Utama, 2016.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007.
- Susanto, Musyrifah. *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Susanto, Edi. "Krisis Kepemimpinan Kiai - Studi atas Kharisma Kiai dalam Masyarakat". *ISLAMICA*, Vol. 1, No. 2 (Maret, 2007), 113.
- Sutrisno, Muji dan Hendar Putranto. *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Syamsuddin, Muh. "Dinamika Islam Pada Mada Orde Baru". *Jurnal Dakwah*, Vol XI No. 2 (Juli-Desember, 2020), 145.
- Taimiyah, Ibn. *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlahi al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Cet.2. Mesir, Dar al Kitab al Arabi, 1951.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

- Tim Kepondokan dan Madrasah Tafaqquh Fiddin. *Buku Panduan Bimbingan Ibadah Pondok Pesantren Darul Ulum* (Jombang: PPDU, 2022).
- Tim Khusus Penggalan Sejarah dan Nilai Darul Ulum. *Pondok Pesantren Darul Ulum*. Jombang, Majelis PPDU, 2013.
- TIM PBNU. *Benturan NU-PKI (1948-1965)*. Jakarta: PBNU, 2013.
- Tim Pendaran. *Trisula Universtiar Darul Ulum*. Jombang: Lembaga Trisula Universtiar Darul Ulum.
- Turmudi, Endang. "Islamic Politic in Contemporary Indonesia". *PESA*, Vol 2 No 3 (Desember, 2016), 3.
- \_\_\_\_\_. "The Tarekat Qadiriyyah Wa Naqsyabandiyah in East Java and Islamic Politics in Indonesia". *Shoutheast Asian Journalof Social Science*, Vol 6 No 2 (1998).
- \_\_\_\_\_. *Struggling for the Umma Changing Leadership Roles of Kiai in Jombang, East Java*. Canberra, ANU E Press - The Australian National University, 1996.
- Yanti, Fitri. "G-30-S/PKI Event Behind The Estabblishment Of The 1965 Pancasila Magic Day". *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, Vol. 2 No. 2 (2017), 33-40.
- Yusuf, Mundzirin et.al. *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pinus, 2006.
- Yusup. "Respon Kristen Terhadap Kebijakan Asas Tunggal Pancasila Era Orde Baru". *Shalom: Jurnal Theologi Kristen*, Vol 1 No 1 (2021), 4.
- Zawawi, Abdullah. "Politik dalam Pandangan Islam". *Jurnal Ummul Qura*, Vol V, No 1 (Maret, 2015), 88.
- Zulaichah, Lilik. *Metodologi Sejarah 1*. Surabaya: Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel, 2004.
- Zulkifi. *Sufsm in Java: The Role of Pesantren in The Maintenance of Sufsm in Java*. Jakarta: INIS, 2002.

## B. Wawancara

- Amir Maliki Abitolkha (Akademisi dan Peneliti TQN), *Wawancara*, UIN Sunan Ampel: Surabaya, 15 September 2022.
- Gus Lukman Hakim. (Putra Kiai Musta'in Ramly/ Pembina Yayasan UNДАР). *Wawancara*. UNДАР: Jombang, 4 Desember 2022.
- Kiai Cholil Dahlan (Ketua Majelis PPDU). *Wawancara*. Kantor Sekretariat PPDU: Jombang, 9 Novemeber 2022.  
[https://drive.google.com/file/d/19\\_9HkvUTs6NezXRWpE30FVIx9\\_R20YVh/view?usp=drivesdk](https://drive.google.com/file/d/19_9HkvUTs6NezXRWpE30FVIx9_R20YVh/view?usp=drivesdk)
- Kiai Tuhanik (Santri/ Abdi Ndalem Kiai Musta'in). *Wawancara*. Wisma Musta'in: Jombang, 27 November 2022.  
<https://drive.google.com/file/d/1Apy92jXGQDtjtGk4vGBFHRy3Hq9xtMxz/viaw?usp=drivesdk>
- Muhtadi (Santri Kiai Musta'in). *Wawancara*. UNДАР: Jombang, 11 November 2022.  
<https://drive.google.com/file/d/18I2yH1T4LpMrYhJsYR4KWX3Ime7uwbRu/view?usp=drivesdk>

Ning Ma'nuratus Sa'diyah dan Gus Binhad Nurrohmat (Putri dan menantu), *Wawancara*, Al Hambra: Jombang, 20 Desember 2022.

[https://drive.google.com/file/d/19\\_9HkvUTs6NezXRWpE30FVIx9\\_R20YVh/view?usp=drivesdk](https://drive.google.com/file/d/19_9HkvUTs6NezXRWpE30FVIx9_R20YVh/view?usp=drivesdk)

Nur Rifa'i (Santri Kiai Musta'in). *Wawancara*. Rumah: Jombang, 9 November 2022.

<https://drive.google.com/file/d/1AkCy6L7uHKnm1zvOVzCmUWY1ObuUY5zg/view?usp=drivesdk>

Soraya (sejarawan dan keluarga PPDU). *Wawancara*. WhatsApp: 26 November 2022.

### C. Arsip

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/1973 Tahun 1973 Tentang Pemilu.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/1978 Tahun 1978 tentang Pemilihan Umum.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 Tahun 1978 tentang Pemilihan Umum.

Musta'in Romli, *Arsip*, 1 Oktober 1954.

Musta'in Romli, *Arsip*, 1 Januari 1954.

Musta'in Romli, *Arsip Kata Sambutan*, April 1984. Dalam Hendro. *Sejarah Surat Wasiat "Ijazah Baiat" (Janji Thariqat) Dari KH. Romly Tamim kepada Mustain Romly*. Jombang: Tanpa Penerbit. 1984.

PPDU/UNDAR, *Arsip*, 19 Februari 1974.

### D. Internet

Abror, Muhamad. "Hikmah di Balik Dakwah Sembunyi-sembunyi Rasulullah". Dalam <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/hikmah-di-balik-dakwah-sembunyi-sembunyi-rasulullah-tMjTG>. 7 November 2021.

Dimiyathi, Soraya. "Mengapa di masa Orba pemimpin Darul Ulum memilih Golkar?". Dalam

[https://m.facebook.com/story.php?story\\_fbid=pfbid037kZk8tDqDq2Bb1bAyiPPDYqpv7zvuoicjugU2tYdNvVwVELPkJ46nmfwEkBNwsn8l&id=1831435197](https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid037kZk8tDqDq2Bb1bAyiPPDYqpv7zvuoicjugU2tYdNvVwVELPkJ46nmfwEkBNwsn8l&id=1831435197). 11 November 2022.

DPD MDI Riau. "Majeis Dakwah Islamiyah". Dalam <https://golkarriau.com/web/site/ormas-sayap/majelis-dakwah-islamiah-mdi.html>. 9 November 2022.

JATMI, "Sejarah JATMI", dalam <http://www.jatmi.or.id/sejarah-jatmi/>. 10 November 2022.

KPU RI. "Pemilu 1955". Dalam <https://www.kpu.go.id/page/read/8/pemilu-1955>. 1 November 2022.

\_\_\_\_\_. "Pemilu 1971". Dalam <https://kab-jembrana.kpu.go.id/page/read/38/pemilu-1971>. 1 November 2022.

\_\_\_\_\_. "Pemilu 1977". Dalam <https://kab-bandung.kpu.go.id/page/read/65/pemilihan-umum-tahun-1977>. 1 November 2022.

- Lukman, Fadhli. "Cerita Lama Qur'an dan Kampanye Politik di Indonesia", dalam <https://blog.uin-suka.ac.id/fadhli.lukman/cerita-lama-quran-dan-kampanye-politik-di-indonesia>. 7 November 2022.
- Lumtiur K.N.M. "Harmoko Bawa Ahli Tarekat Doakan Soeharto". Dalam <https://news.okezone.com/read/2008/01/16/1/75828/harmoko-bawa-ahli-tarekat-doakan-soeharto>. 28 November 2022.
- Matanasi, Petrik. "Orang-Orang Katolik dan Kristen di Sekitar Soeharto". Dalam <https://tirto.id/orang-orang-katolik-dan-kristen-di-sekitar-soeharto-enUL>. 5 November 2022.

